



***MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS 1 (MDG1) SEBAGAI ALAT
HEGEMONI AMERIKA SERIKAT TERHADAP BRASIL***

***(MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS 1 (MDG1) AS HEGEMONIC
MEANS OF UNITED STATES of AMERICA TOWARDS BRAZIL)***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

**DETA MALATASYA ANDANI
NIM 110910101001**

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

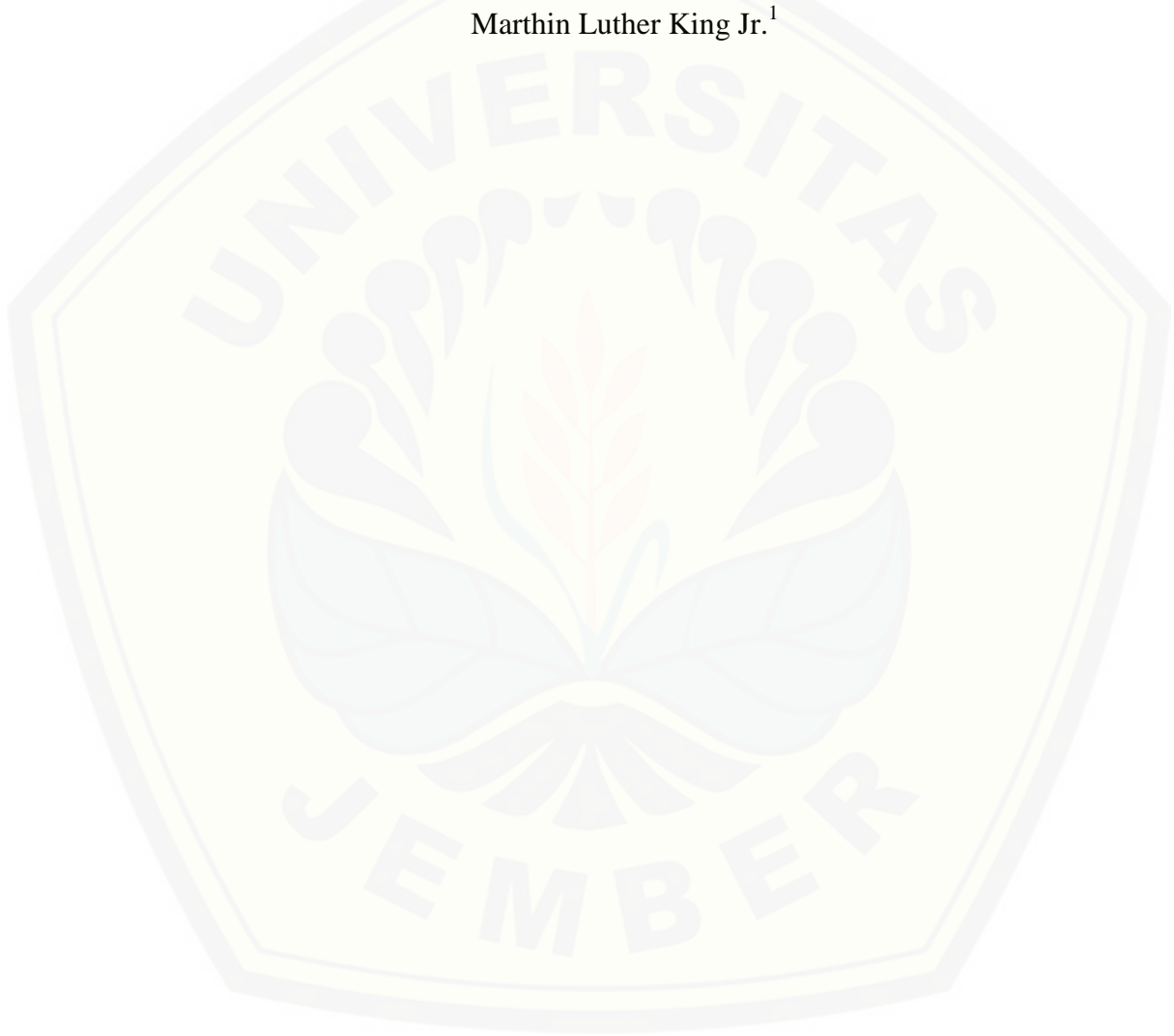
1. Almh. Ibunda Suhartini dan Ayahanda Sunarno yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Hubungan Internasional Jember.

MOTO

“...Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that. Nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity...

Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase.”

Marthin Luther King Jr.¹



¹ Kutipan ini merupakan hasil parafrase dari pidato Martin Luther King Jr. yang terkenal dengan sebutan *“The Lost Speech”* yang disampaikan pada 12 September 1962 di New York dalam rangka memperingati 100 tahun perayaan Proklamasi Emansipasi Abraham Lincoln. Rekaman dan teks diperoleh dari *“Lost Recording of Martin Luther King, Jr. Unearthed From 1962”* <http://mashable.com/2014/01/20/martin-luther-king-jr-speech/#2LEXftAp9kqF> [18 Januari 2016]

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deta Malatasya Andani

NIM : 110910101001

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “*Millennium Development Goals 1 (MDG1) Sebagai Alat Hegemoni Amerika Serikat Terhadap Brasil*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabhasahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juni 2016

Yang menyatakan,

Deta Malatasya Andani
NIM 110910101001

SKRIPSI

***MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS 1 (MDG1) SEBAGAI ALAT
HEGEMONI AMERIKA SERIKAT TERHADAP BRASIL***

Oleh
DETA MALATASYA ANDANI
NIM 110910101001

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Agung Purwanto, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Millennium Development Goals 1 (MDG1) Sebagai Alat Hegemoni Amerika Serikat Terhadap Brasil*” telah diuji dan disahkan pada:

hari :
tanggal :
waktu :
tempat : FISIP Universitas Jember

Tim Penguji
Ketua

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. Agung Purwanto, M.Si
196810221993031002

Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si
196105151988021001

Anggota I

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Millennium Development Goals 1 (MDG1) Sebagai Alat Hegemoni Amerika Serikat Terhadap Brasil; Deta Malatasya Andani, 110910101001; 2016; 156 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MDG1 yang dianggap sebagai suatu solusi ideal, diimplementasikan di Brasil untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kelaparan yang masih tinggi di negaranya. Terdapat dua kebijakan utama yang diterapkan Brasil terkait implementasi MDG1, yaitu pemberian subsidi bersyarat *Bolsa Família* dan keputusan Brasil untuk melakukan deregulasi kebijakan agrikultur. Subsidi bersyarat *Bolsa Família* yang berupa uang tunai diberikan kepada keluarga-keluarga miskin yang memenuhi syarat ketentuannya. Sementara itu deregulasi kebijakan agrikultur diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan potensi agrikultur Brasil sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Diterapkannya deregulasi agrikultur juga karena mayoritas penduduk miskin Brasil terdiri dari para petani. Dalam menerapkan *Bolsa Família* dan deregulasi agrikultur, pemerintah Brasil bergantung pada pemberian ODA, investasi, serta hutang luar negeri. ODA diperoleh Brasil dari negara donor OECD, yang mayoritas datang dari Amerika Serikat. Sementara itu hutang luar negeri Brasil berasal dari IFIs dan IADB.

Melalui penerapan dua kebijakan tersebut, Brasil berhasil menurunkan tingkat kemiskinan serta kelaparan di negaranya. Meskipun demikian masih terdapat beberapa permasalahan seperti inekualitas yang tinggi serta *food insecurity* di Brasil. Permasalahan yang masih terjadi di Brasil ini diduga karena dalam penerapan dua kebijakan terkait implementasi MDG1 tersebut, Brasil lebih menguntungkan Amerika Serikat sebagai negara dengan investasi tertinggi di Brasil. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hegemoni Amerika Serikat dibalik implementasi MDG1 di Brasil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian kualitatif ini, yaitu mengungkapkan adanya dimensi kekuasaan dalam implementasi MDG1 di

Brasil, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif, yaitu dengan menggunakan teori untuk menafsirkan data-data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Neo-Gramscian yang disampaikan oleh Robert Cox dan konsep kepatuhan nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MDG1 melalui penerapan *Bolsa Família* dan deregulasi kebijakan agrikultur memang lebih menguntungkan Amerika Serikat. Amerika Serikat memanfaatkan implementasi MDG1 untuk memastikan implementasi prinsip neoliberal di Brasil. Pembukaan pasar bebas terkait penerapan deregulasi agrikultur menyebabkan masuknya investasi dan MNC Amerika Serikat di Brasil yang menyebabkan dominasi Amerika Serikat di pasar Brasil. Dependensi Brasil terhadap hutang luar negeri dari IFIs dan IADB juga menguntungkan Amerika Serikat sebagai pemegang saham tertinggi di organisasi tersebut. Sementara itu Partai Buruh yang berkuasa di Brasil selama implementasi MDG1 hanya menggunakan *Bolsa Família* untuk mempertahankan rezimnya.

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “*MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS 1 (MDG1) SEBAGAI ALAT HEGEMONI AMERIKA SERIKAT TERHADAP BRASIL*”. Dalam tulisan ini, penulis berusaha untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong Brasil untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi yang berasal dari Suriah.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sepenuhnya penulis dapat bekerja sendiri. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, nasehat, bantuan dan pelayanan yang telah diberikan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M. Si., Ph. D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
3. Ibu Dra. Sri Yuniati, M. Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
4. Bapak Drs. Agung Purwanto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan segala kesabarannya telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, pengarahan, nasehat dan juga kritik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan segala kesabarannya telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, pengarahan, nasehat dan juga kritik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Segenap Dosen dan Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya Jurusan Ilmu

Hubungan Internasional dengan segala ilmu dan pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama belajar di jurusan ini;

7. Pimpinan dan staf perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
8. Teman-teman dekat penulis, Putri Larasati, Siti Rozalia, Fitra Rizky, dan Linda Purwati yang selalu siap menjadi teman diskusi, pemberi kritik, serta dukungan.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis sadar tanpa dukungan dari banyak pihak, penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi kemajuan penulis sendiri dan bagi semua pihak yang berkenan membacanya.

Jember, 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	9
1.2.1 Batasan Materi	9
1.2.2 Batasan Waktu	10
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Landasan Pemikiran	11
1.5.1 Hegemoni Neo-Gramscian.....	11
1.5.2 Kepatuhan Nasional	15
1.6 Argumen Utama	18
1.7 Metode Penelitian	19
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.7.2 Teknik Analisis Data.....	20
1.8 Sistematika Penulisan	21

BAB 2. HEGEMONI AMERIKA SERIKAT DAN KONDISI DALAM NEGERI BRASIL	23
2.1 Sejarah Hegemoni Amerika Serikat di Dunia Internasional	23
2.2 Dinamika Hubungan Asimetris dan Simetris Amerika Serikat – Amerika Latin	38
2.3 Dinamika Hubungan Bilateral Amerika Serikat Dengan Brasil	49
2.4 Kondisi Dalam Negeri Brasil.....	55
BAB 3. IMPLEMENTASI MDG1: <i>ERADICATING EXTREME POVERTY AND HUNGER</i> SEBAGAI SOLUSI MENGATASI KEMISKINAN DAN KELAPARAN ESKTRIM.....	69
3.1 Konstruksi MDG1 Untuk Mengatasi Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrim di Dunia	69
3.2 Implementasi MDG1: <i>Eradicating Extreme Poverty and Hunger</i> Untuk Menyelesaikan Permasalahan Kemiskinan	79
3.3 Implementasi MDG1 Untuk Mengatasi Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrim di Brasil	86
3.3.1. Deregulasi Kebijakan Agrikultur	90
3.3.2. <i>Programa Fome Zero (Zero Hunger Program)</i>	101
BAB 4. HEGEMONI AMERIKA SERIKAT DALAM IMPLEMENTASI MDG1: <i>ERADICATING EXTREME POVERTY And HUNGER</i> DI BRASIL	111
4.1. <i>Gap</i> Dalam Wacana dan Implementasi MDG1: <i>Eradicating Extreme Poverty and Hunger</i> di Brasil.....	111
4.2. Dampak Implementasi MDG1: <i>Eradicating Extreme Poverty and Hunger</i> di Brasil	127
4.2.1 Tingkat Inekualitas yang Tetap Tinggi	128
4.2.2 <i>Food Insecurity</i> yang Mengancam Masyarakat Brasil.....	132
4.2.3 Kerusakan Lingkungan Akibat Implementasi MDG1	137
4.2.4 Kerentanan Petani Brasil Akibat Pembukaan Pasar Bebas Di Brasil	140
4.3. Dominasi Amerika Serikat Dalam Implementasi MDG1: <i>Eradicating Extreme Poverty and Hunger</i> di Brasil.....	142
BAB 5. KESIMPULAN	154
DAFTAR PUSTAKA	156

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Batas Wilayah dalam Perjanjian Adam-Onis 1819.....	25
Gambar 2.2. Peta Wilayah Konfederasi Amerika Serikat.....	28
Gambar 2.3 <i>The Western Hemisphere</i>	39
Gambar 2.4 Kawasan <i>semi arid</i> di wilayah Utara dan Timur Laut Brasil.....	61
Gambar 2.5 Akses jalan menuju wilayah Utara dan Timur Laut Brasil	62
Gambar 2.6 <i>Favela</i> di São Paulo	63
Gambar 2.7 <i>Favela</i> di Rio de Janeiro.....	63
Gambar 2.8 Peta Topologi Brasil.....	65
Gambar 3.1 Bagan Program <i>Programa Fome Zero (Zero Hunger Program)</i>	102
Gambar 2.8 Peta Topologi Brasil.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Aliran FDI dari Amerika Serikat ke Brasil	54
Tabel 2.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Brasil dari 1990-2014	56
Tabel 2.3 Pertumbuhan GDP Brasil 2000 – 2014.....	57
Tabel 2.4 Aliran FDI ke Brasil.....	59
Tabel 2.5 Presentase Tingkat Kemiskinan di Brasil 1990-2015	60
Tabel 2.6 Tingkat Kelaparan di Brasil 1991-2014.....	67
Tabel 3.1 Presentase Lahan Pertanian Brasil Tahun 2000 – 2009.....	93
Tabel 3.2 Presentase Lahan Pertanian Brasil	93
Tabel 3.3 Produksi Agrikultur Brasil 2000 – 2013	97
Tabel 3.4 Nilai Keuntungan Produksi Agrikultur Brasil 2000 – 2013	98
Tabel 3.5 Peningkatan Nilai Ekspor 9 Produk Agrikultur Brasil 2000 – 2013	99
Tabel 3.6 Peningkatan Ekspor Brasil 2000-2014.....	100
Tabel 3.7 Keluarga Penerima <i>Bolsa Família</i> 2003 – 2015	105
Tabel 3.8 Tingkat Kemiskinan di Brasil Setelah Implementasi <i>Bolsa Família</i> 2003-2013	105
Tabel 3.9 Tingkat Buta Huruf Usia 5< Tahun di Brasil 2003 - 2011	106
Tabel 3.10 Tingkat Kematian Bayi 2003 – 2013 di Brasil	107
4.1 Inflasi Harga Kebutuhan Konsumen 2000 – 2013.....	120
Tabel 4.2 Distribusi Pendapatan di Brasil 2001 – 2013.....	129
Tabel 4.3 Impor Gandum Brasil 2003-2015	134

Tabel 4.4 Ekspor Jagung Brasil 2003-2014	136
Tabel 4.5 Deforestasi Hutan Amazon 2003-2015	138
Tabel 4.6 Penggunaan Pupuk dan Pestisida 2003-2013.....	139



DAFTAR GRAFIK

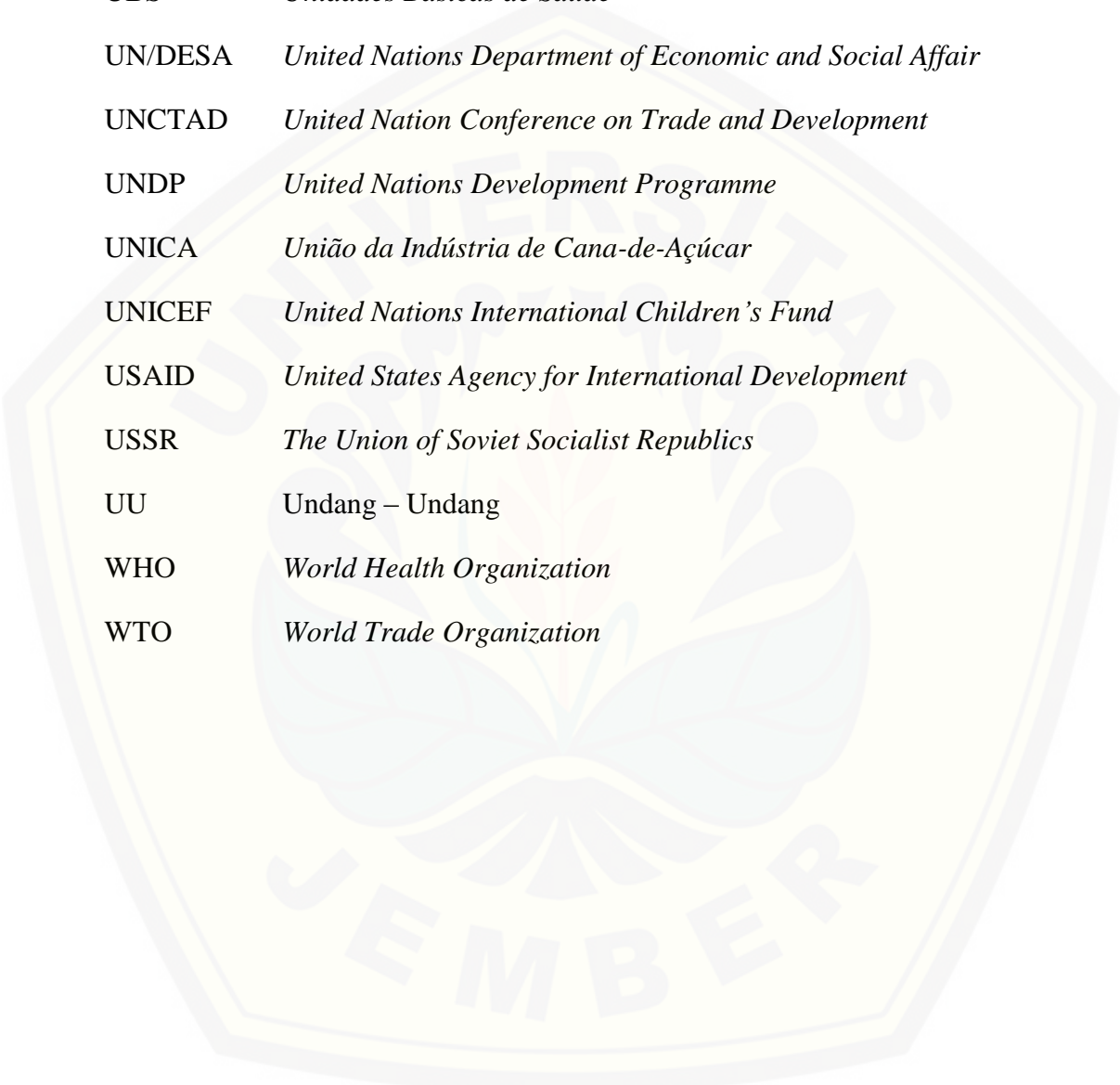
Grafik 2.1 Aliran FDI Amerika Serikat ke Brasil 2000-2014.....	54
Grafik 2.2 Pertumbuhan ekonomi Brasil 1990-2014	57
Grafik 2.3 Pertumbuhan GDP Brasil 2000 – 2014	58
Grafik 2.4 Aliran FDI ke Brasil 2001-2014	59
Grafik 3.1 Produksi Agrikultur Brasil 2000 - 2013	98
Grafik 3.2 Pertumbuhan Ekspor Brasil 2000-2014.....	100
Grafik 3.3 Tingkat Kemiskinan Brasil 2003 - 2015.....	106
Grafik 4.1 Penurunan ODA Anggota DAC	125
Grafik 4.2 Distribusi Pendapatan Brasil	129

DAFTAR SINGKATAN

ANZUS	<i>America-New Zealand-Australia</i>
APEC	<i>Asia-Pacific Economy Cooperation</i>
BRIC	<i>Brazil – Russia – India – China</i>
BSMP	<i>Brasil Sem Miséria Plan</i>
CAIXA	<i>Caixa Econômica Federal</i>
CCT	<i>Conditional Cash Transfer</i>
CDCA	<i>Certificates of Agribusiness Credit Rights</i>
CETO	<i>Central Treaty Organization</i>
CIA	<i>Central Intelligence Agency</i>
CRA	<i>Certificate of Agribusiness Receivables</i>
DAC	<i>Development Assistance Committee</i>
DHCP	<i>Dom Helder Camara Project</i>
EMBRAPA	<i>Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária</i>
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
FTAA	<i>Free Trade Area of Americas</i>
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
GATT	<i>General Agreement on Trade and Tariff</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
GMO	<i>Genetically Modified Organism</i>
GMR	<i>Global Monitoring Report</i>
HAM	<i>Hak Asasi Manusia</i>
IADB	<i>Inter-American Development Bank</i>
IBGE	<i>Instituto Brasileiro de Geografia</i>
ICBM	<i>Intercontinental Ballistic Missile</i>

IDGs	<i>International Development Goals</i>
IFAD	<i>International Fund for Agriculture Development</i>
IFIs	<i>International Financial Institutions</i>
IIF	<i>Integrated Implementation Framework</i>
ILO	<i>International Labour Organisation</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
INCRA	<i>Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária</i>
INOVAGRO	<i>Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária</i>
IRBM	<i>Intermediate Range Ballistic Missile</i>
IRIBA	<i>International Research Initiative on Brazil and Africa</i>
LCA	<i>Agribusiness Credit Bite</i>
LBB	<i>Liga Bangsa-Bangsa</i>
LRF	<i>Fiscal Responsibility Law</i>
LCD	<i>Least Developed Countries</i>
MAPA	<i>Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</i>
MDA	<i>Ministério Do Desenvolvimento Agrário</i>
MDGs	<i>Millennium Development Goals</i>
MDS	<i>Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome</i>
MNC	<i>Multinational Company</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MRBM	<i>Medium Range Ballistic Missile</i>
MST	<i>Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra</i>
NATO	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i>

NPT	<i>Nuclear Non-Proliferation Treaty</i>
OAS	<i>Organization of American States</i>
ODA	<i>Official Development Assistance</i>
OEC	<i>The Observatory of Economic Complexity</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OPEC	<i>Organization of Petroleum Exporting Countries</i>
PAA	<i>Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar</i>
PAE	<i>Projeto de Assentamento Agroextrativista</i>
PAF	<i>Projeto de Assentamento Florestal</i>
PAM	<i>Produção Agrícola Municipal</i>
PAs	<i>Projetos de Assentamentos</i>
PAT	<i>Programa de Alimentação do Trabalhador</i>
PBB	<i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PCA	<i>Programa Cupom Alimentação</i>
PFL	<i>Partido da Frente Liberal</i>
PNMPO	<i>Programa Nacional Microcrédito Produtivo Orientado</i>
PPP	<i>Purchasing Power Parity</i>
PRONAF	<i>Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar</i>
PRONATEC	<i>Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego</i>
PRSPs	<i>Poverty Reduction Strategy Papers</i>
PSDB	<i>Partido da Social Democracia Brasileira</i>
PT	<i>Partido dos Trabalhadores</i>
RTAA	<i>Reciprocal Trade Agreement Act</i>
SALT	<i>Strategic Arms Limitation Talks</i>
SAP	<i>Structural Adjustment Program</i>



SEATO	<i>South East Asian Treaty Organization</i>
SENARC	<i>Secretaria Nacional de Renda de Cidadania</i>
TIAA	<i>Teachers Insurance and Annuity Association</i>
UBS	<i>Unidades Básicas de Saúde</i>
UN/DESA	<i>United Nations Department of Economic and Social Affairs</i>
UNCTAD	<i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
UNICA	<i>União da Indústria de Cana-de-Açúcar</i>
UNICEF	<i>United Nations International Children's Fund</i>
USAID	<i>United States Agency for International Development</i>
USSR	<i>The Union of Soviet Socialist Republics</i>
UU	<i>Undang – Undang</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan dan *human deprivation* merupakan permasalahan yang masih belum dapat diselesaikan secara tuntas hingga saat ini. Permasalahan kemiskinan dan *human deprivation* yang ada di berbagai negara tersebut selalu memiliki keterkaitan dengan tingkat perekonomian di negara yang berkaitan. Oleh karena itu pembangunan dilakukan sebagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan *human deprivation* yang ada.

Pembangunan yang dilakukan awalnya merupakan pembangunan berbasis pertumbuhan atau *growth*. Tetapi pembangunan tersebut masih belum dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan *human deprivation* yang ada. Maka kemudian dirumuskan suatu jalan keluar yang baru untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan *human deprivation*, yaitu dengan melakukan pembangunan berbasis manusia. Akhkirnya pada tahun 2000 dirumuskan *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai kunci untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan *human deprivation* di dunia dengan melakukan pembangunan berbasis manusia atau *human development*.

MDGs merupakan hasil rumusan dari *Millennium Summit* yang dihadiri 149 pemimpin negara dan pemerintahan beserta pejabat-pejabat tinggi dari 40 negara (189 negara dari 199 negara anggota PBB).¹ MDGs terdiri dari 8 tujuan atau *goals* yang ingin dicapai sebagai cita-cita pembangunan milenium agar dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan *human deprivation* yang belum dapat diselesaikan dengan pembangunan berbasis *growth*. Setelah MDGs disetujui pada *Millennium Summit* tersebut, seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baik yang hadir ataupun yang tidak menghadiri pertemuan itu juga menyetujui bahwa MDGs merupakan kunci untuk mengatasi permasalahan

¹ PBB. Tanpa tahun. *Millennium Summit*. http://www.un.org/en/events/pastevents/millennium_summit.shtml [20 Desember 2014]

kemiskinan dan *human deprivation* yang ada di dunia. Dari 8 tujuan yang ditetapkan pada MDGs, tujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan termasuk pada tujuan yang pertama, yaitu pemberantasan kelaparan dan kemiskinan esktrim (*eradicating extreme poverty and hunger*).

Semenjak ditetapkan pada tahun 2000, pelaksanaan program MDGs khususnya pada upaya untuk mencapai target pada MDG1 telah menunjukkan progres yang sangat baik. Pada tahun 1990-an dunia mengalami permasalahan kemiskinan yang parah dengan hampir 36.4% penduduk dunia berada di bawah garis kemiskinan.² Namun dengan pelaksanaan MDGs dan MDG1 khususnya, jumlah penduduk miskin dunia berhasil dikurangi separuhnya dari jumlah pada tahun 1990 yaitu dari 1.923 milyar jiwa menjadi 1.011 milyar pada tahun 2011.³

Standar pengukuran angka kemiskinan itupun berhasil dinaikkan dari sebelumnya *Global Poverty Line* sebesar US\$ 1 dengan pertimbangan perhitungan Kesamaan Daya Beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP) pada tahun 1993⁴ menjadi US\$ 1.25 pada tahun 2005.⁵ Kematian anak-anak berhasil diturunkan dari 130 kematian per 1000 kelahiran setiap tahunnya hingga menjadi 88, angka harapan hidup warga dunia berhasil dinaikkan dari rata-rata 63 tahun menjadi 65 tahun dan lebih banyak penduduk negara berkembang mendapat akses terhadap air bersih dan akses terhadap sanitasi yang lebih baik.⁶

Sebagai kesepakatan bersama pada *Millennium Summit*, seluruh negara anggota PBB juga ikut terlibat dalam pelaksanaan berbagai program untuk mencapai tujuan MDG1 yang telah ditetapkan, termasuk Brasil. Brasil merupakan negara terbesar secara wilayah dan jumlah penduduk di wilayah Amerika Latin yaitu sebesar 8,514,877 m² dan jumlah penduduknya mencapai

² World Bank. 2014. *Poverty & Equity Data*. <http://povertydata.worldbank.org/poverty/home/> [19 Desember 2014]

³ *Ibid.*

⁴ Kesamaan Daya Beli (*Purchasing Power Parity* - PPP) adalah besarnya nilai mata uang suatu negara yang dibutuhkan untuk membeli jumlah barang dan jasa yang sama di pasar domestiknya dengan jumlah US\$ untuk membeli barang dan jasa di Amerika Serikat. Website Resmi PBB Divisi Statistik. 2014. <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx?IndicatorId=0&SeriesId=580> [19 Desember 2014]

⁵ World Bank. *Loc. Cit.*

⁶ United Millennium Project. 2006. *Goals*. <http://www.unmillenniumproject.org/goals/> [20 Desember 2014]

202.349.622 jiwa.⁷ Saat ini Brasil menempati posisi ke tujuh di dunia dengan *Gross Domestic Product* (GDP) sebesar US\$ 2.346.67 triliyun dan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 2.3%.⁸ Brasil juga berhasil mengurangi separuh dari jumlah penduduk miskin yang ada di negaranya dari tahun 1990, yaitu dari 17.9% menjadi 6.7% pada tahun 2014.⁹ Brasil juga menjadi negara yang mendominasi aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) di Amerika Latin, dengan aliran investasi asing yang semakin meningkat setiap tahunnya.¹⁰ Potensi alam Brasil yang begitu beragam juga berhasil menjadikan Brasil sebagai negara pengekspor produk agrikultural terbesar di dunia seperti kopi, jagung, gula, dan kedelai.

Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi yang kuat tersebut tidak dapat menghindarkan masyarakat Brasil dari *food insecurity*. Pada tahun 2009 tercatat 30% penduduk di Brasil (sekitar 66 juta jiwa) mengalami *food insecurity*, bahkan 12 juta jiwa dari jumlah tersebut mengalami kelaparan yang parah dan menyebabkan banyak korban meninggal.¹¹ Inekualitas di Brasil bahkan lebih buruk dari pada di tingkat global. 60% alokasi GDP Brasil menjadi alokasi bagi 20% golongan elit Brasil dan hanya 4% dari GDP Brasil yang dialokasikan pada 20% warga negara Brasil yang masih mengalami masalah kemiskinan dan kelaparan.¹² Bahkan 11.25 juta penduduk Brasil hidup di dalam lingkungan kumuh atau yang disebut *favela* yang ditandai dengan minimnya sanitasi dan angka kriminalitas yang tinggi. Hal ini menjadikan 65% kelas menengah di Brasil dihuni oleh penduduk dari *favela*.¹³

⁷ CIA. 2013. *Brazil*. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html> [2 Januari 2014]

⁸ World Bank. 2013. *World Development Indicators database*. Diakses dari <http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table> [2 Januari 2014]

⁹ Tanpa nama. *Brazil Headcount Ratio*. <http://www.indexmundi.com/facts/brazil/poverty-headcount-ratio> [20 Januari 2015]

¹⁰ Tanpa nama. 2015. *Brazil: Foreign Direct Investment*. <http://www.indexmundi.com/facts/brazil/foreign-direct-investment> [14 Februari 2015]

¹¹ OXFAM. 2010. *"Fighting Hunger in Brazil" Oxfam Case Studi*. Oxford: OXFAM pub.

¹² FAO. 2014. *Brazil: The hunger of the missed meal*. <http://www.fao.org/english/newsroom/news/2003/13320-en.html> [2 Januari 2014]

¹³ BBC. 2014. *Favela life: Rio's city within a city*. <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-27635554> [20 Februari 2015]

Berbagai permasalahan terkait dengan kemiskinan dan kelaparan tersebut pastinya harus diatasi oleh Brasil apabila Brasil ingin mencapai target dalam MDG1. Demi menwujudkan tujuan yang terdapat di dalam MDG1 dan juga mengatasi berbagai permasalahan inekualitas dan kelaparan, Brasil telah menetapkan beberapa kebijakan yang cukup efektif. Salah satu strategi yang cukup efektif dilakukan oleh Brasil dalam mengurangi angka kemiskinan dan angka kelaparan adalah kebijakan dalam hal pengelolaan lahan dan reformasi struktur ekonomi pertanian.¹⁴ Selain itu kebijakan lain yang ditempuh oleh Brasil adalah kebijakan *Programa Fome Zero (Zero Hunger Program)* yang ditetapkan sejak tahun 2003.¹⁵

Sektor pertanian di Brasil memang memiliki potensi yang cukup tinggi, hal ini mengingat wilayah Brasil yang begitu luas dengan tanah yang subur, iklim yang mendukung, ketersediaan air, serta sumber daya manusia yang melimpah. Karena alasan tersebut pemerintah Brasil menfokuskan pembangunan di bidang pertanian sebagai motor pembangunan ekonomi negaranya. Meskipun demikian kepemilikan lahan pertanian di Brasil masih sangat kompleks, tidak semua keluarga memiliki tanah yang dapat dimanfaatkan, bahkan lebih banyak keluarga yang tidak memiliki tanah di Brasil. Oleh karena itu melalui reformasi pengelolaan lahan, pemerintah Brasil berupaya menyediakan lahan-lahan bagi keluarga miskin yang sebelumnya tidak memiliki lahan untuk dimanfaatkan. Termasuk diantaranya adalah pengembangan wilayah *semi arid* sebagai lahan pertanian.¹⁶ Selain itu pemerintah Brasil juga melakukan stabilisasi makroekonomi dan liberalisasi perdagangan untuk mendukung sektor pertanian sebagai motor pertumbuhan ekonomi di Brasil.¹⁷

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari MDG1 yaitu untuk memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan, maka pemerintah Brasil

¹⁴ IFAD (*International Fund for Agricultural Development*). Tanpa tahun. *Rural poverty approaches, policies, & strategies in Brazil*. <http://www.ruralpovertyportal.org/country/approaches/tags/brazil> [14 Maret 2015]

¹⁵ FAO. *Loc. Cit.*

¹⁶ IFAD. *Loc. Cit.*

¹⁷ OECD. 2005. "Brazil Agriculture Policy Review" dalam *Highlights from OECD country Reviews*. Oktober 2005, vol 1, no 1.

memaksimalkan potensi dari sektor agrikultur ini menjadi pertanian berbasis ekspor dengan 31% produk hasil pertanian Brasil ditujukan untuk ekspor.¹⁸

Pertanian berbasis ekspor ini ditujukan untuk memperoleh devisa yang besar sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Brasil. Selain itu pertanian berbasis ekspor ini juga ditujukan untuk menarik investor asing agar mau berinvestasi di Brasil. Liberalisasi perdagangan yang telah diterapkan di Brasil merupakan bukti dari keseriusan pemerintah Brasil dalam menjalankan pertanian berbasis ekspor ini. Pemotongan *tariff*, pengurangan subsidi, dan juga penghilangan hambatan-hambatan *non-tariff* telah dilakukan pemerintah Brasil untuk melancarkan pelaksanaan pasar bebas sektor agrikultur di Brasil.

Pembangunan pada sektor agrikultur ini jelas telah membawa perubahan yang signifikan bagi Brasil. Data pada tahun 2004 menunjukkan bahwa pembangunan ini menghasilkan sekitar US\$ 183 milyar yang setara dengan 30% GDP di Brasil. Pembangunan sektor agrikultur yang dilakukan juga berhasil menyerap 35% tenaga kerja di Brasil. Selain itu sektor agrikultur juga mewakili 40% ekspor Brasil.¹⁹ Keberhasilan pembangunan sektor agrikultur ini juga menjadikan Brasil sebagai negara pengekspor produk-produk pertanian terbesar ketiga di dunia setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat. Keberhasilan pembangunan sektor pertanian ini juga menyebabkan stabilnya aliran investasi yang masuk ke Brasil. Brasil merupakan negara penerima investasi terbesar di wilayah Amerika Latin dan merupakan negara penerima investasi terbesar ketiga setelah Cina dan Malaysia pada sektor pertanian.²⁰

Programa Fome Zero (Zero Hunger Program) juga merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Brasil sejak tahun 2003 pada masa pemerintahan Presiden Lula da Silva untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim

¹⁸ Choicemagazine.org. 2006. *The Evolution of Agricultural Policies and Agribusiness Development in Brazil*. <http://www.choicemagazine.org/2006-2/tilling/2006-2-08.htm> [18 Maret 2015]

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Bernardo Mueller dan Charles Mueller. 2014. *The Economics of the Brazilian Model of Agricultural Development*. Manchester: International Research Initiative on Brazil and Africa (IRIBA)-School of Environment, Education and Development, The University of Manchester. Halaman 13

dan kelaparan.²¹ Program ini merupakan integrasi dari sekitar 50 inisiatif pemerintah yang saling berhubungan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim dan kelaparan yang ada di Brasil. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat miskin Brasil terhadap makanan dan mendukung produksi petani berskala kecil yang ada di Brasil. *Programa Fome Zero* yang telah dilaksanakan berhasil mengangkat 30 dari 40 juta warga Brazil dari kemiskinan.²² Tiga pilar utama dalam *Programa Fome Zero* ini adalah *Bolsa Família*, *Alimentação Escolar*, dan *Fortalecimento da Agricultura Familiar*.²³

1. *Bolsa Família* adalah subsidi bersyarat yang diberikan oleh pemerintah Brasil kepada suatu keluarga yang hidup dibawah 70 reais setiap bulannya. Subsidi yang diberikan pemerintah Brasil melalui *Bosa Familia* ini berupa pemberian uang tunai sebesar 250 reais (£65) dengan syarat anak-anak harus pergi ke sekolah dan divaksin.²⁴ Besarnya uang tunai yang diberikan kepada suatu keluarga tergantung pada jumlah anak yang ditanggung oleh keluarga tersebut.
2. *Alimentação Escolar (school meal)* adalah program pemberian bekal sekolah kepada 47 juta siswa miskin di Brasil setiap hari dengan bahan makanan yang dibeli langsung dari petani.
3. *Fortalecimento da Agricultura Familiar (strengthening family agriculture)*, yaitu suatu program berbasis pertanian yang bertujuan untuk memperkuat dan menstimulasi pertanian-pertanian berbasis kecil dan berbasis keluarga agar dapat meningkatkan jumlah ketersediaan pangan dan meningkatkan pemasukan masyarakat. Pilar yang ketiga ini terdiri dari kredit bersubsidi, pelatihan dan pembimbingan teknis, asuransi kepada para petani kecil, dan investasi pada para petani kecil ini.

²¹ FAO. *Loc. Cit.*

²² Inter Press Service News Agency (IPSN). 2013. *No Hunger in Brazil by 2015*. <http://www.ipsnews.net/2013/06/no-hunger-in-brazil-by-2015/> [20 Maret 2015]

²³ OXFAM. *Op. Cit.*

²⁴ The Guardian. 2013. *Brazil's Bolsa Família scheme marks a decade of pioneering poverty relief*. <http://www.theguardian.com/global-development/2013/dec/17/brazil-bolsa-familia-decade-anniversary-poverty-relief> [20 Maret 2015]

Pelaksanaan tiga pilar dari program *Programa Fome Zero* terbukti efektif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kelaparan yang ada di Brasil. Setelah ditetapkannya program ini, tingkat kemiskinan menurun dari 8.8% pada 2002 menjadi 3.6% pada 2012.²⁵

Bahkan setelah kepala pemerintahan Brasil berganti dari Presiden Lula da Silva menjadi Presiden Dilma Rousseff, program ini masih terus dilaksanakan meskipun dengan nama yang lain. Pada tahun 2011 Presiden Dilma Rousseff meluncurkan program yang bernama *Plano Brasil Sem Miséria (Brazil Without Poverty)* sebagai pengganti program *Programa Fome Zero* dengan *Bolsa Família* sebagai pilar kunci dari program tersebut. Penetapan upah minimum, formalisasi pekerja, kebijakan untuk mendukung keluarga pedesaan, serta proyek dana pensiun dan perumahan juga termasuk ke dalam program ini untuk tidak hanya mengatasi kemiskinan dan kelaparan tetapi juga inekualitas yang ada di Brasil.²⁶ Keputusan ini diambil oleh Prsiden Dilma Rousseff karena tujuannya yang ingin menjadikan Brasil sebagai negara berkembang pertama yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam MDGs.

Dilihat dari berbagai program yang telah dilakukan oleh Brasil, Brasil memang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan angka kelaparannya. Bahkan dengan penetapan berbagai program baru tersebut, Brasil memang memiliki potensi sebagai negara berkembang pertama yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam MDGs. Akan tetapi dibalik berbagai keberhasilan tersebut, masih terdapat masalah yang sebenarnya jauh lebih penting dari pada mengurangi angka kemiskinan dan keparan yang ada di Brasil. Dibalik keberhasilan reformasi pertanian yang telah dilakukan oleh pemerintah Brasil, justru banyak petani Brasil yang dirugikan.

Kebijakan reformasi pertanian dan juga keputusan pertanian berbasis ekspor yang menjadikan Brasil menetapkan liberalisasi perdagangan merupakan penyebab utama dari kerugian para petani di Brasil. Keputusan tersebut memang mendorong pertumbuhan ekonomi Brasil dan juga mampu menarik investor asing

²⁵ *Ibid.*

²⁶ BBC. 2011. *Brazil launches scheme to lift millions out of poverty.* <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-13626951> [24 Maret 2015]

agar berinvestasi di Brasil, akan tetapi banyaknya investor asing yang masuk ke Brasil justru mematikan kompetitor lokal dan perusahaan-perusahaan kecil yang ada di Brasil. Terbukanya pasar Brasil menjadikan banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang bebas berinvestasi di Brasil. Bahkan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki pengaruh besar terhadap pasar produk pertanian di Brasil didominasi oleh berbagai *multinational company* (MNC) asing. Delapan dari sepuluh perusahaan besar yang mengelola hasil pertanian yang ada di Brasil merupakan MNC asing. Bukan hanya itu 39% saham pemasaran hasil-hasil produk pertanian Brasil dikuasai oleh tiga retailer MNC asing yaitu Casino, Carrefour, dan Wal-Mart.²⁷

Keputusan pertanian berbasis ekspor yang ditetapkan pemerintah Brasil juga merupakan sumber dari *food insecurity* yang dialami oleh warga Brasil itu sendiri. Produk unggulan dari Brasil adalah kedelai dan jagung, oleh karena itu sebagian besar lahan pertanian dialokasikan untuk menanam dua tanaman tersebut yang pada akhirnya sebagian besar akan diekspor ke Amerika Serikat. Sementara kebutuhan dalam negeri Brasil belum terpenuhi, Cargill sebagai perusahaan yang mengontrol pasar jagung di Brasil mengekspor 2 juta ton jagung ke Amerika Serikat.²⁸ Bentuk dari dominasi asing atas kebijakan pertanian yang ada di Brasil bukan hanya itu saja. Bahkan untuk biji, pupuk, harga, dan pasar semua harus tergantung pada asing.

Berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah Brasil tersebut memang menunjukkan pengurangan tingkat kemiskinan secara nyata. Akan tetapi, berbagai program tersebut masih belum dapat menyelesaikan permasalahan sesungguhnya yang ada di Brasil. Program-program ini hanya dapat membuat masyarakat Brasil bertahan dari kondisi kemiskinan yang dialaminya, tetapi tidak mampu melepaskan masyarakat Brasil dari kemiskinan itu sendiri. Program-program ini bahkan mengakibatkan adanya dependensi dari masyarakat Brasil terhadap uang tunai yang diberikan oleh pemerintah untuk melanjutkan kehidupan mereka. Pada kenyataannya, masyarakat Brasil masih tidak dapat terlepas dari kondisi miskin

²⁷ Choicemagazine.org. *Loc. Cit.*

²⁸ Friend of the MST. 2013. *The Dilemma of Agrarian Reform in Brazil's Agribusiness*. <http://www.mstbrazil.org/news/dilemma-agrarian-reform-brazils-agribusiness> [24 Maret 2015]

yang dialami. Adapun statistik yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan di Brasil itu merupakan pencapaian terhadap standar ukuran yang ditentukan oleh PBB dan juga pemerintah Brasil demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam MDGs, bukan standar sesungguhnya untuk membebaskan masyarakat Brasil dari kemiskinan dan kelaparan.

Adanya distorsi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam MDGs tersebut terdapat suatu hegemoni dari suatu pihak tertentu. Hal ini dapat dilihat dari upaya Brasil dalam mencapai tujuan pertama yang ditetapkan dalam MDGs yaitu menanggulangi kemiskinan ekstrim dan kelaparan justru membawa banyak permasalahan baru di dalam negaranya. Oleh karena itu penelitian ini berupaya menunjukkan bentuk hegemoni asing dalam upaya pencapaian tujuan MDGs yang ada di Brasil. Maka dari itu penelitian ini mengambil judul: *Millennium Development Goals 1 (MDG1) sebagai Hegemoni Amerika Serikat Terhadap Brasil*.

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan merupakan suatu hal yang penting di dalam suatu penelitian ilmiah karena dengan adanya batasan yang diberikan membuat penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus dan terarah. Ruang lingkup dalam suatu penelitian juga dapat membentuk (*shape*) analisis dan hasil dari penelitian yang akan dilakukan secara mendalam.²⁹ Ruang lingkup pembahasan dapat dispesifikasi menjadi batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi dibutuhkan dalam suatu penelitian ilmiah untuk memberikan batasan pada materi-materi terkait dengan permasalahan yang akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis untuk ditemukan kesimpulannya. Berhubungan dengan penelitian ini, materi yang akan dikumpulkan terbatas pada interaksi antara Amerika Serikat dan Brasil hingga penyusunan program MDGs dan juga pada implementasi program

²⁹ Audie Klotz dan Deepa Prakash. 2008. *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide*. New York: Palgrave Macmillan. Halaman 20.

MDGs yang pertama (MDG1: *Eradicating Extreme Poverty and Hunger*) yang dilakukan di Brasil.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu dalam suatu penelitian dapat membantu fokus penelitian yang akan dilakukan agar dapat mengumpulkan data kredibel yang berkaitan dengan permasalahan. Batasan waktu pada penelitian ini dimulai dari tahun 2000 yaitu ketika MDGs pertama kali ditetapkan oleh PBB hingga tahun 2015 yaitu ketika batas akhir untuk mencapai tujuan MDGs, termasuk tujuan yang pertama.

1.3 Rumusan Masalah

Suatu penelitian diawali dari adanya suatu pertanyaan yang timbul. Penegasan masalah ini sekaligus menggambarkan fokus arah penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu perumusan masalah merupakan suatu hal yang fundamental dalam menentukan fokus dan arah dari penelitian yang akan dilakukan. Berhubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana bentuk hegemoni Amerika Serikat terhadap Brasil yang terdapat pada *Millennium Development Goal 1 (MDG1)*?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, tujuan yang ingin dicapai harus sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, berdasarkan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah mengungkapkan berbagai bentuk dimensi kekuasaan yang terdapat dalam implementasi *Millennium Development Goals (MDG1)* di Brasil yang lebih menguntungkan Amerika Serikat.

1.5 Landasan Pemikiran

Landasan pemikiran ditetapkan di dalam suatu penelitian guna membantu proses analisis dari data-data yang berhasil dikumpulkan untuk membantu menjawab permasalahan. Landasan pemikiran yang digunakan dapat berupa teori-teori ataupun konsep-konsep. *American Heritage Dictionary* mendefinisikan teori sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang dapat diterapkan secara relatif pada berbagai situasi khususnya terdiri dari sebuah sistem asumsi, prinsip-prinsip yang diterima, dan peraturan yang berguna untuk menganalisis, memprediksi, atau menjelaskan sifat atau tingkah laku dari suatu fenomena tertentu.³⁰

Sementara itu konsep dapat didefinisikan sebagai abstraksi atau ide umum dari suatu fenomena tertentu.³¹ Konsep-konsep dalam suatu kerangka pemikiran dapat menunjukkan atau memuat suatu abstraksi teori yang kemudian dapat membantu menganalisis fenomena yang ada.³² Pada penelitian ini terdapat satu teori dan satu konsep yang digunakan, yaitu teori hegemoni *Neo-Gramscian* terutama yang dikembangkan oleh Robert Cox dan konsep kepatuhan nasional suatu negara terhadap suatu lembaga internasional.

1.5.1 Hegemoni Neo-Gramscian

Konsep hegemoni pertama kali dicetuskan oleh Antonio Gramsci pada tahun 1930an, yang secara mudah dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana terdapat pihak yang memerintah atau pihak yang memiliki kekuasaan tanpa menggunakan paksaan untuk mendapatkannya.³³ Atau hegemoni dapat didefinisikan sebagai suatu persetujuan terhadap ide-ide tertentu dan didukung

³⁰ Detlef. F. Sprinz dan Yael Wolinsky-Nahmias. 2004. *Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relation*. The University of Michigan Press. Halaman 4

³¹ Tanpa Nama. 2015. *Concept*. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/concept> [6 Januari 2015]

³² Robert K. Yin. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press. Halaman 93

³³ Robert W. Cox. 2004. "Beyond Empire and Terror: Critical Reflections on the Political Economy of World Order" dalam *New Political Economy*, Vol. 9, No, 3, September 2004. Hal 311.

oleh sumber daya material dan lembaga.³⁴ Meskipun demikian konsep hegemoni yang dicetuskan oleh Gramsci ini masih berfokus pada interaksi antara negara dengan *civil society* yang ada di dalam negara tersebut serta antara politik dan ideologi dengan produksi. Gramsci masih belum mencetuskan mengenai penerapan hegemoni pada level internasional atau dengan tatanan dunia (*world order*). Oleh karena itu hegemoni yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsep hegemoni Robert Cox yang telah mengembangkan teori hegemoni Gramsci pada level internasional dan tatanan dunia (*world order*).

Menurut Gramsci hegemoni dapat muncul jika terdapat suatu kekuatan sosial tertentu yang mendominasi interaksi dalam suatu negara. Kekuatan sosial yang dominan tersebut tidak selalu pihak yang memerintah, tetapi kekuatan sosial dominan tersebut dapat menciptakan model-model serta berbagai aturan bertingkah laku dalam negara.³⁵ Kekuatan sosial yang dominan tersebut tidak membutuhkan paksaan untuk mempertahankan dominasinya, karena hegemoni sudah cukup untuk menjamin kepatuhan dari kelas sosial lain dalam negara tersebut.

Mengacu pada teori hegemoni yang dicetuskan oleh Gramsci, Cox menyatakan bahwa negara merupakan entitas dasar dalam hubungan internasional dan negara merupakan tempat dimana terbentuknya kekuatan-kekuatan sosial yang dapat menciptakan hegemoni. Oleh karena itu kajian hegemoni *neo-Gramscian* berpusat pada analisis interaksi dari kekuatan sosial (*social forces*), negara, dan tatanan dunia (*world order*).³⁶ Kaitannya dengan level internasional, kekuatan-kekuatan sosial dapat diwujudkan dalam bentuk organisasi internasional.

Menurut Cox, untuk menjadi negara hegemon, maka suatu negara harus mengkondisikan suatu tatanan dunia yang secara konseptual diterima oleh mayoritas

³⁴ Andreas Bieler dan Adam David Morton. 2003. *Theoretical and Methodological Challenges of neo-Gramscian Perspective in International Political Economy*. http://www.internationalgramscisociety.org/resources/online_articles/articles/bieler_morton.shtml [7 Januari 2015]

³⁵ Robert W. Cox. 1993. "Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method" dalam *Millennium: Journal of International Studies* June 2983 Vol 12, No. 2 162-175. Hal. 164

³⁶ Scott Burchill dan Andrew Linklater. 1996. *Theories of International Relations*. New York: St. Martin Press. Halaman 133

(seluruh) negara, dan bukan suatu tatanan yang mengeksploitasi negara lain secara langsung. Negara hegemon dalam hubungan internasional adalah negara-negara yang telah mengalami revolusi ekonomi dan sosial serta berhasil mengatasi berbagai konsekuensi yang diakibatkannya. Negara yang telah mengalami revolusi tersebut akan memiliki kondisi yang lebih baik dari pada negara-negara lain yang belum mengalami revolusi. Negara-negara lain yang melihat keberhasilan revolusi tersebut akan mencoba mengikuti model pembangunan yang dilakukan oleh negara yang berhasil tersebut.

Negara-negara lain yang mencoba mencontoh model pembangunan tersebut hanya akan menjadi negara *periphery* dan mengalami revolusi pasif.³⁷ Dampak dari revolusi pasif ini adalah dependensi terhadap negara dominan. Hal ini karena negara *periphery* telah dimasuki dan dicampuri oleh kekuatan eksternal dari negara dominan. Oleh karena itu hegemoni global merupakan ekspansi dari hegemoni internal (nasional) dari suatu kekuatan dominan dalam suatu negara.

Hegemoni global bukan hanya suatu tatanan antar negara, melainkan suatu tatanan dimana terdapat suatu model produksi dominan yang dapat memasuki seluruh negara dan dapat terhubung dengan berbagai model produksi negara *periphery* yang telah menjadi negara subordinat. Hegemoni global ini tidak hanya mempengaruhi struktur ekonomi di dunia, melainkan juga struktur politik dan juga struktur sosial. Lebih lanjut, hegemoni global ini juga diwujudkan dalam norma-norma universal, organisasi-organisasi internasional, serta mekanisme-mekanisme yang berlaku dalam hubungan internasional.

Salah satu alat yang digunakan untuk menyalurkan hegemoni global adalah organisasi internasional. Gramsci menjelaskan bahwa:

“Indeed, international Organization functions as the process through which the institutions of hegemony and its ideology are developed. Among the

³⁷ Gramsci menjelaskan revolusi pasif ini dapat terjadi pada suatu masyarakat yang ingin menerapkan mode pembangunan yang sama seperti negara dominan yang telah berhasil menjalankan revolusi ekonomi dan perubahan sosial, tetapi tanpa menggantikan tatanan lama yang telah berlaku di dalam negaranya. Kondisi ini akan menciptakan *stemate* antara kekuatan dominan dari tatanan baru dan kekuatan dominan tradisional dari tatanan yang sebelumnya berlaku. Lebih lanjut pelajari Robert W. Cox. 1993. “Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method” dalam *Millennium: Journal of International Studies* June 2983 Vol 12, No. 2 162-175.

features of international Organization which express its hegemonic role are the following: (1) they embody the rules which facilitate the expansion of hegemonic world orders; (2) they are themselves the product of the hegemonic world order; (3) they ideologically legitimate the norms of the world order; (4) they co-opt the elites from peripheral countries and (5) they absorb counter hegemonic ideas.”³⁸

Organisasi-organisasi internasional yang ada dalam hubungan internasional umumnya merupakan institusi yang dibentuk oleh negara dominan untuk mempromosikan dan memfasilitasi ekspansi ekonomi dari model produksi dominan yang dibangun oleh negara hegemon dalam tatanan dunia. Organisasi-organisasi internasional ini memainkan peran penting dalam keberlangsungan hegemoni global karena melalui serangkaian prinsip-prinsip universal yang diusung oleh organisasi tersebut, organisasi ini menjamin ketaatan dari negara-negara lainnya. Organisasi internasional ini juga berfungsi sebagai alat yang ‘menerima’ serta ‘mentumpulkan’ berbagai ide *counter-hegemony* yang mungkin timbul.

Dominasi terhadap negara lain juga diperoleh negara hegemon melalui kepatuhan elit-elit negara lain baik elit dari sektor publik ataupun elit privat.³⁹ Perusahaan-perusahaan transnasional negara hegemon juga dapat bertindak sebagai alat penjamin kelangsungan hegemoni global yang dapat mempengaruhi kebijakan domestik dari negara lain. Media juga ikut berperan dalam mempertahankan dominasi negara hegemon karena media membantu menjustifikasi tindakan negara hegemon terhadap negara lain. Media juga ikut berperan dalam mengkonstruksi norma serta nilai yang ditetapkan oleh negara hegemon untuk dilaksanakan dalam tatanan dunia.

Berbagai dukungan baik dari organisasi internasional maupun berbagai nilai dan norma hasil konstruksi media internasional akan memberikan *previlage* dan kekuatan yang lebih besar pada negara hegemon dalam bertindak. Norma dan nilai dari berbagai kekuatan sosial dalam hubungan internasional tersebut akan memberikan dukungan terhadap setiap gagasan atau wacana yang dicetuskan oleh

³⁸ Robert W. Cox. 1993. *Op.cit.* Halaman 172

³⁹ Robert Cox. 2004. *Op. Cit.* Halaman 309.

negara hegemon untuk dilaksanakan.⁴⁰ Dukungan-dukungan tersebut menjadikan negara lain bertindak sesuai dengan keinginan negara hegemon. Pada saat yang sama tatanan dunia mensekritisasi berbagai wacana dan gagasan negara hegemon sehingga mampu mempertahankan dominasinya.

Berdasarkan dengan konsep hegemoni yang dicetuskan oleh Cox, maka negara-negara yang dapat menjadi negara hegemon adalah negara-negara yang telah mengalami revolusi industri pada abad 19an, yang termasuk di dalamnya adalah Amerika Serikat. Terutama dengan keluarnya Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara dominan pasca Perang Dingin, Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai pemimpin hegemoni global. Amerika Serikat juga memegang pengaruh yang besar di berbagai organisasi internasional yang berpengaruh dalam struktur internasional, seperti IMF dan Bank Dunia. Sehingga hal tersebut menyebabkan Amerika Serikat dapat mempengaruhi isu-isu serta nilai-nilai yang diberlakukan dalam struktur internasional.

Berbagai keberhasilan revolusi, baik ekonomi dan sosial di Amerika Serikat juga menjadikan Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang dijadikan contoh model revolusi di dunia. Model pembangunan yang dilakukan di Brasil juga merupakan model pembangunan yang mencontoh model pembangunan Amerika Serikat. Percontohan model pembangunan tersebut menjadikan hubungan Amerika Serikat dengan Brasil seperti hubungan negara *core* dan negara *periphery* dimana Brasil sebagai negara *periphery* banyak bergantung pada Amerika Serikat sebagai negara *core*.

1.5.2 Kepatuhan Nasional

Dalam dunia internasional yang interdependen saat ini, penyelesaian berbagai isu serta permasalahan banyak dilakukan melalui berbagai perjanjian internasional, negosiasi, maupun melalui keputusan dalam organisasi internasional (lebih lanjut akan disebut sebagai kesepakatan internasional). Oleh karena itu, banyak penyelesaian masalah yang bergantung pada kepatuhan

⁴⁰ Michel Foucault. 2005. *The Order of Things: An archaeology of the human sciences*. London: Routledge. Halaman 332.

negara terhadap kesepakatan internasional. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan suatu negara tidak dapat diukur secara empiris sehingga sulit untuk menentukannya. Selain itu suatu negara tidak dapat mutlak mematuhi suatu keputusan internasional, melainkan bekerja pada level ‘yang dapat diterima’ di dalam keputusan tersebut.⁴¹

Pada umumnya tidak ada alat yang dapat memaksa suatu negara untuk patuh pada suatu kesepakatan internasional (terdapat beberapa pengecualian seperti Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Internasional).⁴² Meskipun demikian, suatu negara akan sedikit demi sedikit mengubah tingkah lakunya agar sesuai dengan kesepakatan internasional yang diikuti. Abram Chayes menyebutkan bahwa dasar kepatuhan suatu negara merupakan asumsi-asumsi yang berdasarkan pada beberapa pertimbangan tertentu. Dalam memahami asumsi dasar yang menentukan kepatuhan suatu negara, yang diperhatikan bukanlah nilai benar atau salahnya, melainkan seberapa berguna asumsi tersebut untuk menjelaskan kepatuhan tersebut. Tindakan ketidakpatuhan suatu negara terhadap kesepakatan internasional yang telah disepakati juga tidak secara otomatis menjadikan negara tersebut melanggarnya.

Beberapa asumsi yang dapat digunakan untuk menjelaskan tindak kepatuhan suatu negara adalah:

1. Efisiensi. Pertimbangan efisiensi dalam kesepakatan internasional tidak hanya terbatas pada pertimbangan untung-rugi secara ekonomi saja, tetapi juga mengenai pertimbangan keberlangsungan pelaksanaan keputusan tersebut dalam negara, karena kepatuhan merupakan harapan alami dari suatu keputusan.
2. Kepentingan. Suatu negara tidak akan mengikat dirinya dengan kesepakatan yang tidak menarik kepentingannya. Hal ini juga terkait dengan perumusan kesepakatan tersebut yang pada suatu titik tertentu

⁴¹ Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes. 1993. “On Compliance” dalam *International Organization* 47, 2, Spring 1993. World Peace Foundation dan Massachusetts Institute and Technology. Halaman 176.

⁴² J. Samuel Barkin. 2006. *International Organization: Theories and Institutions*. New York: Palgrave Macmillan. Halaman 5

akan berusaha untuk mengakomodasi kepentingan negara-negara yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu kesepakatan internasional merupakan bentuk tawar-menawar di dalam struktur internasional yang berlaku. Jika keputusan tersebut dirundingkan dengan baik, masuk akal, komprehensif, serta dengan praktek-praktek yang menguntungkan, maka kepatuhan merupakan suatu hal yang wajar.

3. Norma. Norma fundamental dari penyusunan kesepakatan internasional adalah dibuat untuk dipatuhi. Kesepakatan internasional yang dicetuskan oleh organisasi internasional resmi dapat meningkatkan kepatuhan negara.

Meskipun organisasi internasional tidak dapat memaksa anggotanya untuk mematuhi peraturan atau kesepakatan yang telah dibuat, berbagai kemampuan yang dimiliki oleh organisasi internasional yang telah disebutkan dapat mempengaruhi negara-negara anggotanya agar patuh terhadap peraturan atau kesepakatan yang telah dibuat. Berbagai studi yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa suatu negara yang tergabung dalam suatu organisasi internasional juga akan cenderung lebih patuh dan bekerjasama terhadap peraturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Haas, Levi, dan Keohane yang menghipotesiskan bahwa lembaga internasional meningkatkan kerjasama negara-negara anggotanya dalam patuh terhadap peraturan karena organisasi-organisasi internasional tersebut meningkatkan kepedulian terhadap isu yang diangkat.⁴³

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kepatuhan berbagai negara, termasuk Brasil untuk mengimplementasikan MDG1 sebagai solusi untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim merupakan suatu yang wajar. Fakta bahwa MDG1 dikeluarkan oleh PBB dan didukung oleh IMF dan Bank Dunia menjadikan kepatuhan terhadap MDG1 lebih tinggi. Selain itu MDG1 juga merupakan solusi untuk memberantas kemiskinan yang dibutuhkan oleh berbagai negara berkembang di dunia, oleh karena itu maka jika Brasil juga mematuhi

⁴³ Walter Carlnaes, Thomas Risse, dan beth A. Simmons. 2013. *Handbook Hubungan Internasional* (seri terjemahan). Bandung: Nusa Media. Halaman 409. Lihat studi Duffield, Martin, Wallander, dan Rittberger.

MDG1 dan mengimplementasikan MDG1 maka tindakan Brasil juga merupakan tindakan yang wajar.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama di dalam suatu penelitian merupakan hasil pemikiran dengan berdasarkan pada kerangka yang telah ditetapkan. Oleh karena itu mengacu pada konsep hegemoni dan kepatuhan nasional yang telah dijelaskan, argumen utama pada penelitian ini adalah bahwa berbagai program yang dilakukan di Brasil sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan MDGs khususnya pada program pertama, seperti kebijakan dalam hal pengelolaan lahan dan reformasi struktur ekonomi pertanian dan juga kebijakan *Programa Fome Zero (Zero Hunger Program)* merupakan suatu bentuk hegemoni dari negara yang mampu mendominasi tatanan dunia dan juga PBB sebagai organisasi yang menghasilkan MDGs, yaitu Amerika Serikat. Pada pelaksanaannya, berbagai program yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut lebih menguntungkan Amerika Serikat dari pada menguntungkan Brasil.

Dominasi Amerika Serikat atas tatanan dunia mengakibatkan Amerika Serikat dapat menentukan standar parameter ekonomi yang digunakan sebagai ukuran untuk mengukur keberhasilan pemecahan terhadap masalah kemiskinan dan *human deprivation*. Melalui tatanan dunia dan rezim internasional yang berlaku, Amerika Serikat menciptakan parameter ekonomi tersebut menjadi nilai universal ukuran keberhasilan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Brasil pada lain pihak, merupakan pihak yang belum mampu mencapai pembangunan dengan parameter ekonomi yang telah ditetapkan, maka dari itu Brasil terdorong untuk mencapai standar yang telah ditetapkan Amerika Serikat tersebut. Sebagai negara anggota PBB, Brasil memiliki dorongan moral untuk mematuhi kesepakatan yang telah ditetapkan oleh PBB. Terlebih lagi Brasil merupakan salah satu negara berkembang yang ‘diperhatikan’ oleh PBB melalui berbagai bantuan yang diberikan oleh PBB. Maka dari itu, Brasil semakin terdorong untuk mematuhi ketetapan PBB dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam MDGs.

1.7 Metode Penelitian

Metodologi dapat berarti struktur yang disusun secara sistematis atau cara-cara yang dikodekan untuk menguji suatu teori. Pemilihan metode dalam suatu penelitian dapat berpengaruh terhadap hasil dari penelitian tersebut, karena metode penelitian ini yang akhirnya dapat menunjukkan kebenaran dari argumen utama yang disusun dengan mengacu pada kerangka berfikir yang telah ditetapkan. Argumen-argumen yang tersusun secara teoritis harus dilengkapi dengan metode yang sistematis untuk melindungi adanya bias dalam penelitian tersebut. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus.

Keuntungan dari penggunaan metode penelitian studi kasus adalah dapat mengidentifikasi argumen serta data-data secara mendalam ataupun menemukan argumen baru yang sebelumnya tidak ada. Dengan menggunakan metode studi kasus, objek yang diteliti dapat lebih fokus dan khusus, meskipun hasil yang diperoleh tidak dapat digeneralisasikan karena objek yang diteliti eksklusif pada suatu objek khusus. Selain itu keuntungan dengan menggunakan metode penelitian studi kasus adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi hipotesis atau argumen utama baru baik dengan deduksi, induksi, ataupun kombinasi keduanya.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan dasar dari suatu penelitian. Hasil penelitian yang valid, diperoleh apabila data-data yang dikumpulkan kredibel. Pada penelitian kualitatif terdapat empat metode pengumpulan data yang dapat digunakan, yaitu: (1) Interview; (2) Observasi; (3) Mengumpulkan dan memeriksa; (4) Merasakan.⁴⁴ Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepastakaan atau *library research*. Pengumpulan data tersebut termasuk ke dalam yang mengumpulkan dan memeriksa data, yaitu mengumpulkan dan memeriksa data-data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari

⁴⁴ Detlef. F. Sprinz dan Yael Wolinsky-Nahmias. Halaman 19

narasumber melainkan diperoleh dari media. Penggunaan data sekunder pada penelitian ini dikarenakan oleh ketidakmampuan peneliti untuk memperoleh data primer secara langsung ke Brasil. Oleh karena itu peneliti melakukan interpretasi dari pernyataan aktor-aktor yang terlibat. Media yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah dari buku, jurnal akademis, surat kabar, majalah, ataupun portal media massa elektronik. Data-data yang dikumpulkan pada penelitian ini berasal dari berbagai sumber, yaitu:

1. Perpustakaan Universitas Jember
2. Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Buku-buku Koleksi Pribadi
4. Jurnal Ilmiah, Artikel, Berita, dan dokumen publikasi lainnya
5. Internet

1.7.2 Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka yang dilakukan selanjutnya pada suatu penelitian adalah melakukan analisis data. Data-data yang dikumpulkan umumnya merupakan rangkain fenomena dan masih belum mampu digunakan untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Robert K. Yin menyatakan bahwa data-data tersebut “*Do not speak for themselves*”. Maka dari itu diperlukan penjelasan dari peneliti agar data-data tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Pada penelitian kualitatif analisis yang dilakukan tergantung pada interpretasi peneliti, hal ini karena peneliti merupakan pelaku dalam penelitian tersebut yang terlibat dalam penelitian. Oleh sebab itu, maka nilai-nilai, serta norma yang ada pada peneliti akan mempengaruhi analisis terhadap data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dapat menyajikan berbagai variasi tingkatan detail dari suatu penelitian, yang mana dapat membantu pembaca untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam dari fenomena yang sedang diteliti.⁴⁵ Sementara itu metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

⁴⁵ *Ibid.* Halaman 213

deduktif. Metode deduktif digunakan karena untuk mendapatkan pemahaman atau kesimpulan khusus terhadap suatu studi kasus tertentu dari suatu generalisasi atau suatu teori yang ada.

1.8 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini terdapat lima bagian yang masing-masing terdiri dari argumen-argumen untuk mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang akan dijelaskan. Lima bagian pada penelitian ini adalah:

BAB 1: Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Argumen Utama, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB 2: Sejarah Hegemoni Amerika Serikat dan Dinamika Brasil

Pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah berkembangnya pengaruh Amerika Serikat di dunia hingga dapat menjadi hegemon dunia internasional. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai hubungan Amerika Serikat dengan Amerika Latin dan juga dengan Brasil. Selain itu pada bab ini juga akan dibahas mengenai kondisi dalam negeri Brasil, baik kondisi ekonomi, sosial, dan juga politik.

BAB 3: Implementasi MDG1: *Eradicating Extreme Poverty and Hunger* di Brasil

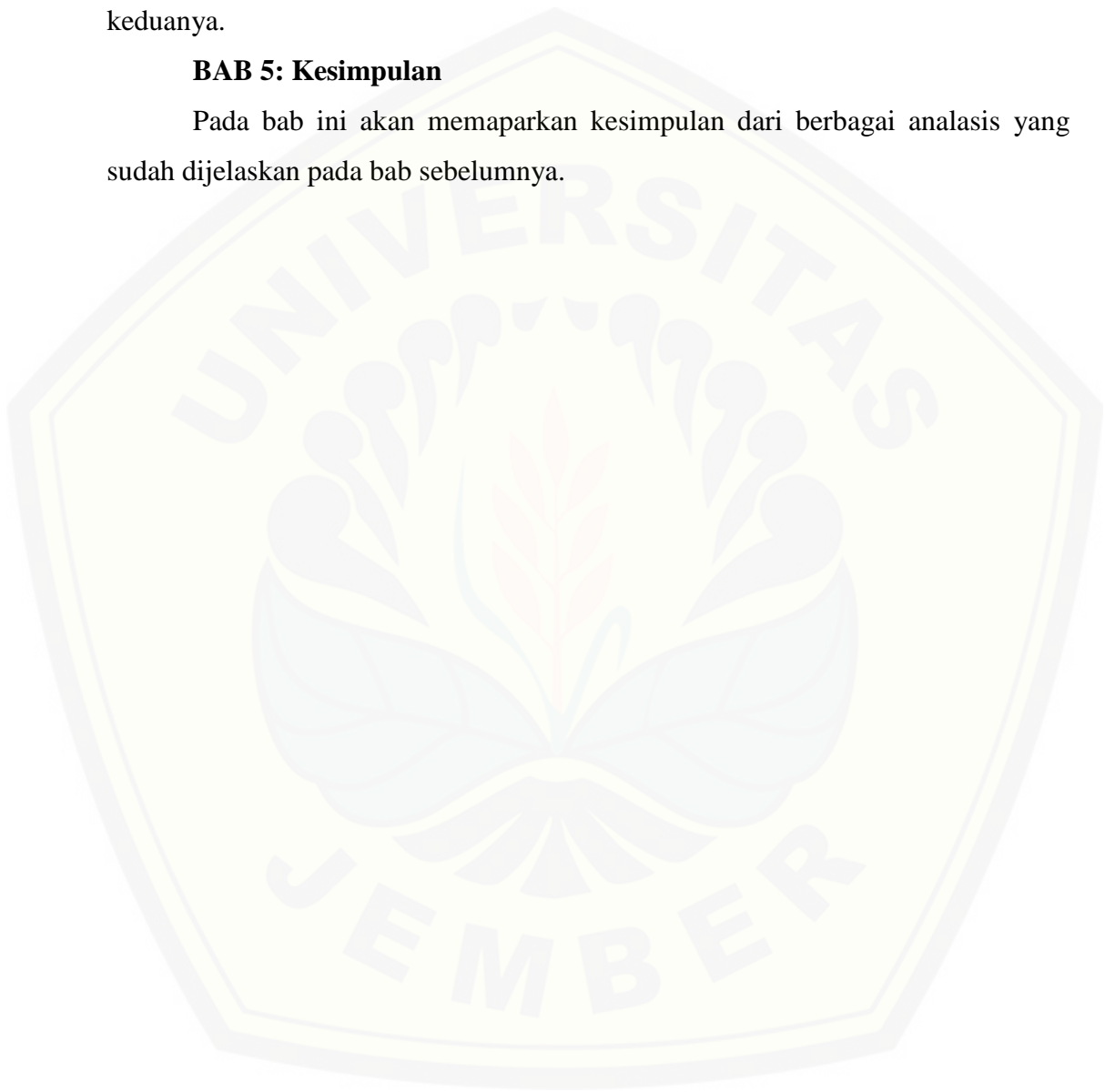
Pada bab ini akan dibahas mengenai pelaksanaan MDGs di Brasil, khususnya pada pelaksanaan program MDGs yang pertama yaitu upaya untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Pada bab ini yang akan dibahas berfokus pada pelaksanaan kebijakan dalam hal pengelolaan lahan dan reformasi struktur ekonomi pertanian serta pelaksanaan *Programa Fome Zero (Zero Hunger Program)* serta berbagai implikasi yang ditimbulkan dari pelaksanaan dua program tersebut.

BAB 4: Analisa Hegemoni Amerika Serikat dalam Pelaksanaan Program MDG1 di Brasil

Pada bab ini akan dianalisis dengan mengacu pada kerangka pemikiran, mengenai hubungan berbagai pelaksanaan program MDGs yang pertama di Brasil dengan pengaruh yang dimiliki Amerika Serikat terhadap PBB sebagai organisasi yang mencetuskan MDGs. Pada bab ini juga akan ditunjukkan korelasi antara keduanya.

BAB 5: Kesimpulan

Pada bab ini akan memaparkan kesimpulan dari berbagai analisis yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.



BAB 2. HEGEMONI AMERIKA SERIKAT DAN KONDISI DALAM NEGERI BRASIL

Amerika Serikat tidak dapat dipungkiri merupakan negara dengan kekuatan militer, ekonomi, dan politik terbesar di dunia. Kekuatan yang dimiliki oleh Amerika Serikat tersebut sering digunakan untuk mempengaruhi ataupun memonopoli aktor-aktor lain dalam hubungan internasional, bahkan Amerika Serikat dapat mempengaruhi sistem internasional yang ada. Saat ini kekuatan militer Amerika Serikat aktif di hampir seluruh negara di dunia. Kekuatan militer Amerika Serikat saat ini aktif hampir di 226 negara di dunia, dengan 63 di antaranya memiliki basis militer, dan hanya 46 negara di dunia yang tidak memiliki pengaruh militer Amerika Serikat.⁴⁷ Melalui implementasi neo-liberalisme dan globalisasi, kekuatan berbagai MNC Amerika Serikat juga berhasil mendominasi pasar dalam dunia internasional.

Sementara itu, saat ini juga muncul berbagai negara berkembang yang mulai menunjukkan kekuatan yang semakin besar dalam dunia internasional, dan Brasil adalah salah satunya. Brasil yang merupakan negara Amerika Latin terbesar mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan untuk menjadi kekuatan baru dalam dunia internasional. Brasil bersama dengan Rusia, India dan Cina membentuk BRIC sebagai blok ekonomi baru dari negara berkembang yang mampu bersaing dengan negara – negara maju.

2.1 Sejarah Hegemoni Amerika Serikat di Dunia Internasional

Saat ini Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai negara dengan dominasi atau pengaruh paling besar di dunia internasional. Dominasi yang dimiliki oleh Amerika Serikat saat ini diperoleh melalui kekuatan ekonomi, militer, dan juga pengaruhnya terhadap pembuatan keputusan berbagai organisasi internasional di dunia. Meskipun demikian, Amerika Serikat baru memperoleh dominasi ini

⁴⁷ Josh Buerman. 2015. *Enforcing American Hegemony – A Timeline*. <http://www.flagrancy.net/timeline.html> [05 Oktober 2015]

setelah berakhirnya perang dunia, baik itu Perang Dunia I ataupun Perang Dunia II. Sebelum terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II di Eropa, kekuatan Amerika Serikat masih di bawah kekuatan negara-negara Eropa.

Sebelum terjadinya Perang Dunia I dan II, interaksi internasional berpusat di Eropa dengan Inggris menjadi kekuatan yang paling mendominasi pada masa itu dengan menguasai seperempat dunia. Dominasi Inggris ini diperoleh sejak berakhirnya masa kekuasaan Napoleon di Perancis dan terus berlanjut hingga masa perang dunia. Ketika Inggris mendominasi dunia yaitu sekitar abad 18, Amerika Serikat yang baru merdeka dari Inggris masih banyak mengalami permasalahan dalam negeri. Perang revolusi dan perang saudara masih sering terjadi di Amerika Serikat antara Amerika Serikat yang baru terbentuk dengan koloni-koloni lain yang belum bergabung, dengan suku Indian, bangsa Meksiko, ataupun dengan Spanyol yang pada waktu itu masih menguasai sebagian koloni di Amerika Serikat.⁴⁸

Pada awal kemerdekaannya dari Inggris, Amerika Serikat terdiri dari 13 negara bagian saja, yaitu: Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts Bay, Maryland, South Carolina, New Hampshire, Virginia, New York, North Carolina, dan Rhode Island.⁴⁹ Untuk memperluas wilayah negara, akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk menginvasi bagian barat dan utara yang pada waktu itu masih dikuasai oleh suku Indian, bangsa Meksiko, Inggris, dan Spanyol. Sementara itu Prancis yang pada waktu itu juga menguasai sebagian koloni di daratan Amerika mendukung Amerika Serikat sepenuhnya untuk mengalahkan Inggris dan mengusir Inggris dari Amerika Utara. Perang terakhir yang dilakukan Amerika Serikat melawan suku Indian dan juga tentara Inggris adalah pada perang 1812-1814 yang memperebutkan daerah Montreal di Kanada. Pada perang tersebut berakhir pada 1814 dengan status *quo*

⁴⁸ Timeline sejarah perang revolusi dan perang saudara di Amerika Serikat dapat dilihat pada <http://www.animatedatlas.com/timeline.html> [6 Oktober 2015]

⁴⁹ Wordatlas.com. 2015. *13 Original US Colonies - Map & Details*. <http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/namerica/usstates/colonies.htm> [7 Oktober 2015]

dan Inggris berhasil mempertahankan Montreal sementara Amerika Serikat berhasil mendapatkan daerah New Orleans dan Maine.⁵⁰

Pada tahun 1803 perluasan wilayah Amerika Serikat berhasil dilakukan dengan membeli Louisiana dari Prancis.⁵¹ Dengan berbagai keberhasilan mengalahkan pasukan Inggris, Amerika Serikat mengganti target menjadi daerah koloni yang dikuasai Spanyol yaitu Florida yang berhasil diambil alih melalui perjanjian Transkontinental pada 1821. Selain itu Amerika Serikat juga memberikan dukungan kepada koloni Spanyol yang ingin memerdekakan diri dari Spanyol. Sebelum keberhasilan perjanjian Transkontinental 1821, pada 1819 juga sempat disepakati perjanjian mengenai batas wilayah Spanyol dan Amerika Serikat melalui perjanjian Adam-Onis. Keberhasilan tersebut menjadikan Amerika Serikat sebagai negara dominan di Amerika Utara.



Gambar 2.1. Batas Wilayah dalam Perjanjian Adam-Onis 1819

Sumber gambar: <http://spider.georgetowncollege.edu/>

Pada tahun 1823 Presiden James Monroe mengeluarkan sebuah doktrin yang berdampak besar pada perkembangan invasi Amerika Serikat di *Western*

⁵⁰ Tanpa nama. 2015. *American History Timeline*. <http://www.animatedatlas.com/timeline.html> [7 Oktober 2015]

⁵¹ Departemen Sejarah Amerika Serikat. 2015. *Purchase of Louisiana*. <https://history.state.gov/milestones/1801-1829/louisiana-purchase> [7 Oktober 2015]

Hemisphere, yaitu Doktrin Monroe. Isi dari doktrin ini adalah bahwa Amerika Serikat menyerukan pelepasan pengaruh Eropa terhadap *Western Hemisphere* yang meliputi Amerika Utara dan Selatan. Tiga bagian utama dari doktrin tersebut adalah Eropa tidak boleh mencampuri urusan Amerika Serikat di *Western Hemisphere* dan Amerika Serikat tidak akan mencampuri urusan di Eropa, non-kolonialisasi dan non-intervensi Eropa di Amerika Utara dan Selatan.⁵²

Tujuan dari doktrin ini adalah untuk mencegah intervensi Eropa terhadap negara-negara Amerika Latin yang baru saja merdeka atau wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi milik Amerika Serikat. Selain itu tujuan dibalik dikeluarkannya doktrin Monroe ini adalah untuk menentang kolonialisasi Eropa di Amerika dan keinginan Amerika Serikat untuk meningkatkan pengaruh dan perdagangan Amerika Serikat di wilayah Amerika Latin. Sebaliknya kolonialisasi Eropa di Amerika Latin akan menghambat ekspansi perdagangan Amerika Serikat. Pada akhir abad 18, kekuatan ekonomi dan militer Amerika Serikat digunakan untuk melaksanakan Doktrin Monroe ini.

Setelah dikeluarkannya Doktrin Monroe ini, Amerika Serikat menyatakan bahwa akan menggunakan kekuatan militer untuk memperluas wilayah dan juga pengaruhnya di Barat. Tindakan pertama yang dilakukan untuk mewujudkan Doktrin Monroe adalah ketika Amerika Serikat menginvasi Meksiko untuk memperluas wilayah pada 1845. Sebelum perang terbuka antara Amerika Serikat dengan Meksiko tersebut, sebelumnya pada 1836 wilayah Texas melakukan perang melawan Meksiko untuk berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka. Setelah Texas merdeka dari Meksiko, Amerika Serikat mengambil tindakan untuk menganeksasi wilayah Texas agar masuk ke wilayah Amerika Serikat. Akan tetapi Meksiko mengancam perang apabila Amerika Serikat menganeksasi Texas.

Rencana aneksasi Texas dilanjutkan pada 1844 ketika Presiden John Tyler memulai negosiasi dengan Texas hingga akhirnya aneksasi tersebut berhasil dilakukan pada 1845. Meskipun Meksiko tidak jadi melakukan perang terhadap Amerika Serikat, tetapi Meksiko memiliki masalah perbatasan dengan Texas.

⁵² Departemen Sejarah Amerika Serikat. 2015. *Monroe Doctrine*. <https://history.state.gov/milestones/1801-1829/monroe> [7 Oktober 2015]

Hingga akhirnya pada 1846 Presiden Polk yang kembali menjabat memutuskan untuk membeli batas wilayah yang dijadikan perselisihan dan ditolak oleh Meksiko. Menyikapi hal tersebut, Presiden Polk segera menyatakan perang terhadap Meksiko dan dimulailah Perang Meksiko. Perjanjian Guadalupe-Hidalgo menjadi pertanda berakhirnya Perang Meksiko dengan kemenangan Amerika Serikat. Dari kemenangan tersebut Amerika Serikat berhasil memperoleh wilayah yang saat ini menjadi New Meksiko dan Kolorado atau setengah dari wilayah Meksiko.⁵³

Setelah menghadapi perang melawan Meksiko tersebut, Amerika Serikat harus menghadapi Perang Sipil pada 1861. Perang Sipil tersebut dilakukan oleh pihak Konfederasi yang terdiri dari 11 negara bagian yang berada di wilayah selatan yaitu Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina dan Texas serta Arkansas, North Carolina, Tennessee dan Virginia di bagian utara melawan 13 negara bagian yang berada di bagian utara atau pihak *Union*.⁵⁴ Pemberontakan ini disebabkan oleh ketidaksetujuan pihak Konfederasi terhadap keputusan Lincoln untuk membebaskan budak melalui *Emancipation Proclamation* karena 11 negara bagian tersebut begitu tergantung pada perbudakan. Setelah melakukan perang selama 4 tahun hingga 1865, akhirnya pihak Konfederasi berhasil dikalahkan dengan kemenangan pihak *Union* dan persatuan kembali Amerika Serikat. Setelah Perang Sipil ini berakhir pada 1865 hingga 1920 Amerika Serikat mulai melakukan industrialisasi di berbagai sektor agar dapat memperkuat kedudukannya dalam dunia internasional.⁵⁵

⁵³ Departemen Sejarah Amerika Serikat. 2015. *The Annexation of Texas, the Mexican-American War, and the Treaty of Guadalupe-Hidalgo, 1845–1848*. <https://history.state.gov/milestones/1830-1860/texas-annexation> [7 Oktober 2015]

⁵⁴ History.com. 2015. *Confederate States of America*. <http://www.history.com/topics/american-civil-war/confederate-states-of-america> [7 Oktober 2015]

⁵⁵ Everett Carll Ladd. 1989. *The American Polity – The People and Their Government*. New York: W. W. Norton & Company. Halaman 14

dengan nilai US\$ 20 juta. Keberhasilan Amerika Serikat mengalahkan Spanyol pada Perang Spanyol mengakhiri kekuasaan Eropa di Barat dan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara dominan di Barat. Sementara itu untuk membuka dominasi atas Asia Pasifik, Amerika Serikat juga menganeksasi Kepulauan Hawaii yang pada waktu itu independen pada 1898.⁵⁶

Dominasi Amerika Serikat di dunia Barat semakin diperkuat dengan terpilihnya Theodore Roosevelt sebagai presiden. Presiden Roosevelt menjadikan Doktrin Monroe sebagai dasar kebijakan luar negerinya dan akan menggunakan kekuatan militer untuk menjaga Amerika Utara dan Latin dari serangan Eropa. Presiden Roosevelt juga mulai memikirkan sebuah rute laut di wilayah Karibia untuk mempermudah perdagangan Amerika Serikat dengan negara lain. Amerika Serikat dan Inggris merencanakan untuk membangun sebuah terusan di Nikaragua, tetapi rencana tersebut tidak pernah terlaksana. Justru negara pertama yang membangun terusan di wilayah Karibia adalah Perancis pada 1880 di Panama, yang masih menjadi sebuah provinsi di wilayah Kolombia. Meskipun akhirnya setelah dibangun selama 9 tahun terusan tersebut tidak pernah selesai karena upaya Perancis tersebut mengalami kebangkrutan.

Meskipun Perancis gagal dalam membangun terusan di Panama, Amerika Serikat masih ingin membangun terusan di wilayah Karibia. Melalui perjanjian *Hay-Pauncefote* pada 1901, Amerika Serikat memiliki ijin untuk membangun terusan di Panama. Meskipun akhirnya usulan pembangunan terusan tersebut ditolak oleh Kongres Kolombia karena proposal finansial Amerika Serikat yang tidak dapat diterima Kongres Kolombia. Keputusan Kongres Kolombia tersebut dibalas Presiden Roosevelt dengan mengirimkan kapal perang Amerika Serikat ke Panama City di wilayah Pasifik dan Colón di wilayah Atlantik untuk mendukung kemerdekaan Panama dari Kolombia.

Pasukan Kolombia tidak mampu menahan serangan Amerika Serikat hingga akhirnya Panama mendeklarasikan kemerdekaannya dari Kolombia pada 3 November 1903. Setelah Panama merdeka dari Kolombia, proyek pembangunan

⁵⁶ Departemen Sejarah Amerika Serikat. 2015. *The Spanish-American War, 1898*. <https://history.state.gov/milestones/1866-1898/spanish-american-war> [7 Oktober 2015]

terusan Amerika Serikat disetujui dan akhirnya Amerika Serikat memiliki hak untuk membangun terusan selebar 10 mil. Terusan Panama yang dibangun Amerika Serikat selesai pada 1914 yang melambangkan keunggulan teknologi dan ekonomi Amerika Serikat.⁵⁷

Upaya Amerika Serikat untuk menjadi negara dominan melalui kekuatan ekonomi dan militer sedikit berubah pada masa kepemimpinan Woodrow Wilson. Presiden Wilson menyerukan Amerika Serikat untuk melihat melebihi kepentingan ekonominya dan menyusun serangkaian kebijakan luar negeri yang lebih fokus pada penyebaran cita-cita, norma, moralitas, dan nilai demokrasi. Dibawah Presiden Wilson, Amerika Serikat mencita-citakan sebuah sistem keamanan kolektif melalui kepemimpinan Amerika Serikat dalam organisasi internasional yang akhirnya terwujud dalam Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada 1920.⁵⁸

Pada saat Amerika Serikat terus muncul sebagai kekuatan dominan baru dalam dunia internasional, Inggris sebagai kekuatan dominan sebelumnya semakin melemah. Pada tahun 1914 terjadi Perang Dunia I di Eropa yang mengakibatkan berbagai kekacauan bagi negara-negara besar Eropa. Sementara Amerika Serikat baru terlibat dalam Perang Dunia I pada 1917 ketika Jerman memutuskan untuk mengirimkan kapal selam perang ke wilayah Atlantik dan mengajak Meksiko untuk melawan Amerika Serikat.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia I berkontribusi besar dalam menyebabkan kekalahan Jerman di berbagai tempat. Kekalahan telak Jerman pada 1918 mengakhiri perlawanan Jerman terhadap tentara Sekutu dan Perjanjian Versailles pada 1819 menandai berakhirnya Perang Dunia I. Dampak yang diakibatkan dari terjadinya Perang Dunia I adalah bubarnya 4 kekaisaran di Eropa, yaitu Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Usmani, Kekasiran Rusia, dan Kekaisaran Austro-Hungaria.⁵⁹

⁵⁷ Departemen Sejarah Amerika Serikat. 2015. *Building the Panama Canal, 1903–1914*. <https://history.state.gov/milestones/1899-1913/panama-canal> [7 Oktober 2015]

⁵⁸ Departemen Sejarah Amerika Serikat. 2015. *1914–1920: World War One and Wilsonian Diplomacy*. <https://history.state.gov/milestones/1914-1920> [7 Oktober 2015]

⁵⁹ Departemen Sejarah Amerika Serikat. 2015. *U.S. Entry into World War I, 1917*. <https://history.state.gov/milestones/1914-1920/wwi> [7 Oktober 2015]

Berakhirnya Perang Dunia I juga menempatkan Amerika Serikat sebagai aktor yang semakin dominan dalam dunia internasional. Sebelum penandatanganan Perjanjian Versailles pada Juli 1919, pada tahun 1918 Presiden Wilson ingin menghentikan perang yang akan menjamin keamanan dan bukan hanya sekedar *balance of power*. Oleh karena itu Presiden Wilson mengusulkan 14 Poin yang mencakup berbagai hal untuk mencapai perdamaian tersebut.⁶⁰ 14 Poin yang diusulkan oleh Presiden Wilson inilah yang kemudian menjadi Liga Bangsa-Bangsa. 14 Poin ini juga yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam Perjanjian Versailles oleh Presiden Wilson.⁶¹

Meskipun Presiden Wilson merupakan penyeru paling depan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, tapi akhirnya ketika wacana pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dimasukkan dalam Perjanjian Versailles, Amerika Serikat tidak meratifikasi perjanjian tersebut. Amerika Serikat akhirnya meratifikasi Perjanjian Berlin 1921 dengan Jerman terkait dengan kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dunia I tetapi tanpa harus menjadi anggota LBB.⁶² Dalam perjanjian ini Amerika Serikat memiliki hak untuk menikmati *previlage*, ganti rugi, dan juga perbaikan sebagai pihak yang memenangkan perang. Amerika Serikat tidak meratifikasi Perjanjian Versailles karena kalah suara dalam Kongres. Senat Amerika Serikat melihat bahwa Perjanjian Versailles hanya akan melemahkan kepentingan Amerika Serikat. Meskipun demikian, setelah Presiden Wilson diganti Amerika Serikat tetap memberikan dukungan terhadap tujuan-tujuan LBB dan juga berkerjasama dalam beberapa isu yang diangkat LBB.

Setelah terjadinya Perang Dunia I, pada tahun 1930-an dunia internasional dihadapkan dengan terjadinya *The Great Depression* yang disebabkan oleh biaya yang dihabiskan selama Perang Dunia I. Pada masa ini Amerika Serikat tidak

⁶⁰ *Wilson Fourteen Points* merupakan 14 point yang dianggap Presiden Wilson sebagai penjamin perdamaian yang komprehensif berisi 8 poin terkait isu-isu spesifik mengenai teritorial negara-negara yang melakukan perang, dan 6 poin yang terkait dengan prinsip-prinsip umum yang menjamin perdamaian, seperti perjanjian atau kerjasama terbuka, *free trade*, kebebasan laut, dan pengurangan persenjataan. Departemen Sejarah Amerika Serikat. 2015. <https://history.state.gov/milestones/1914-1920/fourteen-points> [8 Oktober 2015]

⁶¹ Departemen Sejarah Amerika Serikat. 2015. *The Paris Peace Conference and the Treaty of Versailles*. <https://history.state.gov/milestones/1914-1920/paris-peace> [8 Oktober 2015]

⁶² *Ibid.*

kembali ke sikap ekspansi tradisionalnya berdasarkan Doktrin Monroe melainkan melakukan isolasionisme yaitu tidak terlibat sama sekali dengan situasi yang ada di dunia internasional.⁶³ Pada sisi lainnya Amerika Serikat lebih fokus pada kondisi dalam negerinya dan pada negara-negara tetangganya. Melalui kebijakan *Good Neighbor Policy* pada 1933, Amerika Serikat ingin memperbaiki hubungan dengan negara-negara di kawasan Karibia dan Amerika Latin melalui kerjasama dan perdagangan, dan tidak melalui kekuatan militer. Pada masa ini keputusan isolasionalisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat dapat juga disebut sebagai keputusan unilateralisme karena Amerika Serikat lebih mementingkan pencapaian kepentingannya di Dunia Barat daripada membantu mengatasi permasalahan negara-negara Eropa.

Terkait dengan kebijakan ekonominya setelah Perang Dunia I, Amerika Serikat menerapkan *tariff* yang tinggi untuk melindungi perekonomian dalam negerinya. Setelah terjadinya *Great Depression* Amerika Serikat tidak lagi menggunakan sistem standar emas dalam perekonomiannya. Amerika Serikat di bawah F.D. Roosevelt juga melihat bahwa perbaikan ekonomi domestik menjadi kunci untuk lepas dari depresi ekonomi. Untuk memperbaiki perekonomian domestiknya, Amerika Serikat menyusun kebijakan Bank Ekspor-Impor pada 1934 untuk kembali membangun kerjasama perdagangan dengan negara lain setelah melakukan isolasionalisme.

Operasional Bank Ekspor-Impor ini di seluruh negara partner dagang di luar wilayah Amerika, tetapi fokus kerja bank ini berada di kawasan Amerika Latin terkait kebijakan *Good Neighbor Policy*. Pada 1934 dibawah Presiden Roosevelt, Amerika Serikat juga berhasil menyusun kebijakan ekonomi untuk menurunkan *tariff* dalam perdagangan internasionalnya melalui Perjanjian Ketetapan Perdagangan Resiprokal (*Reciprocal Trade Agreement Act - RTAA*). Selama 1934-1939 Amerika Serikat berhasil bekerjasama dengan 19 negara melalui RTAA. Kebijakan ini ditempuh oleh Amerika Serikat untuk mempermudah kerjasama ekonominya yang akan dilakukan ke seluruh dunia. Dengan penurunan *tariff* maka perdagangan Amerika Serikat dapat memperoleh

⁶³ Everett Carll Ladd. *Op. Cit.* Halaman 683

keuntungan yang besar dan menjadikan Amerika Serikat sebagai pusat perdagangan.⁶⁴

Pada 1939 perang mulai terjadi lagi di Eropa ketika Jerman menginvasi Polandia. Pada awal terjadinya perang, Amerika Serikat memutuskan untuk menjadi pihak netral dan tidak memihak antara Sekutu atau Aksis. Tapi kemudian Amerika Serikat mulai memberikan bantuan kepada pihak Sekutu melalui bantuan *Lend-Lease* pada 1940. Bantuan yang berupa persediaan kebutuhan logistik perang dan finansial ini akhirnya diberikan oleh Amerika Serikat karena ketakutan Amerika Serikat terhadap kemenangan nazy Jerman. Melalui bantuan ini juga Amerika Serikat mulai menunjukkan dominasinya atas negara-negara besar di Eropa. Kompensasi yang harus diberikan kepada Amerika Serikat atas bantuan tersebut adalah ‘pertimbangan’ khusus yang akan diminta Amerika Serikat setelah perang untuk mencapai kepentingannya. Pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat memiliki keuntungan *previlage* atas 30 negara setelah memberikan bantuan ini.

Kekalahan pihak Sekutu menyebabkan Inggris meminta bantuan Amerika Serikat lagi pada 1941. Amerika Serikat baru mengeluarkan deklarasi perang terhadap Jepang yang tergabung dalam Aksis pada Desember 1941 setelah Jepang menyerang Hawaii. Perang Dunia II berakhir pada 1945 setelah Amerika Serikat mengalahkan Jepang di Pasifik dengan menggunakan bom atom dan keberhasilan tentara Amerika Serika dan Inggris menduduki Jerman di Eropa. Berakhirnya Perang Dunia II juga ditandai dengan dikeluarkannya Deklarasi Postdam pada Agustus 1945.⁶⁵ Deklarasi tersebut merupakan hasil dari kesepakatan Amerika Serikat, Inggris, dan *The Union of Soviet Socialist Republics* (USSR) yang berhasil mengalahkan Jerman dari timur. Pada konferensi tersebut, USSR dan Amerika Serikat mulai menunjukkan persaingan atas pengaruhnya di Eropa. Pada konferensi tersebut Amerika Serikat juga memberikan pernyataan mengenai

⁶⁴Departemen Sejarah Amerika Serikat. 2015. *New Deal Trade Policy: The Export-Import Bank & the Reciprocal Trade Agreements Act, 1934*. <https://history.state.gov/milestones/1921-1936/export-import-bank> [8 Oktober 2015]

⁶⁵ Departemen Sejarah Amerika Serikat. 2015. *The Potsdam Conference, 1945*. <https://history.state.gov/milestones/1937-1945/potsdam-conf> [8 Oktober 2015]

kepemilikan bom atom dalam kekuatan militernya untuk menunjukkan superioritasnya atas negara – negara di Eropa.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, dunia internasional di bawah gagasan Amerika Serikat dan Inggris mulai membentuk organisasi internasional untuk mencegah terjadinya perang lagi, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Demi menjaga perdamaian dan mencegah terjadinya perang, Amerika Serikat, Inggris, USSR, dan Cina bertindak sebagai ‘empat polisi’ untuk menjaga dan mencegah terjadinya perang lagi. Pada 1944 Amerika Serikat bersama Inggris menyepakati pembentukan dua lembaga moneter dunia untuk mencegah dampak ekonomi setelah perang, yaitu *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia. Selain itu pada 1947 disepakati pula *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) untuk mengatur mengenai kesepakatan perdagangan dan *tariff*. Berbagai organisasi internasional yang dibentuk dengan gagasan Amerika Serikat ini menempatkan posisi Amerika Serikat sebagai negara superior atau memberikan hak istimewa kepada tindakan Amerika Serikat.⁶⁶

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat muncul sebagai negara dominan dalam hubungan internasional dengan kekuatan nuklir dan juga perekonomian yang tidak terkena dampak perang. Meskipun demikian Amerika Serikat tidak muncul sebagai satu-satunya hegemon dunia, USSR dengan ideologi komunisnya juga muncul sebagai negara yang mampu menyaingi dominasi Amerika Serikat. Persaingan yang terjadi antara dua negara ini kemudian yang memicu terjadinya Perang Dingin. Persaingan pada masa Perang Dingin tidak hanya berupa *arms race* terkait kepemilikan teknologi nuklir (*Medium Range Ballistic Missile* – MRBM, *Intermediate Range Ballistic Missile* – IRBM, atau *Intercontinental Ballistic Missile* - ICBM) tetapi juga persaingan penyebaran ideologi.

Banyak strategi yang diterapkan Amerika Serikat untuk mencegah meluasnya pengaruh komunisme USSR. Melalui Doktrin Truman 1947, Amerika Serikat memutuskan untuk menyediakan asistensi politik, militer, dan ekonomi

⁶⁶ Data dikumpulkan dari berbagai dokumentasi Departemen Sejarah Amerika Serikat. 2015. Lebih lanjut lihat <https://history.state.gov/>

kepada seluruh negara demokratis yang mendapat ancaman baik dari kekuatan internal atau eksternal. Doktrin ini pula yang memungkinkan Amerika Serikat untuk melakukan intervensi pada konflik negara lain. Akhirnya pada tahun yang sama Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan *containment policy* untuk mencegah pengaruh USSR di dunia. Dalam mewujudkan *containment policy*, Amerika Serikat membentuk berbagai kerjasama regional seperti *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) pada 1949, *America-New Zealand-Australia* (ANZUS) pada 1951, *South East Asian Treaty Organization* (SEATO) yang menggantikan ANZUS pada 1954, dan *Central Treaty Organization* (CETO) pada 1958.

Penggunaan strategi ekonomi juga diimplementasikan Amerika Serikat untuk mencegah pengaruh USSR seperti *Marshall Plan* yang diterapkan pada 1948 untuk membangun kembali Eropa Barat yang hancur. Berkat implementasi *Marshall Plan* akhirnya mendorong industrialisasi di Eropa Barat dan berhasil menyediakan pasar bagi produk-produk Amerika Serikat. Strategi serupa dengan *Marshall Plan* juga diterapkan di Amerika Latin pada 1960-an untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga tidak dimasuki komunisme. Selain itu Amerika Serikat juga memberikan asistensi finansial kepada negara-negara Indocina untuk menahan penyebaran komunis di Asia. Berbagai strategi ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Doktrin Eisenhower pada 1957 untuk memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada negara yang terancam komunisme.

Akan tetapi *containment policy* yang diterapkan Amerika Serikat untuk mencegah penyebaran komunisme USSR menyebabkan kekacauan di banyak negara. Krisis Yunani dan Turki pada 1949, Perang Semenanjung Korea pada 1950-1953, Perang Vietnam, konflik Kongo 1965, Perang Sipil Dominika 1965, Krisis Misil Kuba 1962, konflik di Timur Tengah, dan krisis Afganistan merupakan hasil dari penerapan *containment policy*. Pasca terjadinya Krisis Misil Kuba yang menumbulkan ketakutan akan terjadinya perang nuklir antara dua kekuatan tersebut mendorong kedua negara untuk melakukan menurunkan uji coba nuklir melalui perjanjian *Limited Test Ban Treaty 1963* dan melakukan *Strategic Arms Limitation Talks* (SALT) pada 1967 dan 1972. Hingga akhirnya

PBB juga menyetujui pembentukan *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) pada 1968 untuk mengontrol kepemilikan nuklir.

Arms race yang begitu intens selama tahun 1970-an akhirnya mendorong perhatian terhadap isu kemanusiaan. Di bawah Presiden Nixon, Ford, dan Carter komitmen untuk melakukan *arms control* menjadi indikator penegakan hak asasi manusia (HAM). Khususnya pada masa Presiden Carter, isu pelanggaran HAM yang dilakukan USSR terhadap negara-negara Eropa Timur dijadikan sebagai tekanan diplomatis untuk mendorong *arms reduction* di USSR. Keputusan untuk menggunakan isu kemanusiaan ini dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menghambat perkembangan persenjataan nuklir USSR agar tidak dapat menandingi persenjataan Amerika Serikat. Semasa pemerintahan Presiden Carter juga dikeluarkan sebuah doktrin pada 1980 mengenai penggunaan kekuatan militer untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional Amerika Serikat. Doktrin ini dikeluarkan terkait dengan intervensi USSR di Timur Tengah sehingga menghambat persediaan minyak mentah Amerika Serikat.

Setelah pada 1960 hingga 1970-an Amerika Serikat menempuh kebijakan *détente*⁶⁷ menghadapi USSR, akhirnya pada masa Presiden Reagan Amerika Serikat menerapkan kebijakan yang lebih agresif. Jika *containment policy* diterapkan untuk menahan penyebaran komunisme, maka Amerika Serikat di bawah Presiden Reagan berusaha untuk menghapuskan *the evil empire*. Amerika Serikat mulai mendukung hingga membiayai berbagai kelompok oposisi atau golongan anti komunisme di berbagai negara seperti *Contras* di Nikaragua dan pembiayaan kudeta militer di berbagai negara.⁶⁸

Setelah *arms race* yang intens pada tahun 1970-an dan strategi agresif pada 1980-an, Amerika Serikat akhirnya berhasil membujuk USSR untuk melakukan *arms reduction* pada masa pemerintahan Presiden Reagan. Hal ini terkait dengan kemampuan berdiplomasi Presiden Reagan yang handal dan juga

⁶⁷ Merriam Webster mendefinisikan *détente* sebagai “*the relaxation of strained relations or tensions (as between nations)*” jadi dapat diinterpretasikan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Amerika Serikat selama 1960-1970 lebih bersifat tidak ofensif. Selama 1960-1970 banyak upaya yang dilakukan oleh presiden Amerika Serikat untuk mengurangi ketegangan dengan USSR. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/d%C3%A9tente> [10 Oktober 2015]

⁶⁸ Everett Carll Ladd. *Op. Cit.* Halaman 693

terpilihnya Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin USSR yang baru. Bipolarisme dominasi dunia dalam Perang Dingin akhirnya berakhir pada 1989 yang ditandai dengan bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur serta pembubaran USSR.

Semasa pemerintahan Presiden Reagan, Amerika Serikat juga mulai mendorong negara-negara berkembang dan juga sistem ekonomi internasional untuk mengimplementasikan neoliberalisme. Melalui *Washington Concensus* pada 1989, Amerika Serikat bersama dengan Inggris mendorong paket *Structural Adjustment Programm* (SAP) untuk mendorong pertumbuhan makroekonomi. Paket pertumbuhan makro tersebut terkait implementasi *free trade* dan deregulasi pasar untuk mencapai pembangunan yang ideal. Dalam mendorong implementasi neoliberalisme tersebut, Amerika Serikat menggunakan pengaruh yang dimilikinya di IMF, Bank Dunia, dan juga GATT yang kemudian berubah menjadi *World Trade Organization* (WTO). *United States Agency for International Development* (USAID) yang dibentuk sejak 1961 juga dijadikan agen promosi neoliberalisme oleh Amerika Serikat. Dalam upaya untuk membuka pasar di kawasan Asia-Pasifik, Amerika Serikat juga membentuk *Asia-Pacific Economy Cooperation* (APEC) pada 1989.

Berakhirnya Perang Dingin juga menandakan *new world order* dengan Amerika Serikat sebagai satu-satunya kekuatan dominan dalam dunia internasional. Dengan dominasi ini, Amerika Serikat dapat memanfaatkan berbagai aktor dalam hubungan internasional untuk mencapai kepentingannya. Hal ini juga menjadikan Amerika Serikat sebagai poros unipolar hubungan internasional. Pola interaksi ini menjadikan nilai-nilai yang diakui oleh Amerika Serikat sebagai standar dan acuan pola tingkah laku bagi negara-negara lainnya. Bahkan Amerika Serikat dapat mempengaruhi negara-negara lain dan menciptakan rezim internasional yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Hal ini seperti ketika Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan *war on terrorism* pada 2001 dan seluruh dunia melakukan hal yang sama. Meskipun semua itu hanya dilakukan sebagai justifikasi tindakan intervensi Amerika Serikat kepada negara lain.

2.2 Dinamika Hubungan Asimetris dan Simetris Amerika Serikat – Amerika Latin

Belahan Dunia Barat atau *Western Hemisphere* pada awalnya hanya merupakan wilayah koloni dari hegemoni negara-negara Eropa seperti Inggris, Spanyol, Perancis, dan Portugal.⁶⁹ Tetapi setelah Amerika Serikat merdeka dari Inggris pada 1776, wilayah koloni yang lain juga mulai memerdekakan diri dari negara-negara Eropa. Revolusi kemerdekaan akhirnya juga terjadi di berbagai negara di Amerika Latin mulai 1808, yaitu dimulai dengan revolusi kemerdekaan Argentina yang kemudian diikuti oleh revolusi kemerdekaan Venezuela, Meksiko, Cili, Brasil, Bolivia, dan seterusnya.⁷⁰ Pada saat negara-negara Amerika Latin masih berjuang melakukan revolusi kemerdekaan, Amerika Serikat sudah berupaya memperluas wilayahnya dan memperkuat posisi di Amerika Utara.

Hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara Amerika Latin awalnya hanya terbatas pada hubungan dagang dengan negara Amerika Tengah dan Karibia. Hubungan tersebut telah dimulai sejak negara-negara Eropa masih menguasai *Western Hemisphere*. Setelah negara-negara tersebut merdeka, hubungan dilanjutkan menjadi hubungan dagang bilateral. Meskipun demikian, hubungan antara Amerika Serikat dengan negara-negara Amerika Latin merupakan suatu hubungan yang asimetris dengan Amerika Serikat menempatkan posisinya sebagai pemimpin yang superior dari negara-negara *Western Hemisphere*.

⁶⁹ *Western Hemisphere* merupakan istilah geografi yang digunakan oleh politikus, diplomat, dan jurnalis Amerika Serikat untuk mendeskripsikan peradaban di sebelah barat Eropa, yaitu peradaban di seluruh daratan Amerika, baik itu Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan juga Kepulauan Karibia. Penggunaan konsep ini memiliki signifikansi dalam menjustifikasi tindakan Amerika Serikat dalam Doktrin Monroe yang mendeklarasikan *The New World (Western Hemisphere)* yang secara geografis berbeda dan memiliki kepentingan politik yang berbeda dengan *The Old World* (Eropa). Penggunaan istilah ini juga telah menjustifikasi tindakan Amerika Serikat mengintervensi negara-negara di Amerika Latin selama Perang Dunia II dan Perang Dingin dengan alasan untuk melindungi *Western Hemisphere*. Joseph Smith. 2007. *Historical Dictionary of United States–Latin American Relations*. Plymouth: The Scarecrow Press, Inc. Halaman 229

⁷⁰ Untuk *timeline* revolusi kemerdekaan di Amerika Latin pelajari lebih lanjut: Joseph Smith. 2005. *THE UNITED STATES AND LATIN AMERICA – A history of American diplomacy 1776–2000*. New York: Routledge.



The Western Hemisphere

Gambar 2.3 *The Western Hemisphere*

Sumber: *Historical Dictionary of United States*

Berbagai tindakan yang dilakukan Amerika Serikat demi *Western Hemisphere* sebagian besar dapat dikatakan sebagai tindakan unilateralisme. Tindakan-tindakan Amerika Serikat tersebut hanya didorong untuk mencapai kepentingan Amerika Serikat saja.⁷¹ Implementasi Doktrin Monroe pada 1823 juga merupakan bentuk unilateralisme Amerika Serikat dan bukan keputusan kolektif negara-negara di *Western Hemisphere*. Amerika Serikat menempatkan diri sebagai pemimpin negara-negara *Western Hemisphere* dan secara sepihak memutuskan negara-negara merdeka di *Western Hemisphere* berada di bawah naungan Amerika Serikat.⁷² Amerika Serikat mengeluarkan doktrin tersebut untuk

⁷¹ Joseph Smith. 2007. *Op. Cit.* Halaman xxix

⁷² Joseph Smith. 2005. *Op. Cit.* Halaman 16

memutuskan pengaruh Eropa di *free world* dan untuk menjaga kepentingan ekonomi Amerika Serikat di negara-negara yang baru merdeka.⁷³ Amerika Serikat melihat negara-negara Amerika Latin yang baru merdeka sebagai sasaran perdagangan dan investasi Amerika Serikat yang menjanjikan.

Amerika Latin tidak pernah menjadi prioritas kebijakan Amerika Serikat meskipun secara geografis berada dalam satu wilayah. Faktor ekonomi adalah satu-satunya alasan yang mendorong Amerika Serikat untuk membuat kebijakan terkait dengan Amerika Latin. Perekonomian negara-negara Amerika Latin awalnya bergantung pada perdagangan dengan negara-negara Eropa. Tapi setelah Amerika Serikat menerapkan Doktrin Monroe, pengaruh Eropa di Amerika Latin semakin berkurang. Amerika Serikat kemudian menggantikan posisi negara-negara Eropa dan menjadi *single commercial market* serta investor terbesar di Amerika Latin. Negara-negara Amerika Latin yang baru merdeka tersebut sepenuhnya bergantung pada ekspor barang mentah ke pasar Amerika Serikat untuk mempertahankan perekonomiannya sementara Amerika Serikat mengeksport produk-produk hasil industrinya.

Pada tahun 1889 Amerika Serikat menerapkan *Big Brother Policy* ke negara-negara Amerika Latin. *Pan-America* yang terbentuk pada tahun yang sama merupakan hasil kebijakan ini. Melalui *Pan-America*, Amerika Serikat menjalin aliansi politik dan *commercial union* informal dengan negara-negara Amerika Latin. Ide utama pembentukan *Pan-America* adalah kemiskinan di Amerika Latin sehingga negara-negara Amerika Latin tidak mampu menciptakan hubungan yang resiprokal dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu Amerika Serikat harus menjadikan *sister nations* yang ada di Amerika Latin makmur, aman, dan demokratis.⁷⁴ Melalui *Pan-America* ini Amerika Serikat menempatkan diri sebagai *big brother* yang harus melindungi *sister nations*-nya dan secara tidak langsung menunjukkan superioritasnya atas negara-negara Amerika Latin.

Selama awal abad 19 Amerika Serikat juga banyak melakukan intervensi militer di Amerika Latin untuk menjamin tercapainya kepentingan ekonomi

⁷³ Stewart Brewer. 2006. *Border and Bridges: A History of U.S.-Latin American Relations*. Connecticut: Praeger Security International. Halaman 39.

⁷⁴ *Ibid.* Halaman 47

Amerika Serikat. Berbagai tindakan ekspansionis dilakukan oleh Presiden Roosevelt untuk menempatkan pengaruh Amerika Serikat di negara Amerika Latin. Kekuatan militer juga digunakan sebagai alat utama penyebaran pengaruh ekonomi Amerika Serikat. Aneksasi Haiti, Puerto Riko, pengambil alihan terusan Panama, intervensi Meksiko dan Venezuela, serta menjadi protektorat Kuba merupakan bentuk upaya Amerika Serikat untuk mengamankan kepentingan ekonominya di Amerika Latin.⁷⁵

Selain itu Amerika Serikat juga menerapkan Diplomasi Dolar dan *Roosevelt Corollary* untuk semakin mengekspansi perdagangan Amerika Serikat di Amerika Latin.⁷⁷ Melalui dua kebijakan tersebut, Amerika Serikat memiliki *previlage* untuk mengintervensi negara-negara Amerika Latin jika dibutuhkan. Hanya saja sama seperti kebijakan yang diputuskan oleh Amerika Serikat sebelumnya yang mengatasnamakan *Western Hemisphere*, dua kebijakan tersebut diputuskan secara sepihak oleh Amerika Serikat. Tindakan-tindakan intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini justru menimbulkan sentimen anti Amerika di banyak negara Amerika Serikat dan menumbuhkan skeptisme terhadap kebijakan Amerika Serikat di Amerika Latin.

⁷⁵ Amerika Serikat mendapat hak untuk menjadi protektorat Kuba setelah kemenangan Amerika Serikat terhadap Spanyol dalam Perang Spanyol 1898. Setelah kemenangan Amerika Serikat tersebut Spanyol harus meninggalkan Kuba dan menyerahkan hak Puerto Riko pada Amerika Serikat. Melalui *Platt Amendment* 1901 Amerika Serikat resmi bertindak sebagai protektorat Kuba. Isi dari *Platt Amendment* tersebut adalah delapan poin yang harus disetujui oleh Kuba sebagai syarat penarikan okupasi militer Amerika Serikat atas Kuba. Dari delapan poin tersebut disebutkan bahwa Kuba akan melarang penggunaan negaranya untuk tujuan militer oleh negara asing dan bahwa Amerika Serikat berhak melakukan intervensi untuk melindungi kemerdekaan Kuba. Departemen Sejarah Amerika Serikat. 2015. *The United States, Cuba, and the Platt Amendment, 1901*. <https://history.state.gov/milestones/1899-1913/platt> [20 Oktober 2015]

⁷⁶ Joseph Smith. 2007. Halaman xviii-xxi

⁷⁷ *Roosevelt Corollary* merupakan suatu kebijakan yang diputuskan oleh Presiden Theodore Roosevelt terkait dengan implementasi Doktrin Monroe pada 1904. Berdasarkan pada kebijakan ini Amerika Serikat menempatkan diri sebagai polisi di *Western Hemisphere* yang siap untuk mengintervensi negara-negara Amerika Latin untuk menjamin negara-negara Amerika Latin melakukan kewajibannya kepada kreditor asing. Dalam implementasinya, Amerika Serikat menggunakan kekuatan militer untuk mengintervensi negara Amerika Latin dalam menjamin stabilitas kawasan. Sementara itu Diplomasi Dolar adalah kebijakan yang diputuskan oleh Presiden William Howard Taft pada 1909 yang mendorong pemberian pinjaman kepada negara-negara lain. Kebijakan ini menumbuhkan kesempatan pada bank-bank Amerika Serikat dan juga para investor untuk menanamkan saham di negara asing. Data dikumpulkan dari Departemen Sejarah Amerika Serikat. <https://history.state.gov/milestones> [20 Oktober 2015]

Setelah Perang Dunia I berakhir dan Amerika Serikat mulai menunjukkan dominasinya di dunia internasional, dominasi Amerika Serikat di Amerika Latin melalui kekuatan ekonomi semakin kuat. Terutama setelah Perang Sipil pada 1870-an terjadi *economic boom* pada industri Amerika Serikat, Amerika Serikat membutuhkan pasar yang dapat mengkonsumsi produk-produk Amerika Serikat. Sementara itu negara-negara Amerika Latin yang baru merdeka dan lepas dari kolonialisme membutuhkan *capital intense* untuk membangun negaranya merupakan sasaran yang tepat bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat.⁷⁸ Setelah melemahnya City of London akibat Perang Dunia I, Wall Street muncul menggantikannya sebagai pemimpin pasar uang dan pusat finansial di dunia.⁷⁹ Hal ini juga semakin memperbesar dependensi negara-negara Amerika Latin terhadap Amerika Serikat yang bertindak sebagai investor dan *funding* terbesar Amerika Latin.

Pada tahun 1933, Amerika Serikat mengimplementasikan *Good Neighbor Policy* untuk mengurangi sentimen anti Amerika dan memperbaiki citra Amerika Serikat di Amerika Latin akibat intervensi militer yang telah dilakukan. Presiden F.D. Roosevelt menyatakan bahwa: “*In the field of world policy I would dedicate this nation to the policy of the good neighbor—the neighbor who resolutely respects himself and, because he does so, respects the rights of others.*”⁸⁰ Pada kebijakan ini Roosevelt juga menolak penerapan intervensi militer terhadap negara-negara Amerika Latin. Dicetuskannya kebijakan ini mengindikasikan bahwa Amerika Serikat telah mengakui kesetaraan dan *mutual respect* terhadap negara-negara Amerika Latin. pencetusan kebijakan ini pula yang mengembalikan kepercayaan negara-negara Amerika Latin terhadap Amerika Serikat.

Meskipun demikian, pencetusan kebijakan sebenarnya juga merupakan wujud unilateralisme Amerika Serikat. Tujuan pencetusan kebijakan ini adalah untuk mengekspansi perdagangan Amerika Serikat agar dapat memulihkan

⁷⁸ Guillermo A. O'Donnell. 1979. *Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American Politics*. Berkeley: Institute of International Studies, University of California. Halaman 40

⁷⁹ Joseph Smith. 2005. *Op. Cit.* Halaman 88

⁸⁰ Departemen Sejarah Amerika Serikat. 2015. *Good Neighbor Policy, 1933*. <https://history.state.gov/milestones/1921-1936/good-neighbor> [25 Oktober 2015]

perekonomian dalam negerinya karena dampak *The Great Depression*. Satu tahun setelah pencetusan kebijakan ini, Amerika Serikat juga mengeluarkan kebijakan RTAA untuk memberikan kesan hubungan timbal balik kepada negara Amerika Latin, meskipun sesungguhnya Amerika Serikat tetap menjadi negara superior dalam hubungan tersebut. Melalui rangkaian *Good Neighbor Policy* dan RTAA, Amerika Serikat berhasil menyepakati kerjasama perdagangan dengan 11 negara Amerika Latin.⁸¹ Dominasi ekonomi Amerika Serikat di Amerika Latin juga semakin diperlancar dengan dikeluarkannya kebijakan Bank Ekspor-Import yang memberikan kredit dolar kepada negara-negara Amerika Latin agar dapat membeli produk-produk Amerika Serikat.

Hubungan asimetris antara Amerika Serikat dengan Amerika Latin terus berlanjut pada Perang Dunia II. Amerika Serikat tetap menempatkan dirinya sebagai pemimpin *Western Hemisphere* dalam menanggapi perang yang terjadi di Eropa. Penyebaran kekuasaan Jerman ke Amerika Latin menyebabkan Amerika Serikat juga memberikan bantuan *Lend-Lease* ke Amerika Latin agar tidak ada yang berpihak kepada Jerman, dengan Brasil sebagai negara penerima bantuan terbesar. Meskipun demikian berbagai bantuan ekonomi yang diberikan Amerika Serikat ke Amerika Latin semasa Perang Dunia II secara sepihak dihentikan setelah Perang Dunia II berakhir. Mobilitas finansial pemerintah digantikan oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk memperoleh bahan mentah di Amerika Latin.⁸²

Dominasi yang diperoleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia II menjadikan Amerika Serikat keluar dari sikap unilateralis dan menjadi internasionalis. Pemulihan Eropa Barat menjadi prioritas utama kebijakan Amerika Serikat, dan disisi lain Amerika Latin semakin tidak menjadi prioritas. Total *Marshall Plan* yang diberikan Amerika Serikat untuk memulihkan Eropa Barat sangat tidak seimbang dengan bantuan yang diberikan pada Amerika Latin. Bahkan bantuan yang diberikan untuk memulihkan Belgia, jauh lebih besar dari

⁸¹ Joseph Smith. 2005. *Op. Cit.* Halaman 94

⁸² Joseph Smith. 2005. *Op. Cit.* Halaman 114

bantuan yang diberikan kepada seluruh negara Amerika Latin.⁸³ Meskipun demikian, Amerika Serikat tetap mendominasi negara Amerika Latin melalui kekuatan politik dan militer.

Semasa Perang Dingin Amerika Serikat hanya memperhatikan Amerika Latin untuk mengimplementasikan *containment policy* saja. Pada 1948 *Pan-America* digantikan dengan pembentukan *Organization of American States* (OAS) untuk menjamin kerjasama dan mengimplementasikan *containment policy*. Negara Amerika Latin melihat pembentukan OAS memberikan hubungan simetris dengan Amerika Serikat karena prinsip *equality of its member nations* tetapi sebenarnya itu hanya merupakan regional blok yang dibentuk Amerika Serikat untuk mencegah intervensi negara di luar *Western Hemisphere*. Salah satu prinsip yang juga terdapat dalam OAS adalah bahwa negara Amerika Latin harus mendukung keputusan Amerika Serikat. Pembentukan OAS ini juga terkait dengan implementasi Doktrin Truman.

Selain melalui pembentukan OAS, Amerika Serikat menerapkan *containment policy* dengan melakukan intervensi militer untuk melawan komunisme yang berkembang di Amerika Latin. Intervensi militer yang dilakukan Amerika Serikat juga menandai berakhirnya *Good Neighbor Policy*. Strategi lain yang ditempuh Amerika Serikat untuk menerapkan *containment policy* adalah dengan memberikan dukungan terhadap pemimpin militer yang ingin menguasai pemerintahan. Secara tidak langsung implementasi *containment policy* ini yang kemudian mendukung munculnya berbagai rezim otoriter berkuasa di Amerika Latin pada 1960-an.⁸⁴ Sentimen anti Amerika kembali tumbuh di Amerika Latin akibat intervensi yang dilakukan demi melawan komunisme. Selain itu intervensi tersebut juga mulai memunculkan rezim anti Amerika seperti rezim Fidel Castro di Kuba yang akhirnya lebih bersekutu dengan USSR. Untuk mengembalikan citra Amerika Serikat akhirnya pada 1959 Amerika Serikat membentuk *Inter-*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Lebih lanjut pelajari Guillermo A. O'Donnell. 1979. *Moernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American Politics*. Berkeley: Institute of International Studies, University of California.

American Development Bank (IADB) dengan tujuan peningkatan bantuan finansial.

Semasa pemerintahan Presiden Kennedy fokus Amerika Serikat di Amerika Latin adalah pemberian bantuan finansial agar tidak muncul rezim Castro yang lain. *Alliance of Progress* dibentuk untuk membawa pertumbuhan ekonomi di Amerika Latin. *Ten Years Plan* merupakan perwujudan dari kebijakan tersebut dengan memberikan pinjaman berjangka 10 tahun untuk membangun Amerika Latin, secara mendasar implementasi kebijakan ini seperti implementasi *Marshall Plan*. Presiden Kennedy menekankan bahwa implementasi kebijakan ini merupakan *joint cooperative effort* dengan Amerika Serikat bersedia mempertimbangkan ide dan permintaan negara Amerika Latin. Meskipun secara prinsip seperti itu, tetapi pada prakteknya tetap saja Amerika Serikat yang memutuskan keputusan dalam kebijakan itu secara unilateralisme. Bagi negara Amerika Latin pemberian pinjaman ini justru memperkuat rezim otoriter karena pada prakteknya yang terjadi adalah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu dari adanya transfer bisnis dari Amerika Serikat ke Amerika Latin. Pemberian bantuan ini dihentikan pada akhir 1970-an ketika Amerika Serikat harus memfokuskan kekuatannya dalam Perang Vietnam.

Meskipun demikian bukan berarti negara Amerika Latin tidak melakukan apapun ketika dihegemoni oleh kekuatan Amerika Serikat. Hanya saja negara Amerika Latin banyak mengalami permasalahan domestik seperti lemahnya institusi negara, keamanan, konflik kelas, dan pemberontakan. Pertumbuhan ekonomi juga terjadi di Amerika Latin meskipun awalnya sepenuhnya bergantung pada pasar Amerika Serikat. Tetapi kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat dan perusahaan Amerika Serikat telah mendorong munculnya industri-industri domestik di Amerika Latin. Industri domestik tersebut kemudian yang pelan-pelan mulai memberikan kekuatan kepada negara Amerika Latin selain kekayaan mineral yang dimiliki.

Dominasi Amerika Serikat mulai sedikit berkurang setelah kekalahan Amerika Serikat pada Perang Vietnam dan bertahannya Kuba di Amerika Latin setelah Amerika Serikat mengeluarkannya dari OAS, menghentikan bantuan

ekonomi, dan melakukan blokade ekonomi, serta kemenangan revolusi Sandinista di Nikaragua. Amerika Serikat lebih bersifat konsiliatoris dan kompromis terhadap negara Amerika Latin. *Oil-shock* yang terjadi pada 1973 juga menjadikan Amerika Serikat ingin memperbaiki hubungan dengan negara Amerika Latin, mengingat Amerika Latin merupakan penyuplai 30% kebutuhan minyak Amerika Serikat.⁸⁵ Dibawah kepemimpinan Presiden Nixon, Amerika Serikat menciptakan *new partnership* atau *new dialogue* dengan negara-negara Amerika Latin. Upaya untuk menciptakan hubungan yang sejajar antara negara industrialis dengan negara berkembang juga menjadi perhatian PBB. Hingga akhirnya pada 1979 ada Dialog Utara-Selatan untuk menciptakan sistem ekonomi internasional yang dapat menguntungkan negara maju dan negara berkembang.⁸⁷ Meskipun Dialog Utara-Selatan ini juga bentuk polaritas dunia internasional, tetapi dengan adanya Dialog Utara-Selatan ini kemudian memicu munculnya kerjasama antara negara Selatan sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada negara Utara.

Pada awal 1980-an Amerika Serikat dan juga IMF mendorong implementasi *Structural Adjustment Programm* (SAP) dan praktek neoliberalisme di Amerika Latin. Akan tetapi implementasi SAP justru menyebabkan penurunan standar hidup. Krisis ekonomi ini tidak hanya terjadi di Amerika Latin, hampir seluruh negara berkembang yang menerapkan SAP juga mengalaminya. Kemudian setelah Perang Dingin berakhir pada 1989, fokus kebijakan Amerika Serikat ke Amerika Latin berubah menjadi upaya untuk membuka pasar, memperkuat demokrasi, dan menghentikan peredaran narkoba.⁸⁸ Sementara itu dengan berbagai aliran bantuan finansial yang mengalir ke Amerika Latin,

⁸⁵ *Oil-shock* merupakan krisis minyak bumi yang dialami oleh Amerika Serikat pada 1973 karena embargo yang dilakukan oleh negara-negara Arab anggota *Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC) karena dukungan senjata yang diberikan Amerika Serikat kepada Irael pada Perang Arab-Irael. Embargo ini berisikan pelarangan ekspor minyak kepada Amerika Serikat dan juga pengurangan produksi minyak. Akibat embargo ini Amerika Serikat mengalami krisis energi yang menyebabkan peningkatan inflasi. Departemen Sejarah Amerika Serikat. 2015. Departemen Sejarah Amerika Serikat. 2015. *Oil Embargo, 1973-1974*. <https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-embargo> [26 Oktober 2015]

⁸⁶ Charlene Barshefsky, dkk. 2008. *U.S.-Latin America Relations: A New Direction for New a New Reality*. New York: SmartWood. Halaman 6

⁸⁷ Joseph Smith. 2005. *Op. Cit.* Halaman 143

⁸⁸ Charlene Barshefsky, dkk. *Op. Cit.* Halaman 7

Amerika Latin juga berusaha untuk melakukan pembangunan ekonomi, dan juga memperkuat institusi negaranya. Amerika Latin mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan pada 1990-an.

Pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini merupakan hasil inisiatif tindakan kolektif negara Amerika Latin yang pertama. Mengacu pada fakta sejarah yang pernah terjadi, Amerika Serikat tidak akan mempedulikan nasib negara Amerika Latin, oleh karena itu negara Amerika Latin berusaha bangkit dari krisis dengan tindakan mereka sendiri. Pada 1991 empat negara besar Amerika Latin, yaitu Brasil, Argentina, Uruguay, dan Paraguay memutuskan untuk membentuk *Mercosur*. *Mercosur* adalah sebuah *custom union* yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan pasar internal dan memberikan *bargaining position* yang lebih kuat dalam bernegosiasi dengan blok perdagangan yang lebih besar.⁸⁹

Menguatnya perekonomian negara Amerika Latin menyebabkan negara-negara besar Amerika Latin tidak lagi menjadikan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Amerika Serikat sebagai kepentingan utama. Negara besar Amerika Latin seperti Meksiko, Brasil, Argentina, Venezuela, Chili mulai melakukan pengembangan hubungan perdagangan ke luar *Western Hemisphere*. Hingga akhirnya mulai dituskan upaya untuk mewujudkan *Free Trade Area of Americas* (FTAA) untuk menciptakan integrasi perdagangan pada 1994.

Pertumbuhan ekonomi selama 1990-an akhirnya juga mendorong munculnya berbagai rezim demokrasi baru yang ingin menggantikan rezim lama yang dinilai gagal membawa kesejahteraan, keadilan, dan kestabilan di Amerika Latin.⁹⁰ Berbagai rezim baru yang muncul ini memiliki kecenderungan untuk lebih sosialis dan *counter-hegemonic*.⁹¹ Negara-negara Amerika Latin ini menginginkan *mutually respect*, kesetaraan, dan non-intervensi dari Amerika

⁸⁹ Joseph Smith. 2005. *Op. Cit.* Halaman 163-164

⁹⁰ Harvard Kennedy School – Shorestein Center. 2015. *New Left policies and Latin America: Research review and reading list*. <http://journalistsresource.org/studies/international/development/research-round-up-leftist-policies-work-latin-america> [30 Oktober 2015]

⁹¹ Materi hasil seminar Profesor Javier Corrales pada Maret 2010 di Miller Centre Universitas Virginia yang berjudul “Latin American Presidents, 1990s–2000s: Who’s a Leftist, Who’s a Populist, and What’s the Difference”. Profesor Corrales adalah professor Ilmu Politik dari Perguruan Tinggi Amherst dan lulusan Harvard David Rockefeller Centre untuk Studi Amerika Latin.

Serikat dalam urusan Amerika Latin. Dapat juga dikatakan bahwa negara Amerika Latin ingin bertindak secara independen tanpa pengaruh Amerika Serikat.

Terpilihnya Presiden Hugo Chávez di Venezuela merupakan awal dari bentuk penolakan Amerika Latin terhadap dominasi Amerika Serikat. Meskipun rezim yang baru tidak menentang Amerika Serikat seperti Fidel Castro di Kuba, tetapi rezim yang baru ini ingin memfokuskan agendanya bagi kesejahteraan rakyatnya sehingga terkadang harus mengimplementasikan kebijakan yang anti kapitalis.⁹² Setelah terpilihnya Presiden Chávez, terpilihnya Luiz Inácio Lula da Silva sebagai presiden Brasil pada 2002, Néstor Carlos Kirchner sebagai presiden Argentina pada 2003, Tabaré Vázquez sebagai presiden Uruguay pada 2004, Evo Morales di Bolivia pada 2005, Ricardo Lagos di Chili pada 2006, Daniel Ortega di Nikaragua pada 2006, dan Rafael Correa di Ekuador 2006.⁹³

Menguatnya posisi negara-negara Amerika Latin karena pertumbuhan ekonomi tersebut menandakan berakhirnya hubungan asimetris antara Amerika Serikat dengan Amerika Latin. Pola hubungan simetris mulai menggantikan pola hubungan yang lama. Negara Amerika Latin sudah banyak yang mempererat hubungannya dengan kawasan serta negara kuat lainnya. Cina yang saat ini menjadi kekuatan ekonomi dunia menjadi pilihan negara Amerika Latin sebagai parter perdagangannya. Banyak negara Amerika Latin yang berusaha mempererat hubungan ekonominya dengan Cina serta negara berkembang lainnya. Brasil memutuskan untuk membentuk BRIC bersama Rusia, India dan Cina untuk tumbuh sebagai kekuatan ekonomi dunia. Sementara Chili dan Venezuela lebih banyak memfokuskan perdagangannya dengan Uni Eropa.

⁹²Karakter pemerintahan ini dapat juga dikatakan sebagai pemerintahan yang *leftish*. Pemerintahan sisi Kiri saat ini berbeda dengan Pemerintahan Kiri dulu, karena pemerintahan kiri saat ini dapat dikatakan sebagai: pemerintahan yang siap menggunakan kekuatan negara untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kesalahan pasar, pemerintah yang siap untuk menggunakan kekuatan negara atau organisasi sosial untuk mengatasi inekualitas sosial dan defisit sosial, serta pemerintahan yang siap berkomitmen untuk memperkuat demokrasi melalui berbagai bentuk mobilisasi sosial dan partisipasi politik. Kenneth Roberts, dkk. 2007. *The 'New Left' and Democratic Governance in Latin America*. Washington DC: Woodrow Wilson International Center for Scholar. Halaman 10.

⁹³ Kenneth Roberts, dkk. *Op. Cit.* Halaman 3.

2.3 Dinamika Hubungan Bilateral Amerika Serikat Dengan Brasil

Hubungan Amerika Serikat dengan Brasil sudah terjalin sejak lama yaitu sejak Amerika Serikat mengakui kemerdekaan Brasil pada 1824 dan Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Brasil.⁹⁴ Hubungan formal juga dimulai pada tahun yang sama ketika Presiden James Monroe menerima José Silvestre Rebello sebagai perwakilan diplomatik Brasil di Amerika Serikat dan sebagai gantinya pada tahun 2005 Condry Raguet diutus untuk menjadi perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Brasil.⁹⁵ Sejak hubungan formal tersebut hingga saat ini Brasil dapat dikatakan sebagai sekutu tradisional Amerika Serikat di Amerika Latin. Tindakan reaktif Amerika Serikat terhadap Brasil ini terkait dengan implementasi Doktrin Monroe untuk mencegah pengaruh Eropa di *Western Hemisphere*.

Perbedaan sejarah antara Brasil dengan negara Amerika Latin lainnya yang merupakan koloni Spanyol, menyebabkan tidak adanya ikatan sejarah antara Brasil dengan negara Amerika Latin lainnya. Pada awal kemerdekaannya dari Portugal, Brasil membutuhkan dukungan dan pengakuan dari kekuatan eksternal (Amerika Serikat) agar diakui sebagai negara merdeka. Pada awalnya hubungan Amerika Serikat dengan Brasil yang masih berbentuk monarki hanya terbatas pada hubungan dagang saja. Pengaruh Amerika Serikat di Brasil dapat dilihat ketika bentuk pemerintahan Brasil berubah menjadi republik pada 1889, konstitusi Brasil yang baru pada 1891 merupakan tiruan dari konstitusi Amerika Serikat.⁹⁶ Hubungan Amerika Serikat dengan pemerintahan baru Brasil juga masih pada hubungan perdagangan kopi, gula, dan karet. Pada 1891 Brasil dan Amerika Serikat menyepakati *reciprocity agreement* yang membebaskan Amerika Serikat dari kewajiban impor dalam perdagangan dengan Brasil.

Hubungan Amerika Serikat dengan Brasil juga semakin erat ketika pada 1930 Getúlio Vargas menjadi presiden Brasil menghentikan rezim oligarki yang

⁹⁴ Biro Hubungan Dunia Barat Pemerintah Amerika Serikat. 2015. *U.S. Relations With Brazil*. <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35640.htm> [01 November 2015]

⁹⁵ Departemen Sejarah Amerika Serikat. 2015. *A Guide To The United States' History Of Recognition, Diplomatic, And Consular Relations, By Country, Since 1776: Brazil*. <http://history.state.gov/countries/brazil> [01 November 2015]

⁹⁶ Teresa A. Meade. 2010. *A Brief History of Brazil*. New York: Facts on File. Halaman 92.

terjadi pada republik sebelumnya. Meskipun Presiden Vargas adalah seorang diktator, tapi pemerintahannya tetap pro-Amerika. Pada masa pemerintahannya hingga 1945, Brasil menjadi sekutu terdekat Amerika Serikat di Amerika Latin. *The Great Depression* yang terjadi pada 1930-an menjadikan Presiden Vargas memutuskan untuk membuka pasarnya bagi investasi Amerika Serikat untuk mendorong kebangkitan ekonomi Brasil. Pembukaan terhadap investasi Amerika Serikat ini kemudian mendorong munculnya industri-industri domestik yang merupakan perusahaan satelit dari perusahaan Amerika Serikat.⁹⁷ Keputusan Presiden Vargas yang membuka pasarnya bagi investasi asing ini menyebabkan perekonomian Brasil sangat dependen terhadap aliran investasi asing dan ekspor kopi, gula, dan karet.

Pada masa Perang Dunia II, Brasil merupakan sekutu terdekat Amerika Serikat di Amerika Latin. Pada 1941 Brasil mengizinkan Amerika Serikat untuk membangun landasan militer di Belém, Natal dan Recife.⁹⁸ Pada tahun yang sama Brasil juga menjadi negara pertama di Amerika Latin yang menyatakan perang terhadap Jerman sebagai bentuk dukungan terhadap Amerika Serikat. Tindakan Brasil ini hasil dari pengaruh Amerika Serikat yang menjanjikan posisi permanen di Dewan Keamanan PBB. Brasil juga menjadi prioritas bagi bantuan yang diberikan Amerika Serikat di Amerika Latin. 70% bantuan *Lend-Lease* yang diberikan pada Amerika Latin, diterima oleh Brasil. Brasil juga dapat mengoperasikan beberapa lembaga negaranya karena implementasi Bank Ekspor-Import Amerika Serikat. Melalui *Cooke Mission* pada 1942 Amerika Serikat juga berusaha mendorong Brasil untuk melakukan industrialisasi dan privatisasi dalam agenda ekonominya.⁹⁹

Meskipun demikian banyak keputusan ekonomi Vargas yang menyebabkan negara melakukan intervensi dalam urusan ekonomi. Hal ini yang menyebabkan Amerika Serikat memberikan dukungan terhadap proses

⁹⁷ Guillermo A. O'Donnell. *Op. Cit.* Halaman 55.

⁹⁸ Leslie Bethell. 2008. *The Cambridge History of Latin America – Volume IX: Brazil Since 1930*. New York: Cambridge University Press. Halaman 67.

⁹⁹ Werner Baer. 2001. *The Brazilian Economy: Growth and Development*. Connecticut: Greenwood Publishing Group. Halaman 42.

demokratisasi Brasil dalam pemilu 1945 yang berakhir dengan kekalahan Vargas. Pada masa demokrasi terbatas dari tahun 1945-1964 berbagai rezim yang berkuasa di Brasil tetap menunjukkan kecenderungannya untuk pro-Amerika. Aliran investasi Amerika Serikat ke Brasil semakin tinggi, dan ekspor Brasil ke Amerika Serikat semakin banyak. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Brasil selama masa demokratisasi ini adalah pertumbuhan ekonomi vertikal dimana pertumbuhan ekonomi tersebut sangat bergantung terhadap modal dan transfer teknologi asing.¹⁰⁰

Adapun rezim yang anti-Amerika seperti rezim Presiden Gaoulart (1961-1964) akhirnya berhasil digulingkan kudeta militer yang didukung Amerika Serikat pada 1964.¹⁰¹ Goulart yang memang anti-Amerika banyak melakukan tindakan yang mendukung Kuba dan komunisme. *Central Intelligence Agency* (CIA) digunakan oleh Amerika Serikat untuk mendestabilisasi rezim Goulart dengan membiayai kelompok oposisi anti-Goulart. Ketika akhirnya terjadi kudeta militer pada 1964, Presiden Johnson disebutkan menyetujui pelaksanaan operasi *Brother Sam* untuk memberikan dukungan dalam kudeta tersebut.¹⁰² Tujuan dari operasi tersebut sebenarnya adalah untuk melawan kelompok kiri di Brasil.

Kudeta militer pada 1964 menandai berakhirnya rezim demokrasi dan dimulainya rezim birokratik-otoriter di Brasil. Rezim birokratik-otoriter di Brasil menempatkan semua kekuasaan pemerintahan berada di tangan militer. Pada masa ini terkait dengan implementasi *containment policy*, Amerika Serikat memberikan dukungan terhadap rezim militer meskipun harus bertentangan dengan upaya promosi demokrasi yang sering dilakukan.

Amerika Serikat melihat bahwa mendukung rezim otoriter di Brasil dan Amerika Latin lainnya merupakan pilihan yang lebih menguntungkan dari pada harus ada negara yang menjadi poros komunisme di Amerika Latin selain Kuba. Hubungan Amerika Serikat dengan Brasil selama berkuasanya rezim militer ini merupakan hubungan terdekat di antara dua negara, terutama ketika Henry Kissinger menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Bahkan pada tahun 1975

¹⁰⁰ Guillermo A. O'Donnell. *Op. Cit.* Halaman 60.

¹⁰¹ Leslie Bethell. *Op. Cit.* Halaman 152-153.

¹⁰² Leslie Bethell. *Op. Cit.* Halaman 157-158.

disepakati *memorandum of understanding* (MoU) untuk meninstitutionalisasi hubungan Amerika Serikat dengan Brasil.¹⁰³ Tetapi ketika Presiden Carter berkuasa, hubungan tersebut sempat mengalami ketegangan karena perhatian Presiden Carter terhadap penegakan isu HAM. Pelanggaran HAM rezim militer di Brasil menjadi sorotan kritik Presiden Carter dan secara otomatis mengakhiri MoU yang pernah disepakati.

Setelah berakhirnya rezim militer pada 1985 meninggalkan inflasi yang begitu tinggi bagi rezim demokrasi yang baru berkuasa. Selama rezim militer berkuasa di Brasil, dependensi Brasil terhadap modal asing semakin tinggi. Pada tahun 1970-1980an hutang luar negeri Brasil merupakan yang tertinggi di Amerika Latin dengan jumlah yang mencapai sekitar US\$ 100 milyar. Krisis minyak 1974 serta *debt crisis* yang menimpa Amerika Latin pada 1980-an menyebabkan resesi ekonomi di Brasil dan memburuknya ekspor Brasil.

Brasil yang sangat tergantung pada ekspor serta aliran investasi asing pada pertumbuhan ekonominya akhirnya bergantung pada pinjaman IMF untuk membayar hutang luar negeri serta untuk menjalankan perekonomiannya.¹⁰⁴ Keputusan ini secara otomatis menyebabkan Brasil harus menerapkan serangkaian SAP agar mendapatkan pinjaman dari IMF. Pada saat yang sama, Brasil mulai menjalin kerjasama perdagangan dengan negara-negara Eropa dan Asia. Ekspor Brasil ke Eropa dan Jepang dinilai sama berharganya dengan ekspor Brasil ke Amerika Serikat.

Berakhirnya kekuasaan rezim militer di Brasil pada 1985 juga terkait dengan berakhirnya dukungan Amerika Serikat terhadap rezim otoriter di Amerika Latin. Dengan Perang Dingin menuju akhir, Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan untuk mendukung rezim militer dan kembali mempromosikan demokrasi. Pada demokratisasi Brasil pada 1985, Amerika Serikat tidak berperan apapun. Amerika Serikat hanya mengadakan pembicaraan dengan kelompok-kelompok oposisi di Brasil.¹⁰⁵ Agenda pertama rezim demokrasi yang baru berkuasa di Brasil adalah menyelesaikan permasalahan

¹⁰³ Leslie Bethell. *Op. Cit.* Halaman 208.

¹⁰⁴ Riordan Roett. 2010. *The New Brazil*. Virginia: R.R. Donelley. Halaman 76.

¹⁰⁵ Leslie Bethell. *Op. Cit.* Halaman 200.

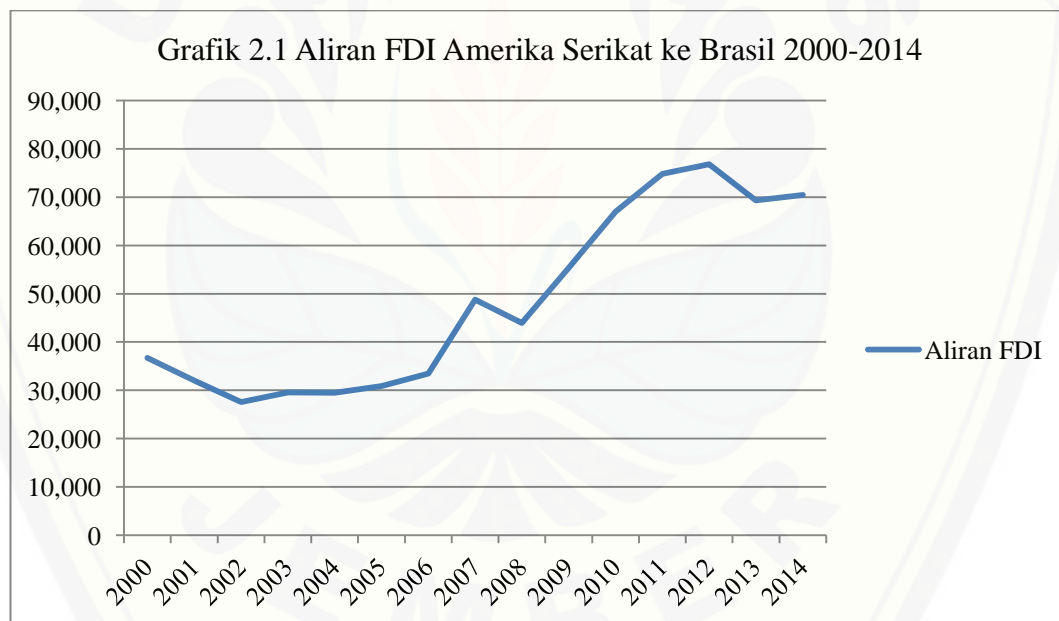
ekonomi yang buruk. Pada saat yang sama dengan rezim demokrasi baru di Brasil, Perang Dingin berakhir dan mulailah promosi implementasi *Washington Concensus* oleh Amerika Serikat dan Inggris. Brasil secara otomatis yang masih mengalami inflasi hingga 50% dan bergantung pada pinjaman IMF, ikut menerapkan program dalam *Washington Concensus* untuk terlepas dari permasalahan ekonominya.

Ekonomi Brasil berhasil tumbuh secara pelan-pelan meskipun dengan tingkat inflasi yang masih tinggi. Meskipun Brasil dapat tumbuh, tetapi pinjaman Brasil ke IMF dan IADB untuk mengatasi krisis semakin banyak. Hingga akhirnya Brasil melakukan privatisasi besar-besaran pada masa pemerintahan Presiden Cardoso untuk menarik aliran investasi asing ke Brasil. Pada masa pemerintahannya, Presiden Cardoso berhasil menurunkan tingkat inflasi hingga hanya menjadi 1-2% saja. Keputusan Presiden Cardoso yang memfokuskan pada perbaikan makroekonomi seperti stabilitas moneter dan kewajiban fiskal banyak didukung oleh Amerika Serikat dan IMF.

Fenomena *Pink Tide* yang terjadi di Amerika Latin juga terjadi di Brasil dengan berkuasanya Presiden Lula pada 2004. Hubungan Amerika Serikat dengan Brasil semasa pemerintahan Presiden Lula tidak dapat dikatakan dekat tapi juga tidak bertentangan. Presiden Lula tetap meneruskan perbaikan makroekonomi seperti Presiden Cardoso. Presiden Lula juga berpendapat bahwa aliran FDI sangat dibutuhkan dalam pembangunan Brasil. Hasilnya aliran FDI terbesar dalam sejarah Brasil terjadi dalam era Presiden Lula. Brasil juga tetap menerapkan pasar bebas dan justru mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempermudah pelaksanaan ekspor-impor. Akan tetapi di lain sisi, Presiden Lula juga mengeluarkan berbagai kebijakan pro-kiri seperti subsidi untuk mengatasi kemiskinan dan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial Brasil.

Tabel 2.1 Aliran FDI dari Amerika Serikat ke Brasil

No.	Tahun	(US\$ juta)
1.	2000	36,717
2.	2001	32,027
3.	2002	27,598
4.	2003	29,553
5.	2004	29,485
6.	2005	30,882
7.	2006	33,504
8.	2007	48,807
9.	2008	43,953
10.	2009	55,380
11.	2010	66,963
12.	2011	74,840
13.	2012	76,821
14.	2013	69,335
15.	2014	70,457



Sumber: Biro Ekonomi dan Analisis Amerika Serikat, "Balance of Payments and Direct Investment Position"

Selama Presiden Lula menjabat, Brasil mencoba untuk memperluas kerjasamanya ekonominya dengan negara-negara berkembang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh pelambatan pertumbuhan ekonomi Brasil karena perlambatan ekonomi Amerika Serikat karena serangan teroris 11 September 2001. Brasil mencoba mengurangi dependensi Brasil terhadap Amerika Serikat yang pada saat

yang sama memprioritaskan kebijakannya di Timur Tengah. Brasil mencoba menciptakan stabilitas ekonomi kawasan dengan menjalin hubungan dekat dengan Argentina dan Venezuela untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi di Amerika Latin. Tindakan ini sedikit bertentangan dengan Amerika Serikat yang sempat mengalienasi Venezuela karena keputusannya dalam menasionalisasi perusahaan minyaknya. Meskipun demikian Brasil tetap pada keputusannya dengan mencoba untuk berhubungan baik dengan Amerika Serikat dan Venezuela.

Hubungan Amerika Serikat dengan Brasil kembali menguat setelah diangkatnya Dilma Rouseff sebagai presiden Brasil. Berbagai keputusan yang diambil oleh Presiden Dilma sejak diangkat pada 2013 lebih memprioritaskan keuntungan bagi Brasil. Oleh karena itu, Presiden Dilma kembali memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat yang dinilai dapat membawa keuntungan ekonomi dan politik bagi Brasil. Meskipun hubungan Amerika Serikat dengan Brasil sempat mengalami ketegangan setelah kasus penyadapan Presiden Dilma, tetapi hubungan bilateral kedua negara kembali membaik setelah Presiden Dilma memberikan maaf bagi tindakan tersebut.¹⁰⁶

2.4 Kondisi Dalam Negeri Brasil

Setelah mengalami berbagai perubahan rezim pemerintahan dan berbagai fluktuasi ekonomi, Brasil akhirnya mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi di dunia internasional saat ini. Saat ini Brasil merupakan negara dengan kekuatan ekonomi nomor 7 dunia dengan GDP sebesar US\$ 2.375,2 milyar.¹⁰⁷ Sejak pemerintahan Presiden Cardoso, Brasil berhasil mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi positif dan stabil yaitu rata-rata 2.3% setiap tahunnya. Bahkan dengan pertumbuhan stabil ekonomi Brasil, Bank Dunia memprediksi bahwa pada akhir tahun 2015 ini Brasil akan menggeser posisi Inggris sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-5 di dunia. Pertumbuhan ekonomi dan GDP di Brasil yang stabil tersebut juga berdampak pada peningkatan pendapatan

¹⁰⁶ Ricardo Sennes. 2015. *U.S. – Brasil Realltion: A New Beginning?*. <http://www.atlanticcouncil.org/usbrazil/> [3 November 2015]

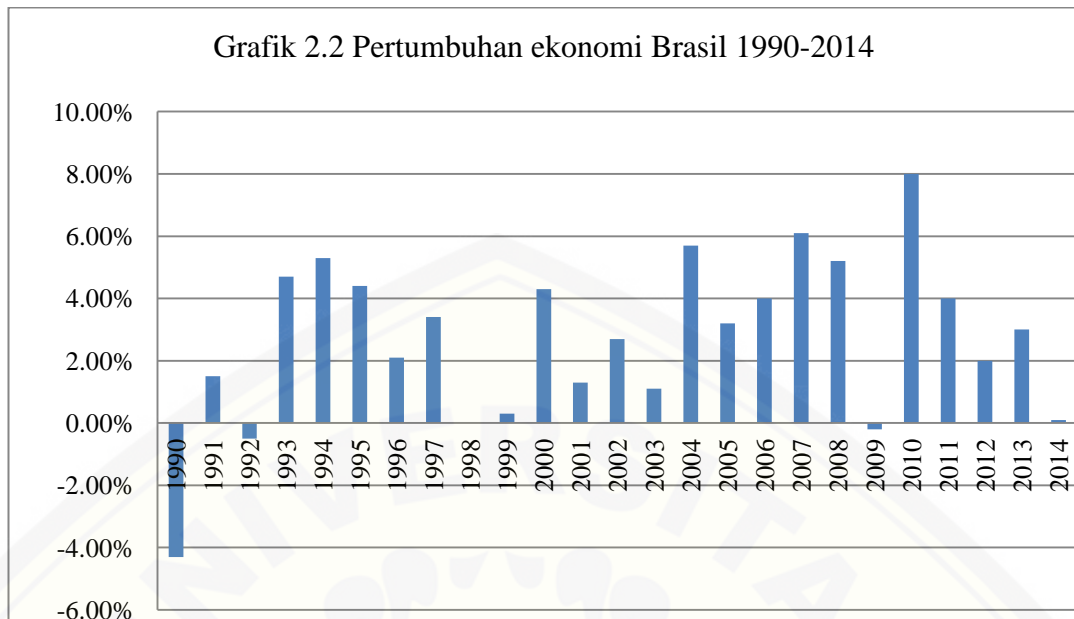
¹⁰⁷ Bank Dunia. 2015. *World Development Indicators: Size of the economy*. <http://wdi.worldbank.org/table/1.1>

perkapita di Brasil. Pada tahun 2014 tercatat pendapat perkapita di Brasil sebesar US\$ 11.530. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh PBB, pertumbuhan ekonomi Brasil dapat diperhatikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Brasil dari 1990-2014

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
1.	1990	-4.3%
2.	1991	1.5%
3.	1992	-0.5%
4.	1993	4.7%
5.	1994	5.3%
6.	1995	4.4%
7.	1996	2.1%
8.	1997	3.4%
9.	1998	0.0%
10.	1999	0.3%
11.	2000	4.3%
12.	2001	1.3%
13.	2002	2.7%
14.	2003	1.1%
15.	2004	5.7%
16.	2005	3.2%
17.	2006	4.0%
18.	2007	6.1%
19.	2008	5.2%
20.	2009	-0.2%
21.	2010	8.0%
22.	2011	4.0%
23.	2012	2.0%
24.	2013	3.0%
25.	2014	0.1%

Sumber: Data dikumpulkan dari data Bank Dunia dan IndexMundi.com

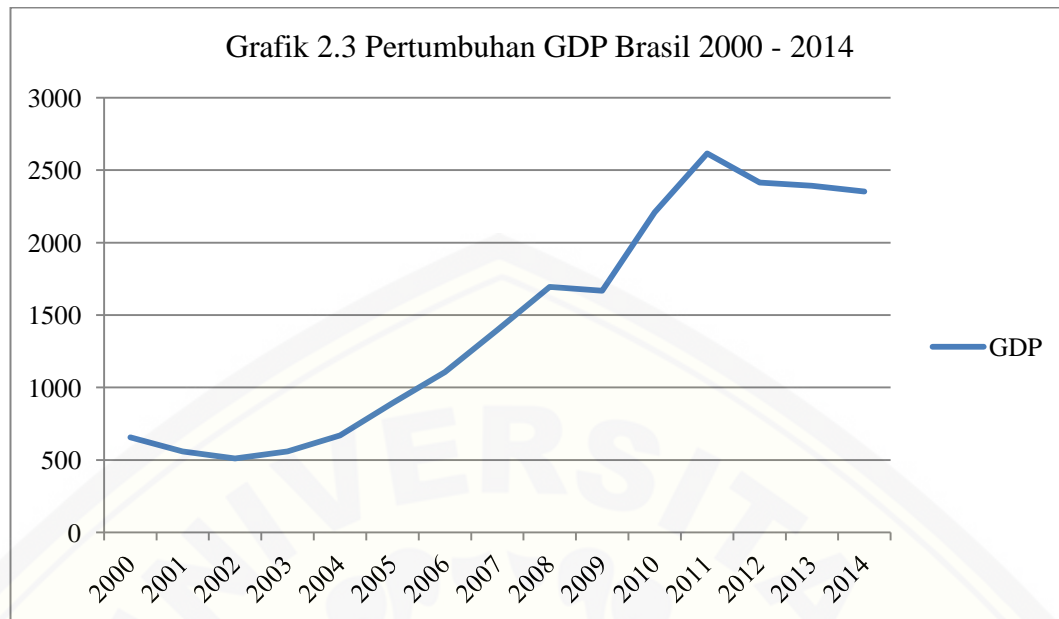


Sumber: Data dikumpulkan dari website resmi Bank Dunia dan IndexMundi

Tabel 2.3 Pertumbuhan GDP Brasil 2000 - 2014

No	Tahun	Tingkat Pertumbuhan GDP (USD\$ milyar)
1.	2000	657.25
2.	2001	560.22
3.	2002	510.62
4.	2003	558.92
5.	2004	669.62
6.	2005	892.12
7.	2006	1.107.79
8.	2007	1.395.97
9.	2008	1.694.62
10.	2009	1.666.77
11.	2010	2.209.39
12.	2011	2.615.19
13.	2012	2.413.17
14.	2013	2.392.14
15.	2014	2.353.03

Sumber: Data dikumpulkan dari website resmi Bank Dunia dan IndexMundi



Sumber: Data dikumpulkan dari website resmi Bank Dunia dan IndexMundi

Deregulasi yang dilakukan semasa pemerintahan Presiden Lula dapat dikatakan sebagai kunci dari pertumbuhan ekonomi Brasil yang stabil. Deregulasi ini mendorong terjadinya *expor boom* sejak 2003. Volume ekspor Brasil berhasil lebih tinggi dari pada impor Brasil yang menandakan keuntungan dalam *trade balance* Brasil.¹⁰⁸ Secara keseluruhan ekspor Brasil menyumbang 30% dari GDP Brasil dengan beberapa komoditi unggulannya adalah: biji besi (\$33.4 milyar); kedelai (\$30 milyar); minyak mentah (\$13.2 milyar); gula (\$12.4 milyar); mesin kapal (\$7.85 milyar); jagung (\$6.52 milyar); kopi (\$5.09 milyar); daging (\$7.26 milyar); dan tembakau (\$2.88 milyar).¹⁰⁹

Dari berbagai komoditi unggulan ekspor Brasil, produk agrikultur menyumbang sekitar 39% ekspor Brasil yang menjadikan Brasil sebagai negara pengekspor produk agrikultur ketiga di dunia.¹¹⁰ Negara tujuan dari ekspor Brasil adalah Cina (19% setara \$ 46.1 milyar); Amerika Serikat (10% setara \$ 25.2 milyar); Argentina (7.8% setara US\$ 19.3 milyar). Sementara itu negara asal impor Brasil adalah Cina (15% setara US\$ 36.8 milyar); Amerika Serikat (15%

¹⁰⁸ Lebih lanjut baca Riordan Roett. 2010. *The New Brazil*. Virginia: R.R. Donelley.

¹⁰⁹ The Observatory of Economic Complexity (OEC). 2015. *Brazil*. <http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/bra/> [4 November 2015]

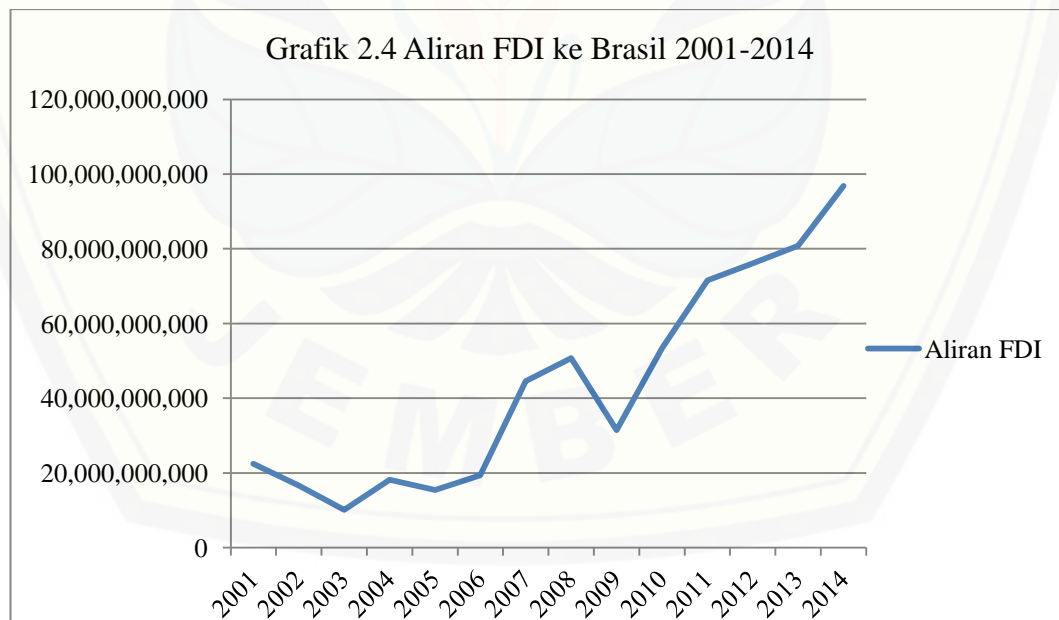
¹¹⁰ WTO. 2015. *Brazil*. <http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=F&Country=BR> [4 November 2015]

setara US\$ 36.1 milyar); dan Argentina (6.9% setara US\$ 16.3 milyar). Deregulasi yang dilakukan semasa Presiden Lula ini juga berhasil meningkatkan aliran FDI secara signifikan ke dalam Brasil (grafik 2.2) dan menjadikan Brasil sebagai negara penerima FDI terbesar ketiga di dunia.

Tabel 2.4 Aliran FDI ke Brasil

No.	Tahun	Aliran FDI ke Brasil (US\$ milyar)
1.	2001	22,457,353,372
2.	2002	16,590,204,193
3.	2003	10,143,524,671
4.	2004	18,165,693,855
5.	2005	15,459,981,604
6.	2006	19,378,093,068
7.	2007	44,579,492,464
8.	2008	50,716,402,711
9.	2009	31,480,932,200
10.	2010	53,344,632,547
11.	2011	71,538,657,409
12.	2012	76,110,663,189
13.	2013	80,842,996,727
14.	2014	96,851,173,598

Sumber: Data dikumpulkan dari website resmi Bank Dunia



Meskipun dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil serta aliran investasi asing yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, hingga saat ini kemiskinan dan *human deprivation* masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah Brasil. Pada sensus terakhir tahun 2013

tercatat masih terdapat 8.9% dari total populasi Brasil atau sekitar 18.3 juta penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan nasional Brasil. Tingkat kemiskinan di Brasil tersebut memang sudah banyak berkurang dari pertama kali dilaporkan Bank Dunia pada 1990 yaitu sebesar 16.2% atau sekitar 34 juta penduduk. Akan tetapi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, angka tersebut seharusnya jauh lebih sedikit.¹¹¹

Tabel 2.5 Presentase Tingkat Kemiskinan di Brasil 1990-2015

No	Tahun	Persentase di bawah US\$ 1.25	Persentase di bawah <i>National Poverty Line</i> ¹¹²
1	1990	16.2%	-
2	1991	-	-
3	1992	16.7%	-
4	1993	15.9%	-
5	1994	-	-
6	1995	9.9%	-
7	1996	11.2%	-
8	1997	10.9%	-
9	1998	9.6%	-
10	1999	9.9%	-
11	2000	-	-
12	2001	10.2%	24.7%
13	2002	8.9%	23.3%
14	2003	9.6%	24.9%
15	2004	8.1%	22.4%
16	2005	7.2%	21.0%
17	2006	5.9%	17.3%
18	2007	5.8%	16.1%
19	2008	4.9%	14.1%
20	2009	4.7%	13.3%
21	2010	-	-
22	2011	4.5%	11.1%
23	2012	3.8%	9.0%
24	2013	-	8.9%

Sumber: Data dikumpulkan dari website resmi Divisi Statistik PBB
<http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx>

Jumlah penduduk miskin di Brasil pada umumnya menempati daerah pedesaan dan pinggiran kota – kota besar (di daerah kumuh yang disebut sebagai *favela*). Dari total populasi Brasil, terdapat sekitar 19% penduduk Brasil yang

¹¹¹ Bank Dunia. *Loc. Cit.*

¹¹² Brasil tidak memiliki angka *National Poverty Line* yang resmi. Akan tetapi standar terendah pemberian *Bolsa Familia* yaitu sebesar 70 reais per-individu yang dijadikan pengukuran ini. Data diperoleh dari website resmi PBB untuk MDGs.

tinggal di daerah pedesaan atau sekitar 38 juta penduduk, dan dari angka tersebut kemiskinan mempengaruhi sekitar 51% populasi pedesaan atau sekitar 19 juta penduduk.¹¹³ Pada sensus tahun 2010 juga terdapat sekitar 10% penduduk Brasil yang tinggal di *favela* atau sekitar 20 juta penduduk.¹¹⁴

Wilayah Utara dan Timur Laut Brasil merupakan konsentrasi penduduk miskin di Brasil. Wilayah Utara dan Timur Laut Brasil merupakan daerah cekungan Amazon yang hampir seluas setengah dari wilayah negara Brasil dan memiliki iklim *arid* dan *semi arid*. Meskipun wilayah ini mayoritas merupakan wilayah hutan tropis, tetapi bencana kekeringan dan banjir melanda wilayah ini tiap tahun yang menjadikan wilayah ini rawan.¹¹⁵



Gambar 2.4 Kawasan *semi arid* di wilayah Utara dan Timur Laut Brasil
Sumber: BBC.com

Wilayah Utara dan Timur Laut Brasil merupakan wilayah yang terisolasi dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Brasil. Penduduk yang tinggal di

¹¹³ Ruralpovertyportal.org adalah sebuah situs yang dibentuk oleh *International Fund for Agriculture Development* (IFAD) sebagai media untuk berbagi informasi bagi orang-orang miskin, pembuat kebijakan, penyumbang dana, peneliti, dan NGO serta berbagai partner pembangunan lainnya agar dapat membantu mengurangi kemiskinan. *Rural Poverty in Brazil*. 2015. <http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/brazil> [2 September 2015]

¹¹⁴ BBC. 2014. *Favela life: Rio's city within a city*. <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-27635554> [2 September 2015]

¹¹⁵ Harry Greenbaum. 2003. *Brazil*. Philadelphia: Chelsea House Publisher. Halaman 20-26.

wilayah ini pada umumnya merupakan petani – petani kecil (*agriculture family*) yang hanya memiliki tanah sedikit atau para pekerja pada pertanian kecil dengan 70% penghasilannya datang dari sektor pertanian. Bukan hanya itu di daerah ini juga banyak terdapat keluarga yang tidak memiliki lahan pertanian dan bekerja pada usaha lokal kecil. Kepemilikan lahan di daerah ini sama seperti pola kepemilikan lahan di Brasil pada umumnya, yaitu para tuan tanah yang bertahan secara turun-temurun dari jaman kolonial yang menguasai mayoritas lahan. Oleh karena itu para penduduk di wilayah ini yang terisolasi dari pembangunan ekonomi masih bergantung pada sektor agrikultur sepenuhnya.

Pada wilayah Utara dan Timur Laut Brasil ini bahkan jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrim hingga mencapai 83.6% dan 90.3% merupakan petani kecil.¹¹⁶ Di daerah ini selain kondisi ekonomi yang memang sulit, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan air bersih juga sulit. Wilayah ini tidak hanya terisolasi secara ekonomi, wilayah ini juga terisolasi secara pelayanan publiknya, bahkan akses transportasi menuju wilayah ini sulit untuk ditempuh.

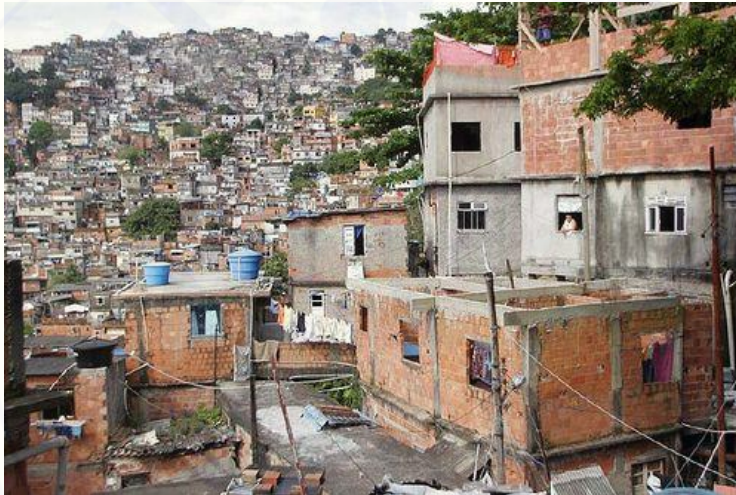


Gambar 2.5 Akses jalan menuju wilayah Utara dan Timur Laut Brasil

Sumber: <http://www.mirantesmt.com/>

¹¹⁶ The World Bank. 2003. *Rural Poverty Alleviation in Brazil: Toward an Integrated Strategy*. Washington, D.C. Halaman 2.

Selain di wilayah Utara dan Timur Laut Brasil, di daerah pinggir kota – kota besar juga merupakan konsentrasi penduduk miskin. Pada umumnya penduduk miskin yang ada di pinggiran kota ini tinggal di daerah yang dinamakan *favela*. *Favela* yang berada di São Paulo dan Rio de Janeiro merupakan komunitas *favela* terbanyak di Brasil. Para penduduk yang tinggal di *favela* ini juga kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan pelayanan publik lainnya. Hal ini karena para penduduk yang tinggal di daerah ini tinggal di pemukiman ilegal yang bergantung sepenuhnya pada pengedar narkoba dan mafia-mafia kriminal.¹¹⁷ Oleh karena itu kemiskinan dan pelanggaran HAM masih sering terjadi pada penduduk yang tinggal di daerah ini.



Gambar 2.6
Favela di São Paulo
Sumber:
<http://veronicabielsa.files.wordpress.com>



Gambar 2.7
Favela di Rio de Janeiro
Sumber: The Guardian.com

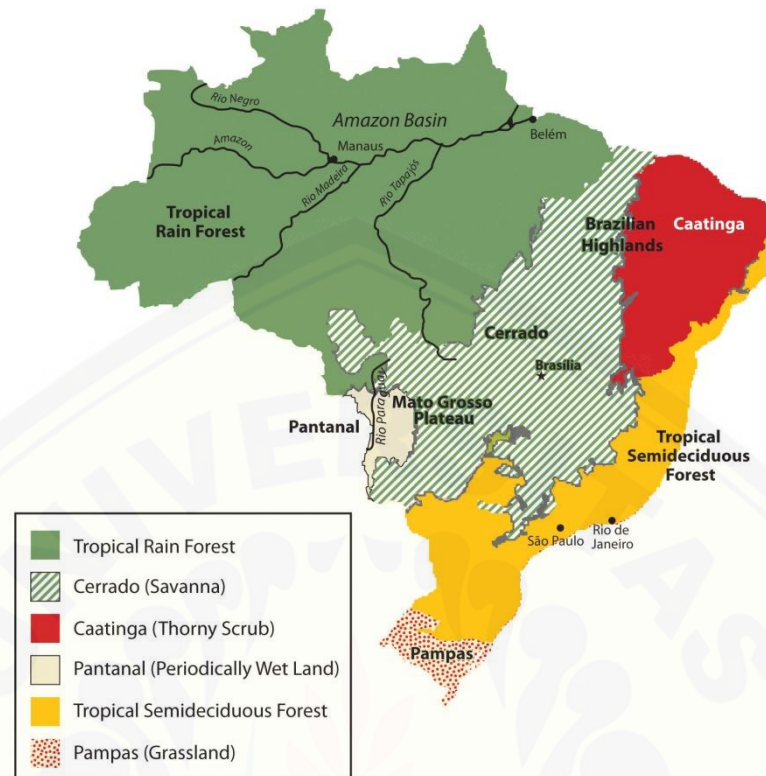
¹¹⁷ The Guardian. 2015. *Guns, drugs and banditos: inside the favela too violent for Rio's armed police*. <http://www.theguardian.com/world/2015/jan/03/guns-drugs-teen-gangsters-rio-favela-police> [8 November 2015]

Pertumbuhan ekonomi dan GDP yang stabil selama beberapa tahun di Brasil masih belum dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan *human deprivation* ini. Bahkan dapat dikatakan pertumbuhan tersebut tidak berdampak sama sekali terhadap kemiskinan di Brasil. Bank Dunia melaporkan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi dan GDP tersebut tidak berdampak pada penghasilan dari 10% penduduk termiskin di Brasil. Pertumbuhan ekonomi dan GDP yang terjadi di Brasil hanya memberi dampak terhadap golongan menengah keatas saja.

Sementara itu pada penduduk miskin yang berada di sekitar garis kemiskinan tidak berubah sama sekali. Hal ini jelas menunjukkan bahwa inekualitas di Brasil sangat tinggi. Angka inekualitas di Brasil memang tinggi. Bahkan angka inekualitas di Brasil lebih tinggi dari pada di tingkat global. 60% alokasi GDP Brasil bukan untuk warga Brasil yang masih mengalami kemiskinan ataupun kelaparan, tetapi 60% GDP Brasil menjadi alokasi bagi 20% golongan elit Brasil. Hanya 3.3% dari GDP Brasil yang dialokasikan pada 20% warga negara Brasil yang masih mengalami masalah kemiskinan dan kelaparan.¹¹⁸

Penyebaran konsentrasi penduduk miskin di Brasil juga dapat dihubungkan dengan inekualitas di Brasil. Wilayah Utara dan Timur Laut Brasil dengan mayoritas penduduk miskinnya dapat dikatakan sebagai wilayah yang kurang diperhatikan oleh pemerintah Brasil. Dengan kondisi topografi yang sulit, justru pemerintah Brasil belum melakukan suatu tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi tersebut. Sektor agrikultur di wilayah tersebut tidak memberikan hasil yang banyak selain karena memang terdiri dari petani – petani kecil, di wilayah tersebut juga tidak terdapat saluran irigasi. Pada umumnya petani di daerah ini bergantung pada hujan untuk mengairi lahannya. Transportasi yang sulit juga menyebabkan mobilitas menjadi sulit, sehingga para petani di daerah ini hanya menjual produk hasil pertaniannya di wilayah lokal atau untuk konsumsi sendiri.

¹¹⁸ Website Resmi FAO. 2014. *Brazil: The hunger of the missed meal*. <http://www.fao.org/english/newsroom/news/2003/13320-en.html> [2 Januari 2014]



Gambar 2.8 Peta Topologi Brasil

Sumber: <http://2012books.lardbucket.org/>

Sementara itu kondisi yang sangat berbeda dapat dilihat di wilayah Selatan dan Tenggara Brasil. Wilayah ini merupakan pusat pembangunan yang dilakukan di Brasil. Berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah Brasil pada umumnya dilakukan di wilayah ini. Wilayah Selatan dan Tenggara Brasil merupakan wilayah dataran tinggi yang dijadikan pusat pembangunan serta pusat aktivitas ekonomi dan politik. Berbagai program pembangunan sejak jaman Presiden Vargas dipusatkan di wilayah Selatan dan Tenggara Brasil.

Berbagai kota utama Brasil seperti São Paolo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul dan Minas Gerais yang menyumbang mayoritas GDP Brasil dari sektor industrinya berada di daerah ini. Berbagai reformasi industrialisasi dilakukan di wilayah ini dan salah satunya adalah pada sektor agrikultur. Komoditi agrikultur yang memang menjadi andalan ekspor Brasil sejak jaman kolonialisme semakin dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Brasil. Pertanian berbasis ekspor dikembangkan untuk memperkuat perekonomian Brasil.

Ekspor produk – produk agrikultur merupakan salah satu pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi dan GDP Brasil yang stabil. Sebagai negara yang terletak di wilayah tropis, iklim dan tanah yang subur jelas memberikan keuntungan pada Brasil untuk menghasilkan produk – produk agrikultur yang mampu bersaing di pasar internasional. Dengan didukung oleh faktor alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Brasil, Brasil mampu menjadi negara pengeksport produk agrikultur terbesar ketiga di dunia setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat. 39% ekspor Brasil merupakan produk agrikultur yang senilai dengan US\$ 96 milyar. Kedelai, kopi, dan jagung merupakan produk agrikultur yang memberikan kontribusi paling banyak terhadap ekspor Brasil.

Akan tetapi dibalik semua itu, Brasil juga masih mengalami permasalahan kelaparan yang cukup serius. Kelaparan yang terjadi di Brasil pada umumnya terjadi pada penduduk miskin Brasil (tabel 2.4). Kelaparan yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh ketergantungan masyarakat Brasil terhadap sektor pertanian. Ketika sektor pertanian mengalami kegagalan, maka tidak ada lagi pemasukan bagi keluarga – keluarga miskin ini. Perempuan dan anak – anak yang menjadi korban yang paling dirugikan dalam hal ini. Hal ini karena pertanian kecil di Brasil merupakan tanggung jawab perempuan, sementara para laki-laki di Brasil bekerja di kota – kota besar atau menjadi buruh di lahan pertanian yang lebih besar.

Tabel 2.6 Tingkat Kelaparan di Brasil 1991-2014

No.	Tahun	Presentase	Populasi (juta)
1.	1991	14.8	22.6
2.	1992	14.3	22.1
3.	1993	14.3	22.5
4.	1994	14.1	22.5
5.	1995	13.8	22.4
6.	1996	13.6	22.3
7.	1997	13.3	22.1
8.	1998	13.1	22.2
9.	1999	12.9	22.1
10.	2000	12.3	21.4
11.	2001	11.2	19.9
12.	2002	9.6	17.2
13.	2003	7.8	14.1
14.	2004	6.1	11.1
15.	2005	5.0	10.3
16.	2006	5.0	10.3
17.	2006	5.0	10.2
18.	2007	5.0	10.1
19.	2008	5.0	10.1
20.	2009	5.0	10.3
21.	2010	5.0	10.1
22.	2011	5.0	10
23.	2012	5.0	10
24.	2013	5.0	10
25.	2014	5.0	10

Sumber: Data dikumpulkan dari website resmi Divisi Statistik PBB
<http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx>

Bagi penduduk miskin yang tinggal di pinggiran kota-kota besar kondisinya tidak jauh berbeda. Kemiskinan, kelaparan dan berbagai bentuk *human deprivation* masih tinggi. Bagi kebanyakan keluarga yang tinggal di *favela* pekerjaan utama mereka bukan menjadi petani, melainkan sebagai pekerja paruh waktu ataupun pekerja domestik lainnya. Para penghuni *favela* ini tidak dapat mengakses sarana publik yang disediakan negara karena status mereka yang tinggal di lingkungan ilegal.

Mayoritas penduduk *favela* bergantung pada kelompok-kelompok mafia yang menguasai daerah tersebut atau bergantung pada pengedar narkoba yang dapat menyediakan sarana tersebut pada mereka. *Food insecurity* yang dialami oleh para penduduk *favela* ini berbeda dengan yang dialami oleh penduduk miskin

di wilayah pedesaan. Para penduduk di daerah *favela* ini tidak mengalami kelaparan, tetapi makanan utama dari para penduduk ini adalah *farinha*.¹¹⁹ *Farinha* adalah sejenis tepung yang berasal dari akar tumbuhan *manioc*, di keluarga yang lebih makmur tepung ini digunakan untuk makanan hewan ternak.

Permasalahan kemiskinan yang belum terselesaikan tersebut akhirnya juga menimbulkan *human deprivation* pada bidang yang lain. Keterbatasan penghasilan akhirnya menyebabkan angka buta huruf yang masih cukup tinggi di Brasil, sanitasi yang buruk, harapan hidup yang rendah, dan pengangguran. Bukan hanya itu tingkat kemiskinan juga mendorong tingginya angka kriminalitas dan angka bunuh diri yang terjadi di Brasil. Beberapa kota besar di Brasil bahkan dinyatakan sebagai kota paling tidak aman di dunia. Selain itu tingginya angka kemiskinan di Brasil juga mendorong banyaknya pekerja anak di bawah umur yang harus membantu keluarganya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

¹¹⁹ The Guardian. 2013. *Brazil's Bolsa Família scheme marks a decade of pioneering poverty relief*. <http://www.theguardian.com/global-development/2013/dec/17/brazil-bolsa-familia-decade-anniversary-poverty-relief> [8 November 2015]

BAB 3. IMPLEMENTASI MDG1: *ERADICATING EXTREME POVERTY AND HUNGER* SEBAGAI SOLUSI MENGATASI KEMISKINAN DAN KELAPARAN EKSTREM

Sebelum disepakatinya MDGs, pada tahun 1990-an terdapat permasalahan kemiskinan yang parah dimana-mana, hampir 36.4% jumlah penduduk dunia berada di bawah garis kemiskinan dengan individu yang hidup dibawah US\$ 1 perhari sejumlah 1.923 milyar jiwa.¹²⁰ Kegagalan model pembangunan berbasis *growth* yang dilakukan selama tahun 1980-an dengan SAP mendorong berbagai aktor internasional untuk merumuskan suatu strategi yang dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan *human deprivation* yang terjadi di dunia. MDGs yang disepakati setelah diadakannya *Millennium Summit* pada tahun 2000 dipercaya merupakan strategi yang dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di dunia dengan pembangunan berbasis manusia. Oleh karena itu sejak disepakati, berbagai negara di dunia berusaha mengimplementasikan MDGs untuk mengatasi berbagai permasalahan kemiskinan dan *human deprivation* di negaranya. Brasil juga mengimplementasikan MDGs sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kelaparan di negaranya. Berbagai kebijakan domestik juga diterapkan sebagai upaya untuk mencapai target yang terdapat dalam MDGs.

3.1 Konstruksi MDG1 Untuk Mengatasi Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem di Dunia

Kemiskinan telah menjadi permasalahan sejak lama di dunia internasional. *The Lost Decade* yang terjadi pada 1980-an dan berbagai dampak Perang Dingin di negara-negara berkembang telah menyebabkan kemiskinan dan ketidaksetaraan semakin parah. Akan tetapi wacana untuk mengatasi kemiskinan baru muncul pada awal 1990-an ketika Perang Dingin telah selesai. Setelah Perang Dingin

¹²⁰ World Bank. 2014. <http://povertydata.worldbank.org/poverty/home/> [19 Desember 2014]

selesai dunia internasional tidak dihadapkan dengan ketegangan *arms race* lagi dan dapat fokus untuk mengatasi permasalahan yang lain.

Wacana untuk mengatasi permasalahan kemiskinan baru menjadi perhatian internasional setelah Bank Dunia menerbitkan *World Development Report* yang melaporkan mengenai pentingnya pengurangan kemiskinan dunia pada 1990. Pada tahun yang sama akhirnya *United Nations Development Programme* (UNDP) juga menerbitkan *Human Development Report* serupa yang melaporkan pentingnya kebijakan nyata dari dunia internasional untuk mengatasi kemiskinan. Kondisi yang demikian akhirnya mendorong berbagai aktor internasional untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan serta *human deprivation*.

Pembangunan berbasis *growth* dengan implementasi SAP oleh lembaga moneter internasional tidak lagi menjadi alternatif solusi. Hal ini karena model pembangunan tersebut terbukti gagal membawa pembangunan dan kesejahteraan pada dunia internasional tahun 1980-an. Maka dari itu kemudian dicanangkan pembangunan berbasis manusia (*human based development*) untuk mengatasi permasalahan kemiskinan seperti usulan UNDP.

Sejak dikeluarkannya dua laporan tersebut, isu kemiskinan menjadi perhatian dalam hubungan internasional untuk segera diselesaikan. Konferensi *United Nation Conference on Trade and Development* (UNCTAD) pada tahun 1990 yang membahas mengenai kondisi negara-negara yang kurang berkembang mengawali serangkaian konferensi internasional untuk merumuskan solusi permasalahan kemiskinan di dunia. Pada tahun yang sama diadakan *World Children Summit* oleh *United Nations International Children's Fund* (UNICEF) untuk mempertimbangkan nasib anak-anak dalam upaya pembangunan. Dua konferensi tersebut menyadarkan dunia bahwa wacana pemberantasan kemiskinan dapat menghasilkan komitmen politik dari berbagai aktor internasional.

Hingga akhirnya pada 1992 diadakan *United Nations Conference on Environment and Development* atau yang lebih dikenal sebagai *Earth Summit* atau *Rio Summit* yang membahas mengenai komitmen rencana pembangunan di negara berkembang untuk mengatasi kemiskinan. Pada konferensi ini, Brasil mengambil

inisiatif sebagai negara berkembang yang paling depan ingin melakukan pembangunan untuk mengatasi kemiskinan di negaranya. Pada konferensi ini salah satu wacana yang disetujui oleh seluruh negara yang hadir adalah bahwa pertumbuhan ekonomi khususnya di negara berkembang akan membaik apabila diterapkan pasar bebas dan akses terhadap pasar yang lebih baik.¹²¹ Tahun 1995 merupakan puncak dari konferensi tingkat internasional dengan diadakannya *World Summit on Social Development* di Kopenhagen dan Konferensi Perempuan Keempat PBB di Beijing.

Dua konferensi tersebut memasukkan agenda mengenai intervensi negara agar dapat memajukan pasar yang menguntungkan negara berkembang. Dua konferensi ini juga menghasilkan suatu komitmen untuk mengurangi kemiskinan yang ada di dunia dengan menggunakan pendekatan multidimensional. Meskipun demikian, dua konferensi ini dinilai masih belum menemukan suatu solusi untuk menyelesaikan akar penyebab kemiskinan yang sesungguhnya. Setelah kegagalan berbagai konferensi untuk menghasilkan suatu keputusan yang dapat menggerakkan seluruh dunia untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan *human deprivation*, akhirnya *Development Assistance Committee* (DAC)¹²² berupaya untuk memutuskan suatu kebijakan pembangunan yang dapat memuat berbagai wacana yang dihasilkan dalam konferensi-konferensi sebelumnya.

Penurunan bantuan yang diberikan oleh negara donor dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) sejak 1980, menjadikan berkurangnya dana *Official Development Assistance* (ODA) yang dapat diberikan untuk membantu negara berkembang. Berkembangnya isu untuk mengatasi kemiskinan dan *human deprivation* pada 1990-an di dunia menjadikan banyak negara berkembang yang memberikan kritik terhadap OECD mengenai komitmennya untuk membantu negara berkembang mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu DAC berupaya merumuskan solusi mengatasi kemiskinan yang dapat

¹²¹ Neil Middleton and Phil O'Keefe. 2003. *Rio Plus Ten Politics, Poverty and Environment*. London: Pluto Press. Halaman 8.

¹²² DAC adalah forum khusus dari negara-negara pendonor OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) dengan diwakili seorang representasi untuk membuat suatu kebijakan atau alternatif-alternatif yang dapat membuat pembangunan di dunia menjadi lebih baik.

memberikan keuntungan tidak saja pada negara berkembang yang menerima ODA tapi juga pada negara donor. Hingga akhirnya DAC berkesimpulan bahwa untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai pembangunan yang harus dilakukan adalah melalui investasi yang dapat menguntungkan negara maju sebagai pendonor dan pada saat yang sama membantu pembangunan negara berkembang.

Pada tahun 1996 DAC yang berisikan perwakilan dari negara-negara maju, berhasil merumuskan salah satu kontribusi penting sebelum terbentuknya MDGs. *International Development Goals (IDGs)* yang termuat dalam dokumen *Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Co-operation* berhasil dirumuskan dengan berisikan serangkaian solusi multidimensional untuk mengatasi kemiskinan. Meskipun demikian, baik IDGs tidak dapat menggerakkan seluruh negara di dunia untuk berupaya mengatasi kemiskinan. Hal ini karena IDGs dipandang sebagai hasil dari negara-negara maju untuk menguntungkan negara maju itu sendiri. Kegagalan IDGs sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan juga karena kurangnya dukungan lembaga moneter internasional untuk mempromosikannya. Kurangnya ketertarikan Amerika Serikat terhadap implementasi IDGs merupakan alasan utama IDGs tidak dipromosikan oleh IMF dan Bank Dunia.¹²³

Sementara itu kemudian pada tahun 1997, UNDP juga merumuskan suatu jalan keluar atas permasalahan kemiskinan melalui *The Human Development Report 1997*. Dari kedua solusi yang ditawarkan oleh DAC dan UNDP terdapat beberapa perbedaan mendasar yang dapat diperhatikan. Perbedaan tersebut terletak pada IDGs yang ditawarkan oleh DAC lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut diterapkan dengan prinsip neoliberalisme sebagai jalan keluar dengan pertimbangan keuntungan yang adil bagi negara maju dan negara berkembang dalam proses mengatasi kemiskinan. Sementara itu UNDP lebih menginginkan menggunakan pendekatan untuk melindungi hak asasi manusia dalam mengatasi kemiskinan.

¹²³ David Hulme. 2009. *The Millennium Development Goals (MDGs): A Short History of the World's Biggest Promise*. University of Manchester: Brooks World Poverty Institute. Halaman 17.

Akhirnya perbedaan tersebut dapat diakomodasi oleh PBB pada *Millennium Summit* tahun 2000 yang mempersatukan kedua resolusi dari DAC dan UNDP. Kofi Annan yang pada waktu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal mengeluarkan sebuah laporan yang berjudul *We The People* yang berisikan bahwa penyelesaian kemiskinan dapat dilakukan dengan tindakan bersama seluruh masyarakat dunia. Hingga akhirnya 149 pemimpin negara dan pemerintahan beserta pejabat-pejabat tinggi dari 40 negara yang menghadiri *Millennium Summit* menyetujui Deklarasi Milenium atau *Millennium Declaration*.¹²⁴ *Millennium Declaration* ini berisi prinsip-prinsip, nilai, dan tujuan universal yang ingin dicapai pada abad 21, termasuk MDGs sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan.

MDGs telah mencakup cita-cita yang ingin dicapai dalam IDGs dan berbagai resolusi dari organisasi PBB serta Majelis Umum PBB. Berbeda dengan perumusan IDGs oleh DAC yang hanya melibatkan negara-negara maju, proses perumusan MDGs melibatkan semua negara yang hadir dalam *Millennium Summit* termasuk usulan dari negara berkembang. Bukan hanya itu, Amerika Serikat yang selama proses perumusan dan implementasi IDGs menunjukkan ketidaktertarikannya juga mendukung pencetusan MDGs dalam *Millennium Declaration*. Meskipun demikian, Amerika Serikat tetap menyatakan bahwa tujuan Amerika Serikat mendukung deklarasi tersebut sepenuhnya adalah untuk mencapai tujuannya saja. Dengan dukungan dari Amerika Serikat terhadap deklarasi tersebut, menjadikan IMF dan Bank Dunia juga memberikan dukungannya terhadap MDGs.

Setelah MDGs disepakati sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan oleh berbagai aktor internasional dan pembangunan berbasis manusia dinyatakan sebagai model pembangunan milenium, berbagai negara di dunia bersama-sama menyatakan komitmennya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang hendak dicapai oleh MDGs meliputi tindakan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, kelaparan, pendidikan, menyediakan tempat tinggal yang layak, dan juga

¹²⁴ PBB. Tanpa tahun. *Millennium Summit*. http://www.un.org/en/events/pastevents/millennium_summit.shtml [20 Desember 2014]

mempromosikan kesetaraan gender, pendidikan, dan kelestarian alam. Berbagai target tersebut kemudian dibagi menjadi 8 program MDGs yang akan dicapai hingga tahun 2015.

Terkait dengan disepakatinya MDGs pada *Millennium Summit* sebagai hasil konsensus PBB, berarti bahwa negara-negara anggota PBB baik yang hadir ataupun tidak, setuju menjalin berbagai tindakan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan hingga tahun 2015.¹²⁵ Tindakan kolektif yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam MDGs adalah kerjasama antara negara maju dan negara berkembang untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada.¹²⁶ Dengan disepakatinya MDGs ini, maka negara-negara anggota PBB berkomitmen untuk mengadopsi MDGs dan menjalankan berbagai programnya hingga tujuan yang ditetapkan dalam MDGs tercapai.

Dari delapan program yang terdapat dalam MDGs, penyelesaian permasalahan kemiskinan terdapat pada program MDGs yang pertama (MDG1: *Eradicating Extreme Poverty and Hunger* atau Pemberantasan Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem). Lebih rinci lagi disebutkan dalam MDG1 mengenai beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target 1, yaitu:¹²⁷

- 1a. Mengurangi setengah dari jumlah populasi dengan penghasilan US\$ 1 per hari antara tahun 1990 – 2015
 - Indikator 1.1 proporsi populasi di bawah US\$ 1 PPP per hari (pada 2005 indikator ini kemudian diubah menjadi US\$ 1.25)
 - Indikator 1.2 rasio kesenjangan kemiskinan
 - Indikator 1.3 penghasilan dari 20% populasi termiskin dalam negara

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Su-ming Khoo. 2005. "The Millennium Development Goals: A Critical Discussion" dalam *Trócaire Development Review* . Dublin. Halaman 45

¹²⁷ Jeff Waage, dkk. 2010. "The Millennium Development Goals: a cross-sectoral analysis and principles for goal setting after 2015" dalam *The Lancet Commissions September 13, 2010*. London International Development Centre.

- 1b. Mencapai kesempatan kerja yang penuh dan produktif bagi semua, termasuk perempuan dan remaja
- Indikator 1.4 tingkat pertumbuhan GDP tiap orang yang bekerja
 - Indikator 1.5 rasio antara pekerjaan dan populasi
 - Indikator 1.6 proporsi orang yang bekerja tetapi hidup di bawah US\$ 1 PPP per hari
 - Indikator 1.7 proporsi pekerja *own-account* dan *contributing family*¹²⁸ dalam total pekerjaan
- 1c. Mengurangi setengah dari jumlah populasi yang mengalami kelaparan
- Indikator 1.8 frekuensi terjadinya kekurangan gizi pada anak – anak di bawah 5 tahun
 - Indikator 1.9 proporsi populasi di bawah level minimum konsumsi energi.

Berbagai indikator yang terdapat di dalam MDG1 merupakan suatu pendekatan multidimensional yang digunakan oleh PBB untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Pendekatan multidimensional ini digunakan oleh PBB karena kegagalan pendekatan yang hanya berbasis ekonomi untuk mengatasi kemiskinan seperti kegagalan SAP pada 1980-an dan *Washington Concensus* pada 1990-an. Dengan menggunakan pendekatan multidimensional dalam mengatasi kemiskinan, maka PBB mengharapkan pembangunan koheren di berbagai bidang yang dapat mengatasi kemiskinan.

Berbeda pula dengan berbagai solusi sebelumnya yang ditawarkan untuk mengatasi kemiskinan, MDG1 dan MDGs pada umumnya, merupakan hasil konsensus dari seluruh negara anggota PBB. SAP dan *Washington Concensus* merupakan model negara maju untuk diterapkan di negara berkembang, oleh karena itu hanya menggambarkan perpindahan model pembangunan. Model pembangunan tersebut hanya memfokuskan pada pencapaian kepentingan negara

¹²⁸ *International Labour Organisation* (ILO) mendefinisikan *own-account worker* sebagai pekerja yang menjalankan usahanya sendiri, tanpa mempekerjakan orang lain. Sedangkan *contributing family worker* adalah pekerja yang bekerja pada usaha anggota keluarganya sendiri dengan tanpa gaji. <http://www.ilo.org/public/english/employment/yen/whatwedo/projects/indicators/5.htm> [10 Agustus 2015]

maju atas negara berkembang. Sementara itu MDG1 yang hasil dari kesepakatan seluruh negara anggota PBB menunjukkan bahwa negara berkembang juga terlibat dalam perumusannya. Banyak negara berkembang yang merasa dapat menyusun model pembangunan yang lebih adaptif dengan kondisi negaranya untuk mengimplementasikan MDG1 sebagai cara mengatasi kemiskinan.

Konsensus yang digunakan dalam proses pencetusan MDG1 ini mengembalikan kepercayaan negara-negara berkembang terhadap kinerja PBB. Berbagai negara berkembang skeptis terhadap kinerja PBB yang hanya mendukung keputusan negara maju. Mengacu pada solusi penyelesaian kemiskinan sebelumnya, PBB selalu mendukung berbagai model pembangunan yang ditawarkan oleh negara maju. Skeptisme negara berkembang ini terutama setelah keputusan PBB mempromosikan implementasi *Washington Consensus* yang kemudian menyebabkan terjadinya krisis ekonomi global. Kemudian dengan dicituskannya IDGs oleh DAC, negara berkembang melihat bahwa solusi untuk mengatasi kemiskinan hanya tindakan retorik yang dilakukan oleh negara maju saja.¹²⁹

Dengan konsensus yang digunakan untuk mencetuskan MDG1 sebagai model pembangunan untuk mengatasi kemiskinan, negara berkembang merasa kepentingannya juga diikutsertakan dalam keputusan tersebut. Oleh karena itu penerapan MDGs dan atau MDG1 untuk mengatasi kemiskinan disambut positif dan optimis oleh berbagai negara berkembang. Seperti beberapa pernyataan berikut ini:¹³⁰

- H.E. Leonel Fernández, Presiden Republik Dominika:

"The recommendations of the UN Millennium Project, enshrined in their newly released report to the Secretary-General 'Investing in Development' provide a much needed roadmap for countries like the Dominican Republic, helping us to effectively address the synergies between sectors while scaling-up public interventions that will altogether assist in ensuring our country's achievement of the Millennium Development Goals by 2015"

¹²⁹ David Hulme. *Op. Cit.* Halaman 17.

¹³⁰ UNMillenniumProject. 2015. *Statements of support for Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals.* <http://www.unmillenniumproject.org/press/endors01.htm> [10 November 2015]

- H.E. Olesegun Obasanjo, Presiden Nigeria

"We urge the international community to act on the recommendations of the Millennium Project and we challenge all stakeholders to follow-up on and assist in the implementation of the Millennium Development Goals in Nigeria and Africa."

- Duta Munir Akram, Wakil Permanen Pakistan di PBB

"The Millennium Project Report is an outcome of serious research carried out by hundreds of academics and professionals. It spans over three thousand pages accounting for 13 reports by Ten Task Forces.

The central message of the report is simple and well meaning. It is a message of hope and promise that eliminating hunger and poverty was doable in our life time...

We see the Millennium Project Report as an important starting point for constructive and meaningful global engagement on development issues. It is our hope that it would help revive and stimulate global dialogue on development and lead to submission of specific recommendations for political discussion at the 2005 Summit..."

Optimisme berbagai negara berkembang melihat MDG1 sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan berhasil memobilisasi berbagai tindakan serta kebijakan untuk mencapai targetnya. Setelah diputuskan pada 2000 dan dikeluarkan pula *road map* pelaksanaan *Millennium Declaration* atau MDGs pada tahun 2001 oleh Sekretaris Jenderal PBB, baru dilaksanakan berbagai tindakan untuk mencapai targetnya.¹³¹ Tindakan berbagai negara maupun berbagai aktor internasional lainnya yang ingin mencapai target MDG1 mengacu pada *road map* tersebut.

Khusus untuk masalah kemiskinan, setelah ditetapkan dalam MDG1 maka kemudian upaya untuk mengatasi kemiskinan di seluruh dunia berfokus di negara berkembang untuk mencapai setiap indikator yang disebutkan. Fokus tindakan dan juga kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah kemiskinan harus sesuai dengan *road map* dan berdasarkan pada target yang telah ditetapkan. Terkait dengan prinsip pelaksanaan MDG1 yaitu kerjasama kolektif, maka negara maju juga ikut mengambil peran dalam upaya memberantas kemiskinan di negara berkembang. Negara-negara maju bertugas sebagai negara donor atau pemberi asistensi kebijakan.

¹³¹ Website Resmi PBB. 2015. *Millennium Development Goals Report*. <http://www.un.org/millenniumgoals/reports.shtml> [28 Juli 2015]

Bukan hanya berbagai negara berkembang yang optimis terhadap implementasi MDG1 untuk mengatasi kemiskinan, tetapi juga berbagai organisasi internasional. *International Financial Institutions* (IFIs; IMF dan Bank Dunia) juga mendukung implementasi MDGs dan MDG1 khususnya dalam mengatasi kemiskinan. Dua lembaga moneter tersebut memberikan dukungannya karena pendekatan multidimensional yang digunakan dinilai dapat membawa pembangunan yang lebih efektif.

Bukan hanya itu, melalui implementasi MDG1, IFIs juga berpendapat bahwa dapat menciptakan hubungan yang lebih solid antar negara di dunia sehingga dapat memaksimalkan aliran bantuan luar negeri serta ODA.¹³² Dukungan yang diberikan oleh IFIs juga berdampak pada promosi implementasi MDG1 dalam berbagai pinjaman yang diberikan. Bahkan IFIs hingga menjadikan pelaksanaan MDGs dan atau MDG1 sebagai syarat pemberian pinjaman terhadap suatu negara.

"In the spirit of the Monterrey Consensus, the IMF is committed to a strong and coordinated worldwide effort to reduce poverty. I hope we are able to work effectively with the international community to achieve these aims."
Rodrigo Rato, Direktur Pelaksana IMF.

"...a major undertaking to support global efforts to achieve the MDGs. We agree with the Report that the MDGs cannot be achieved with 'business as usual'. The World Bank especially welcomes the Report's call for increased and more effective aid, openness to trade, and improved governance."
James D. Wolfensohn, Presiden Bank Dunia.¹³³

Berbagai organisasi internasional di bawah PBB lainnya juga mendukung implementasi MDGs karena pendekatan multidimensional tersebut. Pendekatan multidimensional yang digunakan dinilai telah mengangkat isu yang menjadi fokus kerja berbagai organisasi tersebut, terutama dengan pembagian 8 target dan indikator dalam MDGs. Dukungan dari berbagai organisasi internasional ini tidak saja datang dari organisasi di bawah PBB, berbagai *non-governmental organization* (NGO) juga mendukung implementasi MDGs dan MDG1 untuk mengatasi kemiskinan dan *human deprivation* di dunia. Dukungan dari berbagai aktor internasional ini pula yang menjadikan kemudian promosi serta

¹³² PBB. *Road map towards the implementation of the United Nations Millennium Declaration: Report of the Secretary-General A/56/326* 6 September 2001. New York.

¹³³ UNMillenniumProject. 2015. *Loc. Cit.*

implementasi MDGs dapat dilakukan secara progresif di berbagai negara dan mendorong berbagai negara untuk mencapai target MDGs.

"The MDGs are all about investing in children, and this report is fundamental to the global effort to create a world that is fit for children," said UNICEF Executive Director Carol Bellamy. "We could not support it more strongly." Carol Bellamy, Direktur Eksekutif UNICEF.

"We have the means to achieve those goals. We have the technology. What we need are the resources and the political will. We cannot wait any longer to do what we have promised to achieve in the coming decade." Dr. Lee Jong-wook, Direktur Jenderal World Health Organization (WHO).

3.2 Implementasi MDG1: *Eradicating Extreme Poverty and Hunger* Untuk Menyelesaian Permasalahan Kemiskinan

Implementasi MDG1 sebagai solusi mengatasi kemiskinan secara resmi baru dilakukan pada 2002. Hal ini karena *road map* yang berisi pedoman pelaksanaan MDGs dan MDG1 baru dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB pada 2001. Implementasi MDG1 di berbagai negara berkembang tentunya dilakukan dengan pencetusan kebijakan atau program pengentasan kemiskinan sesuai dengan *road map* tersebut. Implementasi kebijakan atau program pengentasan kemiskinan tersebut dapat dilaksanakan oleh suatu negara berkembang dengan menggunakan anggaran negaranya.

Pembiayaan lain dalam mengimplementasikan MDG1 adalah dengan melakukan peminjaman pada IFIs. Dukungan yang diberikan IFIs kepada implementasi MDG1 adalah dengan mengeluarkan berbagai pinjaman dengan bunga rendah untuk proposal yang mencantumkan implementasi MDG1 serta MDGs pada umumnya. Selain itu IMF juga memberikan prioritas dana yang harus digunakan untuk mengimplementasikan MDGs dan MDG1 dalam pinjaman yang diberikan.

Sebelum memperoleh dana pinjaman dari IMF dan Bank Dunia, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi atau yang lebih dikenal dengan *Structural Adjustment Programm* (SAP). Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu negara sebelum mendapatkan pinjaman intinya terdiri dari kebijakan neoliberalisme yang

berkaitan dengan privatisasi dan liberalisasi ekonomi.¹³⁴ Selain itu kebijakan yang harus dilakukan termasuk pembukaan pasar bebas, pengurangan kontrol pemerintah atas pasar, pembatasan subsidi, serta berbagai deregulasi perbankan.

Berbagai persyaratan yang harus dilakukan oleh negara berkembang sebelum mendapatkan pinjaman dari IFIs ini juga berkaitan dengan kerjasama kolektif dalam upaya mencapai MDG1. IMF dan Bank Dunia menilai bahwa dengan diterapkannya privatisasi dan liberalisasi ekonomi, maka suatu negara akan mampu membuka kesempatan bagi mikroekonomi di negara tersebut untuk berkembang dengan adanya persaingan dari pasar bebas. Dengan menguatnya mikroekonomi di dalam negara maka akan berdampak pada stabilitas makroekonomi yang ada di negara tersebut. Dengan adanya stabilitas perekonomian tersebut maka akan mengundang aliran investasi asing yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan tersebut kemudian akan mengatasi berbagai permasalahan kemiskinan yang dialami negara berkembang tersebut.

Untuk mendapatkan pinjaman dari IMF, suatu negara terlebih dahulu harus menyerahkan *letter of intent* kepada IMF dengan dilengkapi rencana ekonomi serta bagaimana pembayaran pinjaman IMF yang akan dilakukan. Kemudian Dewan Eksekutif IMF yang akan menyetujui pemberian pinjaman tersebut beserta syarat-syarat serta kondisi tertentu yang harus dipenuhi oleh negara yang akan meminjam.¹³⁵ Macam-macam pinjaman yang diberikan oleh IMF juga tergantung pada alasan penggunaan pinjaman tersebut.

Dalam menjamin implementasi MDG1 berjalan secara efektif, IMF dan Bank Dunia tidak hanya memberikan bantuan finansial untuk proses pertumbuhan ekonomi. IMF dan Bank Dunia juga memberikan arahan terhadap kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk menjamin pertumbuhan ekonomi jangka panjang. IMF dan Bank Dunia juga yang mengatur aliran investasi agar terjadi

¹³⁴ Website Resmi WHO. 2015. *Structural Adjustment Programmes (SAPs)*. <http://www.who.int/trade/glossary/story084/en/> [10 Februari 2015]

¹³⁵ The Guardian. 2011. *IMF Loans: Which Countries owe the Most?*. <http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/may/24/imf-loans-dominique-strauss-kahn> [5 Agustus 2015]

pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Mengingat peran sentral IMF dan Bank Dunia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa IMF dan Bank Dunia memegang peran sentral dalam implementasi MDG1. Akan tetapi dalam mengeluarkan pinjaman tersebut, pendapat dari bank sentral Amerika Serikat dan juga perwakilan Amerika Serikat di IMF menjadi salah satu pertimbangan tersendiri. Hal ini terkait dengan posisi Amerika Serikat sebagai pemegang saham sehingga keputusan Amerika Serikat dapat mempengaruhi pengeluaran keputusan dari IFIs, termasuk dalam memberikan pinjaman.

Suatu negara juga dapat memperoleh bantuan luar negeri dari berbagai lembaga internasional untuk mengimplementasikan MDG1. Lembaga-lembaga di bawah PBB ataupun berbagai NGO dapat memberi bantuan terkait dengan isu yang diangkat dalam kebijakan atau program yang dicetuskan oleh suatu negara. Meskipun demikian bantuan yang diberikan oleh lembaga di bawah PBB ataupun NGO biasanya berupa kerjasama dalam mengimplementasikan suatu program tertentu.

Banyak lembaga-lembaga internasional di bawah PBB selain UNDP yang terkait dengan implementasi MDG1. Cara interdimensional yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan menjadikan banyak lembaga lain ikut terlibat dalam pengimplementasian MDG1 meskipun permasalahan kemiskinan bukan isu utamanya. Target MDG1 juga memuat tentang penyelesaian kelaparan ekstrim, maka *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *World Health Organization* (WHO) juga ikut terlibat dalam pengimplementasiannya. Mengacu pada target 1b maka *International Labor Organization* (ILO) juga terlibat. Terkait pada target 1c maka UNICEF juga terlibat dalam implementasi MDG1. Dengan banyaknya aspek yang terkait dengan kemiskinan, maka banyak pula lembaga yang terlibat dalam pengimplementasian MDG1.

Implementasi MDG1 tidak hanya dilakukan oleh negara berkembang saja, dalam *road map* 2001 disebutkan juga implementasi MDGs dan MDG1 melalui kerjasama kolektif antara negara maju dan negara berkembang. Kerjasama kolektif yang dilakukan negara berkembang dengan negara maju dalam pengimplementasian MDG1 ini dapat berupa pemberian bantuan luar negeri

(*foreign aid*), hutang (*debt relief*), dan perbaikan terhadap akses pasar.¹³⁶ Selain itu juga disebutkan juga mengenai komitmen negara maju yang harus dilakukan. Komitmen tersebut terkait dengan peningkatan jumlah ODA yang akan diberikan kepada proses pembangunan di negara berkembang. ODA yang diberikan negara maju terhadap negara berkembang juga merupakan salah satu sumber finansial yang digunakan untuk mengimplementasikan MDG1.

ODA merupakan pemberian aliran dana bantuan kepada negara-negara dan juga institusi multilateral dari anggota OECD. Penerima bantuan ODA adalah semua negara dan wilayah yang termasuk dalam daftar penerima ODA yang disusun oleh anggota DAC.¹³⁷ Meskipun begitu tidak semua aliran dana bantuan yang diberikan negara maju termasuk ke dalam ODA. Aliran dana yang termasuk ke dalam ODA adalah dana yang disediakan oleh lembaga resmi negara, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau oleh lembaga eksekutif. Selain itu dana yang diberikan juga harus bertujuan utama untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang. Dalam pemberian bantuan tersebut juga memiliki pertimbangan khusus, yaitu berupa hibah atau pinjaman yang mengandung unsur hibah minimal 25% (yang dihitung dengan bunga potongan 10%).¹³⁸

Pada awal pemberian ODA sebelum adanya MDGs, ODA diberikan oleh OECD terutama untuk pembangunan dan promosi isu-isu kemanusiaan di negara-negara berkembang. Tetapi setelah disepakatinya MDGs pada tahun 2000, maka aliran dana ODA langsung dihubungkan dengan implementasi upaya untuk mencapai target MDGs. Pemberian bantuan yang diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang yang bertujuan selain untuk mengimplementasikan target MDGs maka bukan termasuk ke dalam ODA.

¹³⁶ John W. McArthur dan Guido Schmidt-Traub. 2015. *Binging 2015 to 2005: Implementing the Millennium Development Goals today*. New York: The United Millennium Development Project. Halaman 1

¹³⁷ Website resmi *Japan International Cooperation Agency (JICA)*. 2015. *Japan's Oda and JICA*. <http://www.jica.go.jp/english/about/oda/> [29 Juli 2015]

¹³⁸ Website resmi OECD. 2015. *Official Development Assistance – definition and coverage*. <http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm> [29 Juli 2015]

Terdapat 22 negara donor yang berkontribusi dalam pengumpulan dana ODA, sementara itu negara-negara yang berhak menerima aliran dana ODA adalah semua negara dan wilayah yang memenuhi syarat untuk menerima aliran dana tersebut menurut OECD.¹³⁹ Semua negara dengan pendapatan nasional rendah dan menengah berdasarkan data GDP per kapita yang dikeluarkan Bank Dunia dan juga Negara Kurang Berkembang (*Least Developed Countries*–LCD) termasuk dalam negara yang berhak menerima ODA.

Negara anggota G8, Uni Eropa, dan negara yang akan sah menjadi anggota Uni Eropa merupakan negara-negara yang tidak akan menerima aliran ODA. Selain pemberian ODA, kerjasama kolektif yang dapat diberikan oleh negara maju adalah dengan perbaikan terhadap akses pasar. Maksud dari perbaikan terhadap akses pasar adalah dibukanya pasar negara maju bagi produk-produk yang berasal dari negara berkembang sekaligus dengan kerjasama perdagangan internasional yang dapat dibantu oleh negara maju terhadap pertumbuhan pasar negara berkembang.

ODA merupakan bantuan luar negeri yang banyak membantu implementasi MDG1. Sebagai bantuan yang bersifat bilateral, negara donor telah menetapkan standar yang harus dicapai oleh negara penerima dalam menggunakan ODA. Sementara itu, dalam menetapkan standar tersebut negara donor mengacu pada *frame work* yang telah ditetapkan oleh OECD dan *road map* MDGs. Target utama *frame work* yang ditetapkan oleh OECD adalah pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu ODA banyak digunakan untuk implementasi MDG1.

Pengimplementasian MDG1 tentunya juga tidak dapat dipisahkan dari peran UNDP. UNDP menggunakan *development assistance* untuk mentransfer sumberdaya ke negara – negara berkembang. Berbeda dengan lembaga finansial seperti IMF dan Bank Dunia, UNDP tidak meminjamkan dana pembangunan tetapi menyediakan bantuan pembangunan.¹⁴⁰ Meskipun demikian UNDP tetap mengharapakan pembayaran atas dana bantuan yang digunakan tersebut. Meski

¹³⁹ Website resmi OECD. 2015. *DAC List of ODA recipients*. <http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm> [29 Juli 2015]

¹⁴⁰ J. Samuel Barkin. *Op. Cit.* Halaman 106

secara keseluruhan kerja dari UNDP tidak hanya fokus pada implementasi MDG1 melainkan pada pencapaian delapan target MDGs, tetapi fokus pembangunan pada pengurangan kemiskinan menjadikan kerja UNDP juga fokus pada pengurangan angka kemiskinan.

Implementasi MDG1 yang efektif dan konsisten merupakan kunci utama untuk mengatasi kemiskinan. Maka dari itu terdapat beberapa lembaga internasional yang bertugas untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi MDG1 dalam mencapai target yang telah ditetapkan. UNDP juga memiliki tugas utama untuk memonitor implementasi MDGs. Disebutkan pada *road map* 2001 bahwa UNDP akan bertugas sebagai *scorekeeper* yang mengkoordinasi, mengawasi, dan mengkampanyekan MDGs pada level negara. Sedangkan pada level global *United Nations Departement of Economic and Social Affair* (UN/DESA) yang bertugas menjalankannya.¹⁴¹ Tujuan dari kerja UNDP pada level negara adalah agar UNDP dapat memberikan laporan yang lebih kredibel. Laporan dari UNDP dan UN/DESA ini kemudian yang dijadikan bahan laporan oleh sekretaris jenderal.

Laporan oleh Sekretaris Jenderal ini dikeluarkan setiap satu tahun sekali pada pertemuan tahunan kepala negara untuk mengevaluasi pencapaian target MDG1 dan MDGs secara keseluruhan. Laporan ini melihat progres yang telah dilakukan oleh semua pihak berdasarkan *road map* yang telah disusun pada 2001. Laporan oleh Sekretaris Jenderal ini dijadikan standar pencapaian implementasi MDGs dari tahun 2002 – 2007.¹⁴² Setelah itu yang bertanggungjawab dalam memonitor implementasi MDGs adalah *MDG Gap Task Force*. *MDG Gap Task Force* dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk memperbaiki proses monitoring implementasi program MDGs. *MDG Gap Task Force* ini terdiri dari integrasi 20 lembaga termasuk diantaranya adalah IMF, Bank Dunia, OECD, WTO, UNDP, dan UN/DESA. *MDG Gap Task Force* bertugas memberikan laporan dari tahun 2008 hingga 2012.

¹⁴¹ Website resmi UNDP. 2015. *Millennium Development Goals*. http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg_goals.html [29 Agustus 2015]

¹⁴² Website resmi PBB. 2015. *Millennium Development Goals Reports*. <http://www.un.org/millenniumgoals/reports.shtml> [6 Agustus 2015]

Pada tahun 2012 lembaga yang bertanggungjawab memonitor implemetasi MDGs berganti pada *Integrated Implementation Framework* (IIF). IIF dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB dengan tugas untuk memonitor dan mencatat pendanaan serta berbagai kebijakan yang dibuat untuk mendukung pengimplementasian MDGs yang dilakukan oleh negara-negara anggota PBB ataupun oleh aktor internasional lainnya.¹⁴³ Sebagaimana tujuan dibentuknya IIF, IIF memiliki tugas untuk memberikan laporan pada pertemuan-pertemuan tinggi negara seperti pertemuan Resolusi Majelis Umum PBB, *G8 Summit*, *G20 Summit*, dan berbagai pertemuan tinggi lainnya mengenai catatan kebijakan dan pendanaan yang dilakukan untuk mencapai target MDGs.

Laporan dari IIF ini yang kemudian akan digunakan untuk mengevaluasi perwujudan komitmen dari suatu negara atau aktor internasional lainnya dalam mencapai target MDGs. IIF ini juga yang akan melaporkan progres dari pengimplementasian target MDGs di suatu negara. Dengan berdasarkan berbagai informasi yang dikumpulkan, IIF juga berlaku sebagai parameter yang dapat mengukur strategi nasional dari suatu negara dalam mengimplementasikan target MDGs. Sehingga berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh IIF, IIF dapat memberikan saran atas target-target yang harus dicapai oleh berbagai pihak yang berkomitmen terhadap implementasian MDGs termasuk negara anggota PBB.

Selain berbagai lembaga tersebut, laporan tahunan implementasi MDGs yang sangat berpengaruh adalah laporan dari Bank Dunia dan IMF. *Global Monitoring Report* (GMR) merupakan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh kerjasama antara Bank Dunia dan IMF serta dengan kontribusi dari OECD dalam mengukur keefektifan implementasi MDGs.¹⁴⁴ GMR ini khususnya mengeluarkan laporan mengenai pembangunan ekonomi yang dilakukan dalam rangka mencapai MDGs beserta pengurangan kemiskinan. IMF dan Bank Dunia mempercayai bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan cara paling efektif untuk melakukan

¹⁴³ *Integrated Implementation Framework* (IIF). 2015. *The Integrated Implementation Framework: Achieving MDGs Through Mutual Accountability*. <http://iif.un.org/content/integrated-implementation-framework-achieving-mdgs-through-mutual-accountability> [5 Agustus 2015]

¹⁴⁴ Website resmi Bank Dunia. 2015. *Global Monitoring Report*. <http://www.worldbank.org/en/publication/global-monitoring-report> [6 Agustus 2015]

pembangunan dan khususnya dalam mengurangi kemiskinan. IMF dan Bank Dunia pertama kali merilis GMR pada tahun 2004 dan sejak itu dirilis setiap tahun. IMF dan Bank Dunia menjadikan GMR sebagai bahan evaluasi bagi suatu negara dalam melakukan pembangunan dan menentukan tindakan selanjutnya (memberikan peringatan apabila dinilai kurang efektif, memberikan saran pembangunan, *technical assistance*, pemberian bantuan, hingga pinjaman).¹⁴⁵

Laporan GMR ini khususnya sangat berpengaruh pada implementasi MDG1. Hal ini karena implementasi MDG1 banyak menggunakan dana dari IFIs sehingga tanggung jawab pencapaian MDG1 juga lebih besar pada IFIs. Suatu negara yang dinilai kurang mengimplementasikan MDG1 dapat dikenai peringatan oleh IFIs. Selain pada IFIs, laporan pencapaian MDG1 pada OECD dan negara donor juga menjadi tanggung jawab negara berkembang. Hal ini karena dana ODA juga banyak digunakan sebagai pembiayaan implementasi MDG1. Laporan pada OECD dan negara donor ini dapat mempengaruhi aliran ODA yang akan diberikan selanjutnya.

3.3 Implementasi MDG1 Untuk Mengatasi Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem di Brasil

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi di Brasil bahkan sejak era kolonialisme Portugal. Akan tetapi pemerintah Brasil tidak pernah berupaya secara serius untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baru ketika dunia internasional mengangkat isu kemiskinan pada laporan Bank Dunia dan UNDP dan diadakannya *Rio Summit* pada 1992, pemerintah Brasil baru menunjukkan perhatiannya yang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Meskipun demikian, Brasil yang pada waktu itu masih berupaya untuk menciptakan pemerintahan demokrasi yang stabil setelah era otoriter militer masih belum menghasilkan suatu kebijakan apapun.

Seiring dengan munculnya berbagai konferensi tingkat internasional untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan pada 1990-an, wacana pencetusan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Brasil baru muncul

¹⁴⁵ IMF. 2015. *The IMF and Millennium Development Goals*. IMF publisher.

pada masa pemerintahan Presiden Cardoso. Ketika menjabat sebagai presiden pada 1995-2002, Cardoso mencetuskan sebuah program yang bernama Hibah Sekolah (*Bolsa Escola*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Brasil dengan meningkatkan pendidikan. Selama masa pemerintahannya, Cardoso juga banyak melakukan stabilisasi makroekonomi untuk memperkuat perekonomian Brasil agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Brasil yang dapat mengurangi kemiskinan.

Stabilisasi makroekonomi tersebut juga termasuk kebijakan pembukaan pasar Brasil yang lebih luas bagi asing serta privatisasi berbagai perusahaan negara. Privatisasi terbesar yang pernah terjadi di Brasil berlangsung selama pemerintahan Cardoso dengan hampir 120 perusahaan negara yang dijual.¹⁴⁶ Dua partai pendukung utama Cardoso yaitu Partai Sosial Demokrat Brasil (*Partido da Social Democracia Brasileira*, PSDB) dan (*Partido da Frente Liberal*, PFL pada 2007 berubah menjadi Partai Demokrat) merupakan partai sayap tengah-kanan dan kanan yang selalu mendukung kebijakan tersebut. Selain itu kebijakan fiskal juga menjadi kunci kebijakan pemerintahan Cardoso untuk memperkuat perekonomian Brasil. Pada tahun 2000, Cardoso mengeluarkan *Fiscal Responsibility Law* (LRF) untuk menekan pengeluaran pemerintah setelah terjadinya krisis ekonomi 1997-1999.

Kebijakan Cardoso yang memang *market friendly* juga mendapat dukungan dari IMF dan Amerika Serikat. Pada tahun 1997 pinjaman terbesar yang pernah dikeluarkan IMF diberikan kepada Brasil sebesar US\$ 41.5 triliun. Pinjaman yang besar tersebut diberikan kepada Brasil setelah Amerika Serikat meyakinkan IMF dan juga Bank Dunia bahwa pinjaman tersebut dibutuhkan untuk menstabilkan GDP Brasil agar tidak semakin terpuruk krisis. Pinjaman dengan jumlah besar (US\$ 30 triliun) juga kembali diberikan IMF pada Brasil dibawah Cardoso pada tahun 2002 untuk menstabilkan perekonomian Brasil.¹⁴⁷ Meskipun demikian berbagai kebijakan tersebut tidak begitu membawa pengaruh

¹⁴⁶ Riordan Roett. *Op. Cit.* Halaman 92.

¹⁴⁷ Riordan Roett. *Op. Cit.* Halaman 100-104.

terhadap kondisi kemiskinan di Brasil. Hingga akhir masa jabatan Cardoso, tingkat kemiskinan di Brasil masih di atas 10%.

Ketika MDGs dicetuskan pada tahun 2000, Cardoso yang masih menjabat sebagai presiden otomatis merupakan rezim yang menyetujui kesepakatan tersebut. Meskipun demikian, ketika MDG1 dicetuskan sebagai solusi mengatasi kemiskinan, Brasil yang baru saja mengalami krisis dan resesi ekonomi masih fokus untuk kembali menstabilkan perekonomiannya sehingga belum menghasilkan kebijakan untuk mengimplementasikannya. Pengimplementasian MDG1 di Brasil baru dilakukan pada masa Presiden Lula pada 2003.

Pada tahun 2002, Luiz Inácio Lula da Silva yang berasal dari Partai Buruh (*Partido dos Trabalhadores*, PT) memenangkan pemilihan umum dan menggantikan Cardoso sebagai presiden Brasil. Ketika Lula menjabat sebagai presiden Brasil, bertepatan dengan dikeluarkannya *road map* MDGs oleh Sekretaris Jenderal PBB yang mengharuskan setiap negara melakukan tindakan nyata dalam membuktikan komitmennya dalam mengimplementasikan MDGs. Oleh karena itu penyelesaian permasalahan kemiskinan langsung menjadi fokus rezim Lula. Disamping itu, latar belakang Lula yang datang dari partai sayap kiri, juga mendorong Lula untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Brasil.

Strategi Lula untuk mengatasi kemiskinan di Brasil juga dilakukan seperti masa pemerintahan Cardoso, yaitu dengan fokus untuk membangun perekonomian di Brasil. Lula yang berasal dari partai sayap kiri menyebabkan banyak kekhawatiran dari investor asing terkait kebijakan ekonomi yang akan dibuat. Kebijakan *market friendly* semasa Cardoso yang lebih condong ke kanan lebih disukai oleh investor asing. Meskipun demikian, setelah menjabat sebagai presiden, Lula juga tidak banyak mengeluarkan kebijakan pasar yang kekikiran. Bahkan semasa Lula menjabat sebagai presiden, kebijakan ekonomi Lula banyak yang melanjutkan kebijakan ekonomi Cardoso.¹⁴⁸

Melanjutkan kebijakan dari masa pemerintahan Cardoso, Lula juga banyak melakukan stabilisasi makroekonomi untuk memperkuat perekonomian Brasil.

¹⁴⁸ The World Bank. 2003. *Rural Poverty Alleviation in Brazil: Toward an Integrated Strategy*. Washington, D.C. Halaman 111.

Berbagai kebijakan fiskal serta pembukaan pasar, privatisasi, serta deregulasi perbankan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Brasil. Pemaksimalan ekspor juga menjadi salah satu kebijakan yang ditempuh Lula untuk mendorong stabilisasi pertumbuhan ekonomi Brasil. Semenjak Lula diangkat menjadi presiden, dapat dikatakan bahwa Brasil mengalami *export boom* terutama dalam sektor agrikultur. Bahkan Lula ingin Brasil menjadi negara pengekspor produk agrikultur terbesar di dunia.

Sektor agrikultur memang sejak dahulu menjadi salah satu produk andalan Brasil dengan menyumbang rata-rata sepertiga dari GDP Brasil. Sejak jaman kolonial, Brasil memang sudah terkenal dengan produk agrikulturnya seperti kopi, kedelai, dan gula. Bahkan sejak masa otoriter militer juga sudah ada beberapa program yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi agrikultur Brasil seperti pembentukan Lembaga Penelitian Penelitian Brasil (*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária*, EMBRAPA) pada tahun 1973.¹⁴⁹ Selain itu pada masa pemerintahan Presiden Cardoso juga diputuskan berbagai macam kredit agrikultur untuk mendorong peningkatan produksi seperti *Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar* (PRONAF) pada tahun 1995, *Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária* (INOVAGRO), dan Proyek Genome Kopi pada 2002.¹⁵⁰¹⁵¹ Akan tetapi program-program tersebut masih belum terlalu memaksimalkan potensi agrikultur Brasil.

Pemaksimalan sektor agrikultur oleh Lula dilakukan dengan melakukan pertanian berbasis ekspor. Berbagai lahan pertanian, khususnya di wilayah Selatan Brasil digunakan untuk menghasilkan produk-produk yang memenuhi kualitas ekspor. Berbagai kebijakan yang akan mempermudah proses perdagangan produk pertanian juga diputuskan oleh Lula, seperti perbaikan sarana transportasi,

¹⁴⁹ Vinod Tomas. 2006. *Development in a Land of Contrasts*. California, Wasington: Stanford University Press dan The World Bank. Halaman 11.

¹⁵⁰ The Brazil Business. 2013. *Financing Programs for Agribusiness*. <http://thebrazilbusiness.com/article/financing-programs-to-agribusiness> [14 November 2015]

¹⁵¹ Carlos E. Guanziroli dan Carlos A. Basco. 2010. "Construction of agrarian policies in Brazil: the case of the National Program to Strengthen Family Farming (PRONAF)" dalam *Comuniica Year 5 January – July 2010*. Halaman 44.

pembangunan berbagai sarana pengangkutan, reformasi kepemilikan lahan pertanian, kredit perbankan, serta pemotongan *tariff* bagi ekspor produk agrikultur.

Perhatian Lula terhadap ekspor Brasil memang dapat dikatakan sebagai strategi ekonomi yang berhasil menstabilkan perekonomian Brasil. Ekspor Brasil yang nilainya semakin meningkat tiap tahun sejak Lula menjabat, memberikan kontribusi yang cukup besar bagi GDP Brasil. Aliran investasi asing juga semakin banyak yang memasuki Brasil karena kebijakan Lula yang *market friendly*. Tujuan dari berbagai kebijakan ekonomi yang dicetuskan oleh Lula, selain untuk memperkuat perekonomian Brasil adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Brasil sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Brasil.

Terkait dengan tujuan Lula untuk memperkuat perekonomian Brasil, Lula juga banyak menginisiasi blok-blok kerjasama ekonomi. Strategi ini ditempuh oleh Brasil untuk memperkuat posisi Brasil agar dapat menyaingi kekuatan ekonomi dari negara-negara maju. Hasil dari strategi ini adalah pembentukan BRIC bersama negara-negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Terkait dengan kerjasama ekonomi, pada masa Lula menjabat juga banyak dilakukan kerjasama Selatan-Selatan untuk mengurangi ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju. Perhatian Lula terhadap independensi negara berkembang dari negara maju juga ditunjukkan dari kecenderungan Lula dalam memperkuat hubungan ekonomi negara Amerika Latin.

Kebijakan perekonomian Brasil di bawah Lula memang tetap lebih condong ke kanan, khususnya terkait kebijakan perdagangan dan ekspor. Akan tetapi bukan berarti Lula sudah berubah haluan dari partai sayap kiri yang mendukungnya. Pada masa pemerintahan Lula kebijakan sosialis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Brasil juga banyak diputuskan, salah satunya yang paling berdampak besar terhadap pengurangan kemiskinan di Brasil adalah *Bolsa Família*.

3.3.1. Deregulasi Kebijakan Agrikultur

Deregulasi kebijakan agrikultur banyak dilakukan semasa pemerintahan Presiden Lula agar menyesuaikan dengan upaya stabilisasi makroekonomi Brasil dengan berdasarkan pada pedoman pasar bebas. Setelah liberalisasi perdagangan

diterapkan di Brasil, pemerintah semakin mengurangi subsidi yang diberikan pada sektor agrikultur dan mendorong pembiayaan swasta. Keputusan itu sesuai dengan praktek liberal untuk mengurangi intervensi pemerintah atas harga di pasar dan bertujuan untuk mengontrol inflasi. Tujuan dari berbagai kebijakan sektor agrikultur pemerintah Lula adalah untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam proses agrikultur, baik itu dalam proses pendanaan produksi, ataupun dalam pemasaran.

Reformasi kepemilikan lahan pertanian menjadi salah satu fokus deregulasi kebijakan agrikultur Lula karena Brasil merupakan salah satu negara dengan sistem kepemilikan tanah yang paling tidak adil di dunia. Kepemilikan tanah di Brasil masih dikuasai oleh para tuan tanah yang diwariskan secara turun-temurun dari era kolonial Portugal. Sistem feodal tersebut masih berlaku dalam kepemilikan lahan di Brasil hingga saat ini. Oleh karena itu sejak industrialisasi yang dilakukan di Brasil sejak 1950-1960an banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi sistem tersebut. Berdasarkan data yang diberikan oleh Gerakan Pekerja Tak Bertanah (*Landless Workers Movement/Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra*, MST) pada 2013, 10% pemilik lahan pertanian adalah para tuan tanah yang menguasai lebih dari 500 hektar lahan dan mengontrol 85% produksi agrikultur.¹⁵²

Pada masa pemerintahan Presiden Cardoso, upaya untuk mengurangi sistem feodal ini dilakukan dengan melakukan amandemen konstitusi pada 1998 dengan memberikan hak kepada pemerintah untuk melakukan pengalihan kepemilikan atau perampasan pada lahan yang tidak digunakan (Pasal 5). Kategori tanah yang tidak digunakan adalah apabila 80% tanah tersebut tidak produktif. Upaya serius untuk mengurangi ketidakadilan kepemilikan tanah di Brasil dilakukan pada masa Presiden Lula dengan mengeluarkan Undang-undang No. 4504 / 64 dan Pedoman No. II Program Reformasi Lahan pada tahun 2003 (*Guideline No. II National Land Reform Program*).

Pedoman tersebut dikeluarkan untuk mendukung upaya pemerintah mengefisienkan produksi agrikultur agar dapat melakukan pertumbuhan ekonomi

¹⁵² MST. *Loc. Cit.*

yang stabil. Reformasi lahan tersebut dilakukan dengan melakukan pembelian lahan atau pengambilalihan lahan melalui *Settlement Program (Projetos de Assentamentos, PAs)* oleh Institusi Nasional untuk Kolonisasi dan Reformasi Agrikultur (*Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA*) yang berada di bawah naungan Kementrian Pertanian (*Ministério Do Desenvolvimento Agrário, MDA*). Pengambilalihan tersebut hanya dapat dilakukan INCRA pada tanah yang produktifitasnya $\leq 20\%$ dari pemiliknya dan dinyatakan sebagai aset negara untuk kemudian dimanfaatkan lebih baik. Selain itu reformasi lahan pertanian juga dilakukan INCRA melalui diferensiasi lingkungan pertanian (*Projeto de Assentamento Agroextrativista, PAE*), dan juga proyek penggunaan hutan (*Projeto de Assentamento Florestal, PAF*).¹⁵³

Tanah yang dimiliki oleh INCRA atas nama pemerintah Brasil dapat dimanfaatkan sesuai dengan usulan yang masuk ke dalam INCRA. Tanah tersebut dapat diberikan kepada para petani yang mengajukan diri untuk menempati tanah yang telah diperoleh INCRA, atau dapat juga diberikan pada pihak asing, baik secara individu atau perusahaan, yang mengajukan akuisisi. Hingga tahun 2014 tercatat terdapat 88.314.875 hektar tanah yang berhasil direformasi oleh INCRA dengan 968,887 keluarga yang sebelumnya tidak memiliki tanah yang telah diberi tanah. Meskipun demikian MST melaporkan masih terdapat sekitar 150.000 keluarga petani yang masih tidak memiliki lahan pertanian di Brasil pada tahun 2013.

Upaya pemerintahan Presiden Lula untuk mengefisiensikan sektor agrikultur juga dilakukan dengan melakukan reformasi pada wilayah *semi arid Sertão* di Timur Laut. Melalui *Dom Helder Camara Project (DHCP)* pemerintah Brasil berupaya mengubah lahan kering di wilayah Timur Laut menjadi lahan pertanian. Proyek ini diinisiasikan pada tahun 2000, meskipun baru dilaksanakan pada tahun 2003 oleh MDA dengan bantuan finansial dari IFAD. Selain bantuan finansial dari IFAD, pembiayaan proyek ini juga bergantung pada investasi sektor privat baik yang datang dari dalam negeri maupun investor asing. DHCP terdiri

¹⁵³ INCRA. 2015. *Reforma Agrária*. http://www.incra.gov.br/reforma_agraria [4 Desember 2015]

dari tiga komponen, yaitu: (1) pelatihan dan pengorganisasian petani; (2) produksi dan pengembangan pemasaran; (3) pemberian jasa finansial.¹⁵⁴

Akan tetapi bertentangan dengan keterangan INCRA, data yang dikeluarkan oleh IBGE menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan penggunaan lahan pertanian di Brasil. Dua data di bawah ini merupakan perbandingan dari data lahan pertanian Brasil yang dikeluarkan oleh sensus pertanian oleh *Censo Agropecuário* (Badan Sensus Pertanian MDA) dan *Produção Agrícola Municipal* (Produksi Pertanian Kotamadya, PAM). Perbedaan data yang mencolok juga disebabkan oleh *Censo Agropecuário* juga mensurvei hutan serta lahan lainnya yang ditanami serta lahan yang digunakan untuk ladang rumput bagi peternakan. Sedangkan survei PAM hanya lahan pertanian yang digunakan untuk panen permanen dan panen musiman.

Tabel 3.1 Presentase Lahan Pertanian Brasil Tahun 2000 – 2009

No	Tahun	Presentase Lahan Pertanian Brasil oleh PAM
1.	2000	6.1%
2.	2001	6%
3.	2002	6.4%
4.	2003	6.8%
5.	2004	7.4%
6.	2005	7.5%
7.	2006	7.3%
8.	2007	7.3%
9.	2008	7.7%
10	2009	7.7%

Sumber: data diperoleh dari website resmi IBGE

<http://www.ibge.gov.br/>

Tabel 3.2 Presentase Lahan Pertanian Brasil

No	Tahun	Presentase Lahan Pertanian Brasil Berdasarkan Sensus Pertanian (<i>Censo Agropecuário</i>)
1.	1980	26.8%
2.	1985	27.9%
3.	1996	26.4%
4.	2006	26.5%

Sumber: data tabel 3.2 diperoleh dari website resmi IBGE

¹⁵⁴ IFAD. 2015. *Brazil: Dom Helder Camara Project (DHCP)*. http://www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/doc/prj/region/pl/brazil/dhcp/index.htm [28 November 2015]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2009, hal tersebut karena para petani yang memperoleh lahan pertanian dari program INCRA kekurangan modal dan tidak dapat bersaing dengan petani yang lebih besar. Para petani kecil tersebut kemudian membiarkan tanah yang mereka peroleh tidak digunakan atau mereka menjualnya kepada petani yang lebih besar. Para petani kecil ini kemudian kembali bekerja pada petani yang lebih besar dari pada menanam sendiri.

Efisiensi sektor agrikultur Brasil tidak hanya dilakukan pemerintah melalui reformasi lahan pertanian saja. Pemberian kredit agrikultur melalui PRONAF semakin ditingkatkan dan pada tahun 2004 dan 2005 juga dikeluarkan suatu kebijakan baru terkait dengan pembiayaan sektor agrikultur, yaitu melalui Undang – Undang No. 11.076/04 pada 12/31/2004 dan Instruksi Peraturan (*Regulatory Instruction*) No. 422 pada 9/20/2005. Kebijakan baru tersebut terdiri dari tiga instrumen kredit bagi petani pedesaan agar dapat lebih mudah mendapatkan pinjaman dana dari berbagai investor, baik itu investor lokal maupun investor asing. Tiga instrumen tersebut terdiri dari *Agribusiness Credit Bite* (LCA), *Certificates of Agribusiness Credit Rights* (CDCA), dan *Certificate of Agribusiness Receivables* (CRA). Ketiga instrumen kredit tersebut memberikan kesempatan bagi produsen atau perusahaan pertanian desa untuk lebih mudah mendapatkan pinjaman sehingga dapat melakukan produksi yang bersaing di pasar internasional.

Dikeluarkannya tiga instrumen kredit baru ini adalah untuk mendorong industri pertanian pedesaan untuk menghasilkan produk kualitas ekspor sehingga dapat bersaing di pasar. Terkait dengan pemasaran produk agrikultur, UU No. 11.076 pada 12/31/2004 yang memberikan kewenangan pada pemerintah Brasil untuk memberikan subsidi bagi pihak swasta yang mau memasarkan produk agrikultur. Pihak swasta menggantikan posisi pemerintah sebagai pihak yang memasarkan produk agrikultur di Brasil dengan harga yang telah dijamin untuk menguntungkan kedua belah pihak.

Selain itu, pada pemerintahan Presiden Lula asuransi terhadap petani pedesaan juga semakin ditingkatkan. Melalui UU No. 10.823 pada 12/19/03 yang

dilaksanakan berdasarkan Dekrit No. 5.121 pada 6/29/04, pemerintah Brasil memiliki kewenangan untuk memberikan subsidi kepada premi yang harus dibayarkan petani pedesaan kepada perusahaan asuransi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan dukungan bagi petani pedesaan agar mau melakukan produksi sepanjang tahun tanpa khawatir dengan kegagalan karena keadaan iklim, serta untuk mendorong perusahaan asuransi agar memberikan asuransi pada para petani.

Untuk mendukung pengefisienan sektor agrikultur tersebut, pemerintah Brasil dibawah Lula juga banyak melakukan pembangunan infrastruktur di Brasil. Berbagai proyek pembangunan tol dilakukan selama pemerintahannya, seperti:

- BR 158: pembangunan tol sepanjang 400 km antara Ribeirão Cacalheira, di Negara Bagian Mato Grosso (MT) dan perbatasan Mato Grosso dengan Negara Bagian Pará (PA).
- BR 364: pembangunan tol sepanjang 185 km antara Diamantino (MT) dan Campo Novo dos Parecis (MT) yang selesai pada 2010.
- BR 163: pembangunan tol sepanjang 1024 km antara Guarantã do Norte (MT) dan Santarém (PA) yang selesai pada 2011.

Selain itu dilakukan pula pembangunan rel kereta api sepanjang 2258 km antara Utara-Selatan yang menghubungkan Negara Bagian Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo pada 2009. Juga ada pembangunan rel kereta api di wilayah Utara-Timur yang menghubungkan pelabuhan Pecém di Negara Bagian Ceará (CE) dan Suape, di Negara Bagian Pernambuco (PE), dengan Eliseu Martins di Negara Bagian Piauí (PI) serta pembangunan berbagai kawasan berikat untuk mendukung pengangkutan produk ekspor di berbagai pelabuhan.¹⁵⁵

Berbagai upaya yang ditetapkan oleh Presiden Lula untuk mengefisienkan sektor agrikultur ini memang berhasil meningkatkan produksi agrikultur Brasil. MDA menyatakan bahwa produksi pertanian Brasil telah mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat dari produksi Brasil pada tahun

¹⁵⁵ Data diperoleh dari laporan Kementerian Pertanian, Peternakan, dan Pasokan Pangan (*Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply* atau *Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*, MAPA). 2008. *Brazil Agricultural Policies*. MAPA.

1990-an. Bahkan pada tahun 2007, MDA menyatakan bahwa sektor agrikultur Brasil senilai US\$324.34 triliun.¹⁵⁶ Peningkatan produksi juga tidak hanya pada produksi tanaman saja, produksi peternakan juga banyak mengalami peningkatan.

Tebu merupakan komoditi ekspor utama Brasil yang menjadikan Brasil sebagai produsen tebu terbesar di dunia. 90% produksi tebu Brasil dihasilkan oleh industri pertanian dari wilayah Selatan. Ladang tebu menguasai 8.5 juta hektar lahan pertanian di Brasil (198 juta hektar untuk peternakan, 27 juta hektar untuk kedelai, dan 15 juta hektar untuk jagung).¹⁵⁷ Selain diekspor dalam bentuk tebu, etanol juga merupakan produk unggulan hasil dari pemrosesan tebu.

Saat ini Brasil merupakan produsen etanol terbesar kedua setelah Amerika Serikat di dunia. Berdasarkan data *União da Indústria de Cana-de-Açúcar* (Asosiasi Industri Tebu Brasil, UNICA) sekitar 700 juta ton produksi tebu Brasil pada 2014.¹⁵⁸ sekitar 60% diprioritaskan untuk diolah menjadi etanol.¹⁵⁹ Industri tebu dan etanol merupakan dua industri terkait agrikultur yang paling berpengaruh di Brasil. Hal ini karena tiap tahunnya rata-rata industri tebu menyumbang 2% GDP Brasil, bahkan jika seluruh industri dan para pemegang saham yang bergantung dari industri tebu dihitung, maka industri tebu di Brasil bernilai sekitar 86 triliun pada 2012.¹⁶⁰

Selain tebu, komoditi unggulan sektor agrikultur Brasil adalah jagung. Selain karena jagung juga banyak dijadikan sebagai bahan makanan utama oleh penduduk Brasil, tanah dan iklim Brasil juga cocok untuk ditanami jagung. Brasil merupakan negara yang dapat melakukan panen jagung selama setahun penuh tanpa terpengaruh musim. Oleh karena itu banyak investor asing yang

¹⁵⁶ Ronald Herscovici, Eduardo J Herszkowicz dan Frederico M Stacchini. 2008. "Securitisation of agribusiness financial instruments in Brazil: an expanding market" dalam *Global Securitisation and Structured Finance 2008*.

¹⁵⁷ Joel Velasco. 2013. *Brazilian Sugarcane*. <https://www.eia.gov/biofuels/workshop/presentations/2013/pdf/presentation-08-020113.pdf> [23 Maret 2016]

¹⁵⁸ Divisi Statistik FAO. 2016. *Production-Cop*. <http://faostat3.fao.org/compare/E> [23 Maret 2016]

¹⁵⁹ Ethanol Producer Magazine. 2014. *UNICA: Brazilian ethanol production up, exports down*. <http://ethanolproducer.com/articles/11760/unica-brazilian-ethanol-production-up-exports-down> [23 Maret 2016]

¹⁶⁰ Tanpa Nama. 2016. *Impact on Brazil's Economy*. <http://sugarcane.org/the-brazilian-experience/impact-on-brazils-economy> [23 Maret 2016]

menanamkan modal terkait industri jagung di Brasil. Kedelai juga merupakan produk andalan Brasil. Sektor peternakan juga merupakan sektor yang tumbuh dengan cepat di Brasil. Bahkan saat ini Brasil merupakan negara penyedia daging bagi utama di kawasan Amerika Latin.

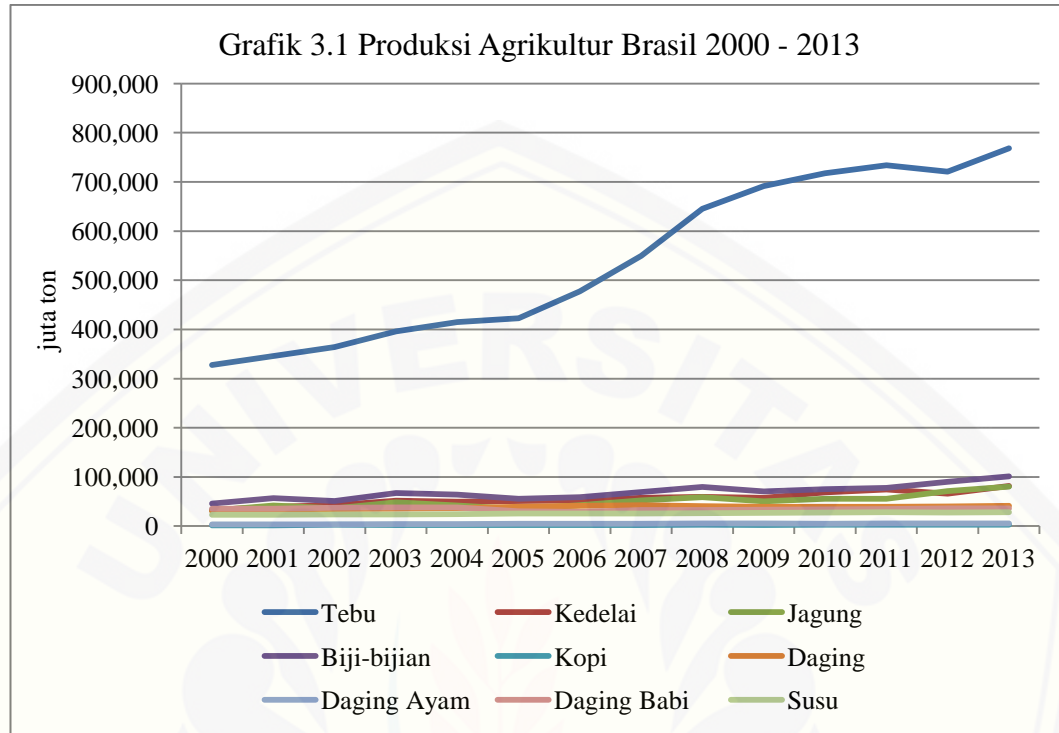
Tabel 3.3 Produksi Agrikultur Brasil 2000 – 2013

No.	Tahun	Produksi Agrikultur Brasil 2000 – 2013 (juta ton)				
1.	Komoditi Pertanian					
		Tebu	Kedelai	Jagung	Biji-bijian	Kopi
	2000	327,705	32,735	31,879	45,898	1,904
	2001	345,942	39,058	41,955	57,125	1,820
	2002	364,391	42,769	35,933	50,878	2,650
	2003	396,012	51,920	48,327	67,468	1,987
	2004	415,206	49,550	41,788	63,963	2,465
	2005	422,957	51,182	35,113	55,669	2,140
	2006	477,411	52,465	42,662	59,149	2,573
	2007	549,707	57,857	52,112	69,442	2,249
	2008	645,300	59,833	58,933	79,752	2,797
	2009	691,606	57,346	50,720	70,914	2,440
	2010	717,464	68,756	55,364	75,161	2,907
	2011	734,006	74,815	55,660	77,586	2,700
	2012	721,007	65,849	71,073	89,908	3,038
2013	768,090	81,724	80,273	100,902	2,965	
2.	Komoditi Peternakan					
		Daging	Daging Ayam	Susu	Daging Babi	
	2000	31,144	3,254	22,785	35,665	
	2001	33,500	3,481	22,794	35,400	
	2002	34,500	3,819	23,810	37,559	
	2003	35,500	3,907	23,756	38,000	
	2004	36,500	4,278	24,702	38,400	
	2005	39,430	4,695	25,446	30,429	
	2006	41,225	4,576	25,837	29,265	
	2007	42,325	5,151	25,672	33,110	
	2008	40,438	5,465	26,238	32,700	
	2009	39,446	5,557	27,228	33,510	
	2010	39,400	4,988	27,863	34,290	
	2011	39,100	5,288	28,206	34,862	
	2012	40,205	5,244	27,803	36,258	
2013	41,590	5,613	28,055	36,430		

Sumber: data diperoleh dari website resmi FAOSTAT

Tabel 3.4 terdiri dari produk-produk Brasil unggulan Brasil yang menjadikan Brasil sebagai produsen agrikultur ketiga di dunia. Bahkan Brasil merupakan

produsen tebu pertama di dunia. Untuk kategori biji-bijian, terdiri dari padi, gandum, oats, dan kacang-kacangan (*beans* dan tidak termasuk *nuts*).



Tabel 3.4 Nilai Keuntungan Produksi Agrikultur Brasil 2000 – 2013

No	Tahun	Nilai Keuntungan Produksi Agrikultur (US\$)
1.	2000	89.132.916,11
2.	2001	94.096.442,66
3.	2002	99.824.712,75
4.	2003	106.988.360,80
5.	2004	112.614.484,78
6.	2005	114.194.732,22
7.	2006	118.414.128,45
8.	2007	126.878.878,44
9.	2008	134.892.191,17
10.	2009	132.900.825,42
11.	2010	140.549.447,43
12.	2011	147.275.806,65
13.	2012	145.545.149,09
14.	2013	154.933.271,12

Sumber: data diperoleh dari website resmi FAOSTAT
faostat3.fao.org/browse/rankings/commodities_by_country/E

Produksi agrikultural yang meningkat tersebut juga diikuti dengan volume ekspor agrikultur yang ditingkatkan pula. Peningkatan volume ekspor agrikultur ini merupakan salah satu keputusan Presiden Lula untuk membantu upaya stabilisasi makroekonomi Brasil. Hal ini juga terkait dengan komitmen Presiden Lula kepada IMF untuk meningkatkan volume ekspor sebagai upaya stabilisasi makroekonomi.

Dalam prakteknya, berbagai pertumbuhan dalam sektor agrikultur Brasil tidak membawa dampak yang begitu signifikan bagi petani kecil dan menengah di Brasil. Hal ini karena baik dalam segi produksi maupun pemasaran dan ekspor, aktor yang lebih banyak bermain dalam sektor agrikultur Brasil adalah MNC asing atau perusahaan Brasil dengan pemegang saham asing. Dalam hal produksi agrikultur, Cargill, Monsanto, dan Sygenta merupakan tiga raksasa MNC yang menguasai Brasil. Cargill lebih banyak berperan dalam mengontrol mayoritas proses produksi dan pemasaran jagung dan tebu. Sementara itu dalam hal bibit dan pupuk Monsanto yang menjadi aktor dominan. Sygenta lebih mendominasi pada sektor pupuk kimia dan teknologi pertanian.

Tabel 3.5 Peningkatan Nilai Ekspor 9 Produk Agrikultur Brasil 2000 – 2013¹⁶¹

No	Tahun	Volume 9 Produk Agrikultur Brasil 2000 - 2013 (ton)
1.	2000	35.015.641
2.	2001	66.130.899
3.	2002	68.798.631
4.	2003	73.712.518
5.	2004	87.106.154
6.	2005	89.258.460
7.	2006	100.293.497
8.	2007	115.132.985
9.	2008	108.358.807
10.	2009	128.736.267
11.	2010	147.495.099
12.	2011	142.383.676
13.	2012	157.884.522
14.	2013	190.451.414

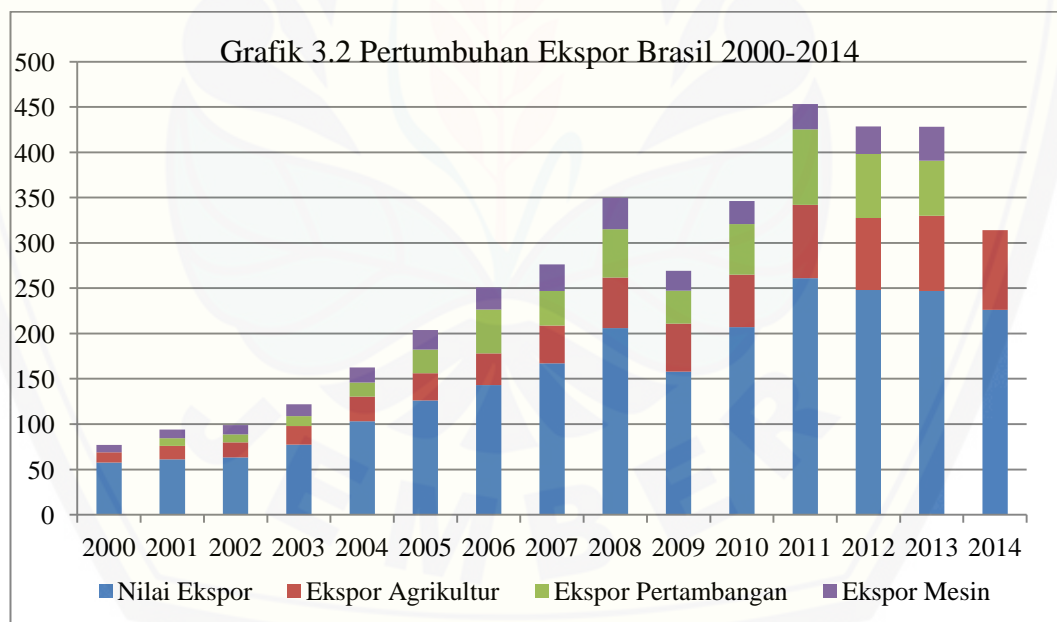
Sumber: data diperoleh dari website resmi FAOSTAT

¹⁶¹ 9 produk agrikultur yang terdapat dalam tabel 3.3 adalah 9 komoditi agrikultur yang terdapat pada tabel 3.2 beserta hasil olahannya, seperti komoditi ekspor tebu adalah gula dan yang sebanding dengan gula, serta untuk jagung dan kedelai ada juga tepung jagung dan tepung kedelai.

Tabel 3.6 Peningkatan Ekspor Brasil 2000-2014

No	Tahun	Nilai Ekspor (US\$ triliun)	Kontribusi Komoditi Ekspor US\$ triliun (% GDP)		
			Agrikultur	Tambang	Mesin
1.	2000	57.6	11.4 (19.7%)	6.8 (12%)	8.1 (14%)
2.	2001	61.2	14.7 (24%)	8.6 (14%)	9.5 (15.5%)
3.	2002	63.4	16.3 (25.7%)	8.9 (14%)	10.4 (16.4%)
4.	2003	77.5	20.2 (26%)	11.2 (14.4%)	12.9 (16.6%)
5.	2004	103	27.5 (26.7%)	15.5 (15%)	16.6 (16.1%)
6.	2005	126	30.2 (24%)	26.1 (20.7%)	21.4 (17%)
7.	2006	143	35.2 (24.6%)	48.1 (33.6%)	24.6 (17.2%)
8.	2007	167	41.8 (25%)	38.2 (22.9%)	29.2 (17.5%)
9.	2008	206	55.8 (27.1%)	53.3 (25.9%)	34.8 (16.9%)
10.	2009	158	52.9 (33.5%)	36.3 (23%)	22.1 (14%)
11.	2010	207	57.9 (28%)	55.8 (27%)	25.5 (12.3%)
12.	2011	261	80.9 (31%)	83.5 (32%)	27.7 (10.6%)
13.	2012	248	79.4 (32%)	70.9 (28.6%)	30.3 (12.2%)
14.	2013	247	82.9 (33.6%)	61.0 (24.7%)	37.1 (15%)
15.	2014	226	88.2 (39%)	-	-

Sumber: data berdasarkan laporan WTO yang terdapat di <http://atlas.media.mit.edu/>



Selain tiga raksasa MNC yang menguasai pasar Brasil tersebut, berbagai MNC *retailer* juga menguasai pemasaran produk agrikultur dalam pasar Brasil. Beberapa raksasa *retailer* tersebut adalah Casino, Carrefour, dan Wall-Mart. Ketiga raksasa *retailer* menguasai pemasaran produk agrikultur Brasil dengan berbagai cabang *supermarket* ataupun *hypermarket* yang dibangun di Brasil.

Beroperasinya berbagai MNC asing di Brasil ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah Brasil yang semakin membuka pasarnya bagi investasi asing sehingga menjadikan berbagai kompetitor lokal kalah saing. Isu ini yang menjadi perhatian gerakan petani Brasil yang bernama *La Via Campesina* untuk memperjuangkan nasib petani kecil dan menengah yang kalah saing dalam sektor agrikultur. Gerakan ini menilai bahwa berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pemberantasan kemiskinan dan ketahanan pangan hanya merupakan kebijakan yang mendukung kapitalisme.

Pendapat tersebut didasarkan pada fakta di lapangan bahwa berbagai pertumbuhan perekonomian dan pertumbuhan di sektor agrikultur khususnya lebih menguntungkan pihak asing dari pada para petani kecil dan menengah di Brasil. Gerakan ini khususnya bekerjasama dengan MST untuk menyediakan lahan pertanian bagi para keluarga petani yang belum memiliki lahan. Mereka berpendapat bahwa kebijakan reformasi lahan yang dilakukan oleh pemerintah tidak efektif karena lebih membela para tuan tanah dan investor asing.

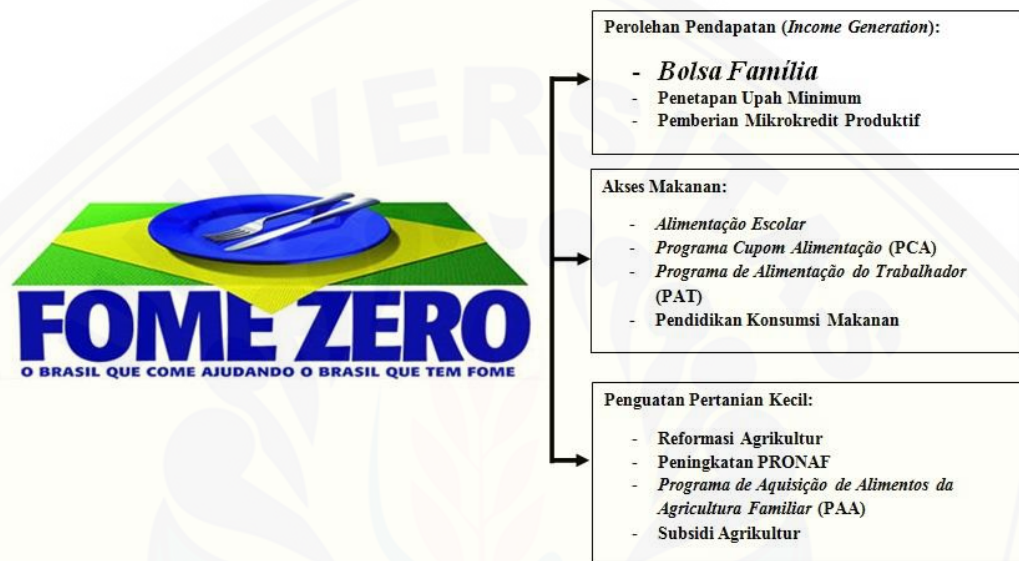
3.3.2. *Programa Fome Zero (Zero Hunger Program)*

Komitmen Brasil dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam MDG1 di bawah Presiden Lula tidak hanya melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian Brasil. Pada Oktober 2003 Presiden Lula mengeluarkan serangkaian subsidi bersyarat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Brasil dan mengurangi kemiskinan yang diberi nama *Programa Fome Zero (Zero Hunger Program)*. Program ini merupakan integrasi dari sekitar 50 inisiatif pemerintah yang saling berhubungan untuk memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan yang ada di Brasil. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat miskin Brasil terhadap makanan dan mendukung produksi petani berskala kecil yang ada di Brasil.

Dalam pengimplementasiannya, *Programa Fome Zero* memiliki tiga pilar utama yang dilakukan, yaitu; *Bolsa Família*, *Alimentação Escolar*, dan *Fortalecimento da Agricultura Familiar*.¹⁶² Implementasi tiga pilar dari program *Programa Fome Zero* terbukti efektif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan

¹⁶² OXFAM. *Loc. Cit.*

dan kelaparan yang ada di Brasil. Setelah program ini ditetapkan, tingkat kemiskinan di Brasil menurun dari 8.8% pada 2002 menjadi 3.6% pada 2012.¹⁶³ Tiga pilar utama tersebut mewakili tiga sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Brasil melalui program *Programa Fome Zero* yaitu perolehan pendapatan, akses terhadap makanan, dan penguatan pertanian kecil. Lebih lengkapnya dapat diperhatikan pada gambar 3.1.¹⁶⁴



Gambar 3.1 Bagan Program *Programa Fome Zero* (Zero Hunger Program)
Sumber: data dianalisis dari laporan FAO dan OXFAM

Meskipun terdapat tiga pilar utama dalam implementasi *Programa Fome Zero*, *Bolsa Família* dapat dikatakan sebagai inti dari *Programa Fome Zero*. Hal ini karena dari implementasi *Bolsa Família*, pemerintah Brasil dapat secara langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Brasil dan menurunkan angka kemiskinan. *Bolsa Família* dapat dikatakan sebagai fokus program pemerintah Brasil untuk mencapai target yang ada dalam MDG1.

“Bolsa Família transfers income to reduce poverty today, and at the same time ties these expenditures to basic education and health of families to reduce poverty tomorrow.” Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Brasil.¹⁶⁵

Bolsa Família adalah sebuah subsidi bersyarat (*Conditional Cash Transfer*, CCT) yang dicetuskan untuk memberantas kemiskinan dengan

¹⁶³ The Guardian. 2013. *Loc. Cit.*

¹⁶⁴ José Graziano da Silva, Mauro Eduardo Del Grossi, dan Caio Galvão de França. 2011. *The Programa Fome Zero (Zero Hunger) Program - The Brazilian Experience*. Brazil: FAO.

¹⁶⁵ Vinod Tomas. *Op. Cit.* Halaman 27.

memberikan sejumlah uang tunai kepada keluarga miskin di Brasil. Program ini dicetuskan pada 2003 oleh Presiden Luiz Inácio Lula da Silva dan baru diresmikan pada Januari 2004 melalui UU Federal No. 10.836.¹⁶⁶ Sebagaimana *Programa Fome Zero*, *Bolsa Família* juga merupakan integrasi dari berbagai subsidi untuk penduduk dengan penghasilan rendah yang pernah diberikan oleh pemerintah Brasil, seperti subsidi pendidikan, subsidi makanan, subsidi kesehatan, serta *Auxílio-Gás*.¹⁶⁷

Dalam implementasi *Bolsa Família*, Sekretariat Nasional Penghasilan Penduduk (*National Secretariat of Citizenship Income, Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, SENARC*) yang berada di bawah Kementerian Pengembangan Sosial dan Pemberantasan Kelaparan (*Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS*) yang bertanggung jawab pada tingkat federal. SENARC juga yang bertanggungjawab atas kontrak dengan *Caixa Econômica Federal (CAIXA)* yang merupakan agen yang mengoperasikan *Bolsa Família* kepada negara bagian serta kota madya.¹⁶⁸ Negara bagian dan juga kota madya yang kemudian bertanggungjawab memantau dan memonitor implementasi *Bolsa Família* dan Bank Federal yang menyalurkan uang tunainya.

Sebagai suatu program subsidi bersyarat, maka terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima *Bolsa Família*. Syarat utama yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima *Bolsa Família* adalah anak-anak yang berada di usia 6 – 17 tahun harus memenuhi minimal 85% kehadiran di sekolah. Selain itu anak-anak yang dibawah 6 tahun harus mendapatkan imunisasi, dan anak-anak di bawah 6 tahun serta ibu hamil harus rutin melakukan cek kesehatan.¹⁶⁹ Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi, apabila tidak maka

¹⁶⁶ *Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)*. 2015. *O que é*. <http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/o-que-e>. [28 November 2015]

¹⁶⁷ *Auxílio-Gás* adalah sebuah subsidi yang diberikan pemerintah Brasil kepada penduduk miskin Brasil berupa uang tunai untuk membeli gas untuk memasak. *Social Protection Platform* (Platform khusus yang merupakan bagian dari ILO). 2015. *BRAZIL: "BOLSA FAMÍLIA" PROGRAMME*. <http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=1805> [28 November 2015]

¹⁶⁸ MDS. 2015. *Atribuições de cada nível de governo*. <http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/gestao-do-programa/atribuicoes-de-cada-nivel-de-governo> [28 November 2015]

¹⁶⁹ Fábio Veras Soares, Rafael Perez Ribas, dan Rafael Guerreiro Osório. 2007. "Evaluating the Impact of Brazil's Bolsa Família: Cash Transfer Programmes in Comparative Perspective" dalam *IPC evaluation note Number 1 December, 2007*.

Bolsa Família yang diterima oleh keluarga tersebut dapat dihentikan. Persyaratan tersebut juga guna untuk memberantas angka buta huruf di Brasil sekaligus meningkatkan sumber daya manusia, serta untuk meningkatkan tingkat kesehatan anak – anak dan ibu hamil.

Besarnya uang tunai yang diberikan kepada keluarga miskin berbeda-beda, tergantung dari kategori kemiskinan yang dialami. Meskipun Brasil tidak memiliki *national poverty line*, tetapi pemerintah menetapkan 140 reais (R\$) sebagai batas kemiskinan dan R\$ 70 sebagai batas yang masuk kategori sangat miskin (*extremely poor*). Bagi keluarga penerima *Bolsa Família*, maka mereka berhak menerima R\$ 18 bagi tiap ibu hamil dan atau bagi tiap anak dengan maksimal 3 anak dan umur maksimal 17 tahun. Sehingga tiap keluarga dapat menerima uang tunai maksimal sejumlah R\$ 54. Sementara itu bagi keluarga yang masuk kategori sangat miskin dengan penghasilan R\$ <70, maka berhak menerima tambahan subsidi sebesar R\$ 58.¹⁷⁰ Berdasarkan data yang diungkapkan ILO, besarnya uang tunai tersebut kemudian ditingkatkan menjadi antara R\$ 32 – R\$ 306 tergantung kategori kemiskinan yang dialami.¹⁷¹

Ketika pertama kali diterapkan pada tahun 2003, tercatat terdapat 3.6 juta keluarga yang menerima *Bolsa Família*. Angka tersebut semakin meningkat tiap tahunnya hingga mencapai 13.8 juta keluarga yang menerima *Bolsa Família* pada tahun 2013 atau sekitar 50 juta penduduk Brasil, setara dengan seperempat populasi Brasil.¹⁷² Dari semua penerima *Bolsa Família*, mayoritas adalah para penduduk desa yang memang kemiskinan lebih banyak terjadi. 41% penerima *Bolsa Família* adalah keluarga yang berasal dari desa sementara 17% dari kota.¹⁷³

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Social Protection Platform. Loc. Cit.*

¹⁷² The Guardian. 2013.

¹⁷³ The Economist. 2015. *How to get children out of jobs and into school.* <http://www.economist.com/node/16690887> 2010. [28 November 2015]

Tabel 3.7 Keluarga Penerima *Bolsa Família* 2003 – 2015

No.	Tahun	Penerima <i>Bolsa Família</i>
1.	2003	3.615.596
2.	2004	6.571.839
3.	2005	8.700.445
4.	2006	10.965.810
5.	2007	11.043.076
6.	2008	10.557.996
7.	2009	12.370.915
8.	2010	12.778.220
9.	2011	13.352.306
10.	2014	13.738.415
11.	2015	13.782.217

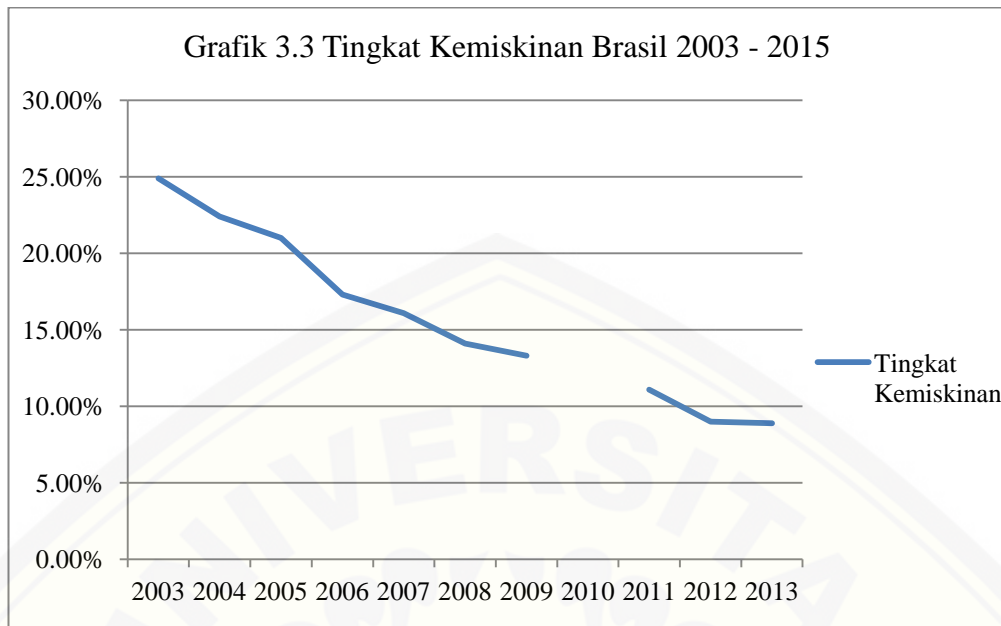
Sumber: data dikumpulkan dari website MDS dan data yang dilaporkan ILO pada *Social Protection Platform*.

Sejak diimplementasikan pada tahun 2003, *Bolsa Família* terbukti merupakan suatu bentuk subsidi bersyarat yang berhasil. Keberhasilan implementasi *Bolsa Família* dapat diperhatikan dari keberhasilan pemerintah Brasil menurunkan tingkat kemiskinan di negaranya. Selain memang karena pertumbuhan ekonomi yang stabil melalui stabilisasi makroekonomi, *Bolsa Família* juga dikatakan sebagai penyumbang keberhasilan pemerintah Brasil menurunkan tingkat kemiskinan di Brasil.

Tabel 3.8 Tingkat Kemiskinan di Brasil Setelah Implementasi *Bolsa Família* 2003-2013

No	Tahun	Tingkat Kemiskinan di bawah Garis Kemiskinan Brasil
1.	2003	24.9%
2.	2004	22.4%
3.	2005	21.0%
4.	2006	17.3%
5.	2007	16.1%
6.	2008	14.1%
7.	2009	13.3%
8.	2010	-
9.	2011	11.1%
10	2012	9.0%
11.	2013	8.9%

Sumber: data dikumpulkan dari website resmi Bank Dunia.



Selain berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Brasil, pemberian *Bolsa Família* juga berdampak pada tingkat buta huruf serta tingkat kematian bayi. Terkait dengan syarat yang mengharuskan anak-anak usia 6-17 tahun bersekolah, maka implementasi *Bolsa Família* juga berdampak pada penurunan angka buta huruf di Brasil. Tingkat kematian bayi di bawah lima tahun juga berhasil diturunkan di Brasil.

Tabel 3.9 Tingkat Buta Huruf Usia 5< Tahun di Brasil 2003 - 2011

No	Tahun	Tingkat Buta Huruf Brasil 2003 – 2011
1.	2003	13.69%
2.	2004	13.69%
3.	2005	13.27%
4.	2006	12.43%
5.	2007	11.88%
6.	2008	11.51%
7.	2009	11.17%
8.	2010	-
9.	2011	9.83%

Sumber: data dikumpulkan dari website resmi IBGE

Tabel 3.10 Tingkat Kematian Bayi 2003 – 2013 di Brasil

No	Tahun	Tingkat Kematian Bayi di Brasil per 1000 Kelahiran
1.	2003	26.4
2.	2004	24.6
3.	2005	22.9
4.	2006	21.4
5.	2007	20
6.	2008	18.6
7.	2009	17.4
8.	2010	16.3
9.	2011	15.3
10	2012	14.5
11.	2013	13.7

Sumber: data dikumpulkan dari website resmi Divisi Statistik PBB (UNSTATS)

Kontribusi *Bolsa Família* yang begitu besar terhadap tingkat kemiskinan di Brasil menjadikan program ini menjadi salah satu program CCT terbaik yang pernah diterapkan di dunia. Bahkan UNDP dan Bank Dunia banyak menjadikan *Bolsa Família* sebagai percontohan bagi model pemberantasan kemiskinan bagi negara berkembang lainnya. Setelah *Bolsa Família* terbukti berhasil dilaksanakan di Brasil, banyak pula negara di Amerika Latin yang juga meniru model pemberantasan kemiskinan tersebut. Bukan hanya itu, bahkan ketika masa jabatan Presiden Lula berakhir pada 2011, Presiden Dilma Rouseff yang menggantikannya juga meneruskan program tersebut.

Dalam rezimnya, Presiden Dilma memasukkan *Bolsa Família* kedalam programnya sendiri yang dinamakan *Brasil Sem Miséria Plan* (BSMP) pada tahun 2011. Sama dengan *Programa Fome Zero* yang menjadi inisiatif Presiden Lula, BSMP juga menjadikan *Bolsa Família* sebagai pilar utama programnya untuk memberantas kemiskinan. Selain *Bolsa Família*, dalam program Presiden Dilma yang baru ini juga terdapat program untuk mengakuisisi pangan dari petani kecil (*Programa de Aquisição de Alimentos*), kredit untuk para petani hutan hutan (*Bolsa Verde Program*), insentif untuk aktifitas produksi desa (*Fomento às Atividades Produtivas Rurais*), program asistensi dan pencarian pekerjaan bagi pelajar (*Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego*, PRONATEC), pelayanan kesehatan dasar (*Unidades Básicas de Saúde*, UBS),

dan program mikrokredit produktif nasional (*Programa Nacional Microcrédito Produtivo Orientado*, PNMPO).¹⁷⁴ Dengan tetap menggunakan model pemberian uang tunai melalui *Bolsa Família*, pencapaian program yang dilakukan selama era Presiden Dilma ini juga sama berhasilnya dengan pencapaian semasa Presiden Lula.

Presiden Dilma ingin mengulang keberhasilan *Bolsa Família* pada masa Presiden Lula dan menjadi negara berkembang pertama yang mencapai target MDG1.

"We want to eradicate extreme poverty by 2014 and make Brazil the first developing country to achieve the first of the UN's Millennium Development Goals" Tereza Campello, Menteri Pembangunan Sosial (*Social Development Minister*) Brasil pada masa Presiden Dilma Rouseff.¹⁷⁵ Ambisi Presiden Dilma untuk menjadikan Brasil sebagai negara pertama yang mencapai target MDG1 juga dapat dilihat dari pernyataan wakil Brasil bagi *Food and Agriculture Organization* (FAO). "We do believe that it's perfectly possible to end extreme poverty in Brazil by 2015," Antonino Marques Porto, 2013.¹⁷⁶

Akan tetapi dalam pelaksanaan *Bolsa Família*, baik semasa Presiden Lula ataupun semasa Presiden Dilma, penyaluran *Bolsa Família* dinilai masih kurang efektif. Hal ini karena untuk memperoleh program tersebut maka keluarga yang masuk kategori penerima harus mendaftar ke pemerintah kota madya, dievaluasi kelayakannya, dan baru pemerintah kota madya yang memberikan data tersebut ke negara bagian dan baru ke MDS. Dalam proses ini banyak terjadi penyalahgunaan sehingga mengakibatkan penyimpangan tujuan *Bolsa Família* tersebut.

Dari seluruh anggaran yang diberikan untuk *Bolsa Família*, hanya 40% dari anggaran tersebut yang menguntungkan 20% keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrim (quintile terbawah).¹⁷⁷ Sedangkan 60% anggaran lainnya lebih menguntungkan kelas yang lebih tinggi. Bahkan pada tahun 2012, tercatat terdapat sekitar 2000 politisi yang menerima *Bolsa Família* meskipun telah

¹⁷⁴ Data diperoleh dari laporan Kementerian Pengembangan Sosial dan Pemberantasan Kelaparan (*Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome*, MDS).

¹⁷⁵ BBC. 2011. *Loc. Cit.*

¹⁷⁶ IPSN. *Loc. Cit.*

¹⁷⁷ Vinod Tomas. *Op. Cit.* Halaman 37.

dilantik.¹⁷⁸ Dalam prakteknya, besarnya uang tunai yang diterima oleh tiap keluarga di tiap daerah juga berbeda-beda. Terdapat pembatasan anggaran *Bolsa Família* bagi tiap negara bagian yang diberikan oleh MDS. Oleh karena itu bagi negara bagian yang penerima *Bolsa Família* lebih banyak dari anggaran yang diberikan, maka besarnya *Bolsa Família* yang diberikan akan dikurangi.

Dalam implementasinya, pemberian *Bolsa Família* memiliki dampak yang berbeda bagi keluarga miskin yang ada di desa dan di kota. Pemberian *Bolsa Família* lebih berhasil memberantas kemiskinan yang ada di desa dari pada yang ada di kota. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Instituto Brasileiro de Geografia* (IBGE, lembaga statistik Brasik) pada tahun 2002 – 2014 ketika *Bolsa Família* diimplementasikan, tingkat kemiskinan di desa turun sebesar 65.2%. Angka tersebut lebih tinggi dari pada di tingkat nasional yang mencapai 58.7%.¹⁷⁹ Perbedaan ini menunjukkan bahwa implementasi *Bolsa Família* memang banyak yang difokuskan di daerah pedesaan. Bagi keluarga di daerah pedesaan, *Bolsa Família* sudah dianggap sebagai penghasilan reguler yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Bahkan negara bagian Belágua yang memang miskin, 80% penduduknya merupakan penerima *Bolsa Família*.

Perbedaan dampak pemberian *Bolsa Família* tersebut juga karena disebabkan oleh perbedaan biaya hidup di kota dan di pedesaan. Harga berbagai kebutuhan hidup keluarga miskin di Brasil bahkan yang tinggal di *favela* jauh lebih mahal dari pada yang tinggal di desa (biaya yang dikeluarkan untuk hidup di kota sekitar dua klai lipat dari pada di desa).¹⁸⁰ Di kota, uang *Bolsa Família* hanya dapat memenuhi beberapa kebutuhan saja, belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk sekolah dan vaksin yang menjadi syarat *Bolsa Família*. Oleh karena itu meskipun ada pemberian subsidi bersyarat, keluarga miskin yang tinggal di kota memiliki kemungkinan yang lebih sedikit untuk terlepas dari

¹⁷⁸ Taylor Barnes. 2013. *Brazil's Bolsa Família: welfare model or menace?*. <http://www.csmonitor.com/World/Americas/2013/1117/Brazil-s-Bolsa-Familia-welfare-model-or-menace> [29 November 2015]

¹⁷⁹ MDS. 2015. *Extrema pobreza reduz 65,2% no meio rural*. <http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2015/dezembro/extrema-pobreza-reduz-65-2-no-meio-rural> [4 Desember 2015]

¹⁸⁰ Sean Higgins. 2011. *The Impact Of Bolsa Família On Poverty: Does Brazil's Conditional Cash Transfer Program Have A Rural Bias?*. The World Bank. Halaman 88.

kemiskinan dari pada keluarga miskin yang ada di pedesaan meskipun dengan adanya pemberian *Bolsa Família*.

Batas kemiskinan yang digunakan oleh pemerintah Brasil dalam menentukan penerima *Bolsa Família* juga yang mendorong perbedaan dampak pemberantasan kemiskinan di desa dan di kota. Terkait dengan besarnya biaya hidup yang harus dikeluarkan di kota, maka tentu saja penghasilan yang diperoleh keluarga miskin yang ada di kota juga lebih tinggi dari pada keluarga miskin yang ada di desa. Keluarga miskin di kota, terutama apabila keluarga besar, terkadang memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari R\$ 140 yang dijadikan standar kemiskinan meskipun mereka belum mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut berbeda dengan keluarga yang ada di desa, meski dengan penghasilan kurang dari R\$ 140, terkadang sudah dapat memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi keluarga di kota yang memiliki penghasilan lebih tinggi dari R\$ 140 tidak akan masuk dalam kategori penerima *Bolsa Família* meskipun masih tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pilar yang kedua dari *Programa Fome Zero* adalah *Alimentação Escolar* (*school meal*) adalah program pemberian bekal sekolah kepada 47 juta siswa miskin di Brasil setiap hari. Pilar yang ketiga dari *Programa Fome Zero* adalah *Fortalecimento da Agricultura Familiar* (*strengthening family agriculture*), yaitu suatu program berbasis pertanian yang bertujuan untuk memperkuat dan menstimulasi pertanian-pertanian berbasis kecil dan berbasis keluarga agar dapat meningkatkan jumlah ketersediaan pangan dan meningkatkan pemasukan masyarakat. Pilar yang ketiga ini terdiri dari kredit bersubsidi, pelatihan dan pembimbingan teknis, asuransi kepada para petani kecil, dan investasi pada para petani kecil.

BAB 5. KESIMPULAN

Implementasi MDG1 sebagai rezim internasional untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim di Brasil merupakan bentuk hegemoni global Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak dapat menghegemoni Brasil secara langsung karena munculnya sentimen anti-Amerika Serikat setelah kegagalan SAP membawa kemakmuran di Brasil. Oleh karena itu Amerika Serikat memanfaatkan nilai-nilai universal yang termuat di dalam MDG1 untuk menyelipkan prinsip-prinsip neoliberal dan mempertahankan dominasinya di Brasil.

Brasil mengimplementasikan MDG1 karena konstruksi IFIs, OECD, dan PBB yang menjadikan MDG1 sebagai satu-satunya solusi ideal untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Berbagai organisasi tersebut juga mengkonstruksikan bahwa kerjasama kolektif dengan negaa maju merupakan suatu tindakan yang diperlukan untuk mencapai target MDG1. Melalui pengaruh yang dimiliki Amerika Serikat dalam berbagai organisasi tersebut, Amerika Serikat memastikan penerapan prinsip-prinsip neoliberal sebagai inti dari kerjasama kolektif yang dilakukan. Konstruksi itu pula yang menjadikan Brasil secara sukarela menerapkan MDG1 meskipun harus menerapkan prinsip-prinsip neoliberal.

MDG1 diimplementasikan melalui pemberian *Bolsa Família* dan deregulasi kebijakan agrikultur di Brasil. Berdasarkan data Bank Dunia, implementasi dua kebijakan tersebut membantu Brasil mengurangi tingkat kemiskinan dan kelaparan yang ada di negaranya. Akan tetapi pada prosesnya, Amerika Serikat merupakan negara yang lebih diuntungkan dari implementasi dua kebijakan tersebut.

Implementasi dua kebijakan terkait MDG1 tersebut menjadikan Brasil dependen terhadap bantuan, investasi, serta hutang luar negeri yang mayoritas diperoleh dari IFIs, OECD, dan IADB. Oleh karena itu semakin Brasil berupaya

untuk mencapai target MDG1, semakin tinggi pula dependensi Brasil terhadap bantuan, investasi, serta hutang luar negeri. Amerika Serikat merupakan negara dengan investasi terbesar di Brasil, dan juga negara yang memiliki saham tertinggi di berbagai organisasi sumber dana implementasi MDG1 di Brasil. Sehingga dengan semakin tingginya dependensi Brasil terhadap sumber dana tersebut, Amerika Serikat juga semakin diuntungkan.

Pembukaan pasar bebas di Brasil terkait implementasi MDG1 juga menyebabkan dominasi berbagai MNC Amerika Serikat di Brasil. Didukung dengan adanya deregulasi kebijakan agrikultur, Cargill dan Monsanto menjadi MNC paling mendominasi sektor agrikultur Brasil. Semakin didorongnya pembangunan sektor agrikultur di Brasil, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh kedua MNC tersebut. Keberadaan keluarga-keluarga konglomerat Brasil yang menguasai perekonomian serta elit-elit politik yang diuntungkan dari penerapan prinsip neoliberal juga menjadi salah satu pendukung keberhasilan hegemoni global Amerika Serikat di Brasil. Konglomerat-konglomerat serta elit-elit tersebut bertindak sebagai agen-agen penjamin dominasi Amerika Serikat tetap bertahan di Brasil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baer, Werner. 2001. *The Brazilian Economy: Growth and Development*. Connecticut: Greenwood Publishing Group.
- Barkin, J. Samuel. 2006. *International Organization: Theories and Institutions*. New York: Palgrave Macmillan.
- Barshefsky, Charlene, dkk. 2008. *U.S.-Latin America Relations: A New Direction for New a New Reality*. New York: SmartWood.
- Bethell, Leslie. 2008. *The Cambridge History of Latin America – Volume IX: Brazil Since 1930*. New York: Cambridge University Press.
- Brewer, Stewart. 2006. *Border and Bridges: A History of U.S.-Latin American Relations*. Connecticut: Praeger Security International.
- Burchill, Scott dan Linklater, Andrew. 1996. *Theories of International Relations*. New York: St. Martin Press.
- Carlaes, Walter, Risse, Thomas, dan Simmons, Beth A. 2013. *Handbook Hubungan Internasional* (seri terjemahan). Bandung: Nusa Media.
- Foucault, Michel. 2005. *The Order of Things: An archaeology of the human sciences*. London: Routledge.
- Graziano da Silva, José; Del Grossi, Mauro Eduardo, dan Galvão de França, Caio. 2011. *The Programa Fome Zero (Zero Hunger) Program - The Brazilian Experience*. Brazil: FAO.
- Greenbaum, Harry. 2003. *Brazil*. Philadelphia: Chelsea House Publisher.
- Higgins, Sean. 2011. *The Impact Of Bolsa Familia On Poverty: Does Brazil's Conditional Cash Transfer Program Have A Rural Bias?*. The World Bank.
- Klotz, Audie dan Prakash, Deepa. 2008. *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kementrian Pertanian, Peternakan, dan Pasokan Pangan (*Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply* atau *Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*, MAPA). 2008. *Brazil Agricultural Policies*. MAPA.
- Ladd, Everett Carll. 1989. *The American Polity – The People and Their Government*. New York: W. W. Norton & Company.

- McArthur, John W. dan Schmidt-Traub, Guido. 2015. *Binging 2015 to 2005: Implementing the Millennium Development Goals today*. New York: The United Millennium Development Project.
- Meade, Teresa A. 2010. *A Brief History of Brasil*. New York: Facts on File.
- Middleton, Neil and O’Keefe, Phil. 2003. *Rio Plus Ten Politics, Poverty and Environment*. London: Pluto Press.
- O’Donnell, Guillermo A. 1979. *Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American Politics*. Berkeley: Institute of International Studies, University of California.
- Roberts, Kenneth, dkk. 2007. *The ‘New Left’ and Democratic Governance in Latin America*. Washington DC: Woodrow Wilson International Center for Scholar .
- Roett, Riordan. 2010. *The New Brazil*. Virginia: R.R. Donelley.
- Santana, Carlos Augusto M. dan Nascimento, José Rente. 2012. *Public Policies and Agricultural Investment in Brazil*. Roma: FAO.
- Smith, Joseph. 2005. *THE UNITED STATES AND LATIN AMERICA – A history of American diplomacy 1776–2000*. New York: Routledge.
- . 2007. *Historical Dictionary of United States–Latin American Relations*. Plymouth: The Scarecrow Press, Inc.
- Sprinz, Detlef. F. dan Wolinsky-Nahmias, Yael. 2004. *Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relation*. The University of Michigan Press.
- Su-ming, Khoo. 2005. “The Millennium Development Goals: A Critical Discussion” dalam *Trócaire Development Review* . Dublin.
- Tomas, Vinod. 2006. *Development in a Land of Contrasts*. California, Wasington: Stanford University Press dan The World Bank.
- Yin, Robert K. 2011. *Qualitataive Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.

Jurnal

- Chayes, Abram dan Chayes, Antonia Handler. 1993. "On Compliance" dalam *International Organization* 47, 2, Spring 1993. World Peace Foundation dan Massachusetts Institute and Technology.
- Cox, Robert W. 1993. "Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method" dalam *Millennium: Journal of International Studies* June 2983 Vol 12, No. 2 162-175.
- . 2004. "Beyond Empire and Terror: Critical Reflections on the Political Economy of World Order" dalam *New Political Economy*, Vol. 9, No, 3, September 2004.
- Guanziroli, Carlos E. dan Basco, Carlos A. 2010. "Construction of agrarian policies in Brazil: the case of the National Program to Strengthen Family Farming (PRONAF)" dalam *Comuniica Year 5 January – July 2010*.
- Herscovici, Ronald: Herszkowicz, Eduardo J., dan Stacchini, Frederico M. 2008. "Securitisation of agribusiness financial instruments in Brazil: an expanding market" dalam *Global Securitisation and Structured Finance 2008*.
- Hulme, David. 2009. "The Millennium Development Goals (MDGs): A Short History of the World's Biggest Promise" dalam *BWPI Working Paper 100*. University of Manchester: Brooks World Poverty Institute.
- . 2010. "Lessons from the Making of the Millennium Development Goals" dalam *Poverty in Focus Number 19, January 2010*. International Policy Centre for Inclusive Growth, Poverty Practice, Bureau for Development Policy, UNDP.
- IMF. 2015. *The IMF and Millennium Development Goals*. IMF publisher.
- Marió, Estanislao Gacitúa dan Woolcock, Michael. 2008. "Social Exclusion and Mobility in Brazil" dalam *Direction in Development Countries and Region*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
- OECD. 2005. "Brazil Agriculture Policy Review" dalam *Highlights from OECD country Reviews*. Oktober 2005, vol 1, no 1.
- OXFAM. 2010. *"Fighting Hunger in Brazil" Oxfam Case Studi*. Oxford: OXFAM pub.
- Soares, Fábio Veras, dkk. 2007. "Evaluating the Impact of Brazil's Bolsa Família: Cash Transfer Programmes in Comparative Perspective" dalam *IPC evaluation note Number 1 December, 2007*.

PBB. *Road map towards the implementation of the United Nations Millennium Declaration: Report of the Secretary-General A/56/326* 6 September 2001. New York.

The World Bank. 2003. *Rural Poverty Alleviation in Brazil: Toward an Integrated Strategy*. Washington, D.C.

Waage, Jeff, dkk. 2010. "The Millennium Development Goals: a cross-sectoral analysis and principles for goal setting after 2015" dalam *The Lancet Commissions September 13, 2010*. London International Development Centre.

Seminar

Corrales, Javier. Maret 2010. "Latin American Presidents, 1990s–2000s: Who's a Leftist, Who's a Populist, and What's the Difference". Miller Centre Universitas Virginia. Profesor Corrales adalah professor Ilmu Politik dari Perguruan Tinggi Amherst dan lulusan Harvard David Rockefeller Centre untuk Studi Amerika Latin.

Internet

Animated Atlas. 2015. *American History Timeline*.
<http://www.animatedatlas.com/timeline.html>

Barnes, Taylor. 2013. *Brazil's Bolsa Família: welfare model or menace?*.
<http://www.csmonitor.com/World/Americas/2013/1117/Brazil-s-Bolsa-Familia-welfare-model-or-menace>

BUREAU OF WESTERN HEMISPHERE AFFAIRS. 2015. *U.S. Relations With Brazil*. <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35640.htm>

BBC. BBC. 2011. *Brazil launches scheme to lift millions out of poverty*.
<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-13626951>

.2014. *Favela life: Rio's city within a city*. <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-27635554>

Belser, Andreas dan Morton, Adam David. 2003. *Theoretical and Methodological Challenges of neo-Gramscian Perspective in International Political Economy*.
http://www.internationalgramscisociety.org/resources/online_articles/articles/bieler_morton.shtml

- Bloomberg. 2012. *Billionaire Ometto Ending Super Vote Fuels Cosan Gain*. <http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-12-17/billionaire-ometto-ending-super-vote-fuels-cosan-gain>
- Buerman, Josh. 2015. *Enforcing American Hegemony – A Timeline*. <http://www.flagrancy.net/timeline.html>
- Cargill. 2016. *Cargill Overview*. <http://www.cargill.com.br/en/about-cargill-brazil/cargill-overview/index.jsp>
- . 2016. *Cargill Sugar & Ethanol Brazil*. <http://www.cargill.com/company/businesses/cargill-sugar-ethanol-brazil/>
- Choicemagazine.org. 2006. *The Evolution of Agricultural Policies and Agribusiness Development in Brazil*. <http://www.choicemagazine.org/2006-2/tilling/2006-2-08.htm>
- CIA. 2013. *Brazil*. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html>
- Departemen Sejarah Amerika Serikat. 2015. *1914–1920: World War One and Wilsonian Diplomacy*. <https://history.state.gov/milestones/1914-1920>
- . 2015. *A Guide To The United States' History Of Recognition, Diplomatic, And Consular Relations, By Country, Since 1776: Brazil*. <http://history.state.gov/countries/brazil>
- . 2015. *Building the Panama Canal, 1903–1914*. <https://history.state.gov/milestones/1899-1913/panama-canal>
- . 2015. *Good Neighbor Policy, 1933*. <https://history.state.gov/milestones/1921-1936/good-neighbor>
- . 2015. *Monroe Doctrine*. <https://history.state.gov/milestones/1801-1829/monroe>
- . 2015. *New Deal Trade Policy: The Export-Import Bank & the Reciprocal Trade Agreements Act, 1934*. <https://history.state.gov/milestones/1921-1936/export-import-bank>
- . 2015. *Oil Embargo, 1973–1974*. <https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-embargo>
- . 2015. *Purchase of Louisiana*. <https://history.state.gov/milestones/1801-1829/louisiana-purchase>
- . 2015. *The Annexation of Texas, the Mexican-American War, and the Treaty of Guadalupe-Hidalgo, 1845–1848*. <https://history.state.gov/milestones/1830-1860/texas-annexation>

- . 2015. *The Paris Peace Conference and the Treaty of Versailles*. <https://history.state.gov/milestones/1914-1920/paris-peace>
- . 2015. *The Potsdam Conference, 1945*. <https://history.state.gov/milestones/1937-1945/potsdam-conf>
- . 2015. *The Spanish-American War, 1898*. <https://history.state.gov/milestones/1866-1898/spanish-american-war>
- . 2015. *The United States, Cuba, and the Platt Amendment, 1901*. <https://history.state.gov/milestones/1899-1913/platt>
- . 2015. *U.S. Entry into World War I, 1917*. <https://history.state.gov/milestones/1914-1920/wwi>
- . 2015. *Wilson Fourteen Points*. <https://history.state.gov/milestones/1914-1920/fourteen-points>
- Divisi Statistik FAO. 2016. *Production-Cop*. <http://faostat3.fao.org/compare/E>
- Ethanol Producer Magazine. 2014. *UNICA: Brazilian ethanol production up, exports down*. <http://ethanolproducer.com/articles/11760/unica-brazilian-ethanol-production-up-exports-down>
- FAO. 2014. *Brazil: The hunger of the missed meal*. <http://www.fao.org/english/newsroom/news/2003/13320-en.html>
- Forbes. 2016. *The 20 Companies That Own Brazil*. <http://www.forbes.com/sites/andersonantunes/2014/01/23/the-20-companies-that-own-brazil/>
- Friend of the MST. 2013. *The Dilemma of Agrarian Reform in Brazil's Agribusiness*. <http://www.mstbrazil.org/news/dilemma-agrarian-reform-brazils-agribusiness>
- Harvard Kennedy School – Shorestein Center. 2015. *New Left policies and Latin America: Research review and reading list*. <http://journalistsresource.org/studies/international/development/research-round-up-leftist-policies-work-latin-america>
- History.com. 2015. *Confederate States of America*. <http://www.history.com/topics/american-civil-war/confederate-states-of-america>
- IADB. 2016. *Capital Stock and Voting Power*. <http://www.iadb.org/en/about-us/capital-stock-and-voting-power,3166.html>
- IFAD. 2015. *Brazil: Dom Helder Camara Project (DHCP)*. http://www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/doc/prj/region/pl/brazil/dhcp/index.htm

- IIF. 2015. *The Integrated Implementation Framework: Achieving MDGs Through Mutual Accountability*. <http://iif.un.org/content/integrated-implementation-framework-achieving-mdgs-through-mutual-accountability>
- ILO. 2015. *BRAZIL: "BOLSA FAMÍLIA" PROGRAMME*. <http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=1805>
- . 2015. *Employment Indicators*. <http://www.ilo.org/public/english/employment/yen/whatwedo/projects/indicators/5.htm>
- INCRA. 2015. *Reforma Agrária*. http://www.incra.gov.br/reforma_agraria
- International Fund for Agricultural Development (IFAD). Tanpa tahun. *Rural poverty approaches, policies, & strategies in Brazil*. <http://www.ruralpovertyportal.org/country/approaches/tags/brazil>
- Inter Press Service News Agency (IPSN). 2013. *No Hunger in Brazil by 2015*. <http://www.ipsnews.net/2013/06/no-hunger-in-brazil-by-2015/>
- Investe São Paulo. 2015. *Mars announces R\$ 750 million investment in São Paulo*. <http://www.en.investe.sp.gov.br/news/post/mars-announces-r-750-million-investment-in-sao-paulo/>
- JICA). 2015. *Japan's Oda and JICA*. <http://www.jica.go.jp/english/about/oda/>
- Mars Inc. 2016. *About Mars*. <http://www.mars.com/brazil/en/about.aspx>
- Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 2015. *O que é*. <http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/o-que-e>
- . 2015. *Atribuições de cada nível de governo*. <http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/gestao-do-programa/atribuicoes-de-cada-nivel-de-governo>
- . 2015. *Extrema pobreza reduz 65,2% no meio rural*. <http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2015/dezembro/extrema-pobreza-reduz-65-2-no-meio-rural>
- Monsanto. 2008. *Monsanto Company to Invest in Technologies for Sugarcane With Acquisitions of CanaVialis and Alellyx*. <http://news.monsanto.com/press-release/monsanto-company-invest-technologies-sugarcane-acquisitions-canavialis-and-alellyx>
- MST. 2015. *Teachers Insurance and Annuity Association – College Retirement Equities Fund is a Fortune*. <http://www.mstbrazil.org/content/tiaa-cref-us-investment-giant-accused-land-grabs-brazil>
- OECD. 2015. *Budget*. <http://www.oecd.org/about/budget/>

- . 2015. *DAC List of ODA recipients*. <http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm>
- . 2015. *Official Development Assistance – definition and coverage*. <http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm>
- Office of the United States Trade Representative. 2016. *Brazil*. <https://ustr.gov/countries-regions/americas/brazil>
- PBB. Tanpa tahun. *Millennium Summit*. http://www.un.org/en/events/pastevents/millennium_summit.shtml
- . 2015. *Millennium Development Goals Report*. <http://www.un.org/millenniumgoals/reports.shtml>
- Reuters. 2014. *Brazilian farmers demand Monsanto refund their money for GMO crops that don't work*. <https://www.rt.com/usa/176836-brazil-farmers-gmo-refund/>
- . 2015. *Brazil presents another hurdle in Monsanto's bid for Syngenta*. <http://www.reuters.com/article/us-syngenta-ag-m-a-monsanto-brazil-idUSKCN0Q90BM20150804#dVDhhqdVSrLvqe6G.97>
- Ruralpovertyportal.org. 2015. *Rural Poverty in Brazil*. <http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/brazil>
- Sennes, Ricardo. 2015. *U.S. – Brasil Realtion: A New Beginning?*. <http://www.atlanticcouncil.org/usbrazil/>
- The Brazil Business. 2013. *Financing Programs for Agribusiness*. <http://thebrazilbusiness.com/article/financing-programs-to-agribusiness>
- The Economist. 2015. *How to get children out of jobs and into school*. <http://www.economist.com/node/16690887> 2010
- The Guardian. 2011. *IMF Loans: Which Countries owe the Most?*. <http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/may/24/imf-loans-dominique-strauss-kahn>
- . 2013. *Brazil's Bolsa Família scheme marks a decade of pioneering poverty relief*. <http://www.theguardian.com/global-development/2013/dec/17/brazil-bolsa-familia-decade-anniversary-poverty-relief>
- . 2013. *Brazil's bolsa familia scheme: political tool or social welfare success?*. <http://www.theguardian.com/global-development/2013/dec/19/brazil-bolsa-familia-political-tool-social-welfare>

- . 2015. *Guns, drugs and bandidos: inside the favela too violent for Rio's armed police*. <http://www.theguardian.com/world/2015/jan/03/guns-drugs-teen-gangsters-rio-favela-police>
- The Observatory of Economic Complexity (OEC). 2015. *Brazil*. <http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/bra/>
- UNDP. 2015. *Millennium Development Goals*. http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg_goals.html
- United Millennium Project. 2006. *Goals*. <http://www.unmillenniumproject.org/goals/>
- . 2015. *Statements of support for Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals*. <http://www.unmillenniumproject.org/press/endors01.htm>
- Velasco, Joel. 2013. *Brazilian Sugarcane*. <https://www.eia.gov/biofuels/workshop/presentations/2013/pdf/presentation-08-020113.pdf>
- Website *Grupo Virgolino de Oliveira*. 2016. *Copersucar*. http://www.gvo.com.br/gvo/web/conteudo_en.asp?idioma=1&conta=44&tipo=33645
- Website Resmi PBB Divisi Statistik. 2014. <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx?IndicatorId=0&SeriesId=580>
- WHO. 2015. *Structural Adjustment Programmes (SAPs)*. <http://www.who.int/trade/glossary/story084/en/>
- Worldatlas.com. 2015. *13 Original US Colonies - Map & Details*. <http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/namerica/usstates/colonies.htm>
- World Bank. 2013. *World Development Indicators database*. Diakses dari <http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table>
- .2014. *Poverty & Equity Data*. <http://povertydata.worldbank.org/poverty/home/>
- . 2015. *Gini Index*. <http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI>
- . 2015. *Global Monitoring Report*. <http://www.worldbank.org/en/publication/global-monitoring-report>
- . 2015. *World Development Indicators: Size of the economy*. <http://wdi.worldbank.org/table/1.1>

- WTO. 2015. *Brazil*.
[http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=F
&Country=BR](http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=F&Country=BR)
- _____. 2015. *Brazil Headcount Ratio*.
<http://www.indexmundi.com/facts/brazil/poverty-headcount-ratio>
- . 2015. *Concept*. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/concept>
- . 2016. *Impact on Brazil's Economy*. <http://sugarcane.org/the-brazilian-experience/impact-on-brazils-economy>
- . 2016. *Revenue Recognition Accounting Policy*. <https://www.stock-analysis-on.net/NYSE/Company/Monsanto-Co/Analysis/Revenues>
- . 2016. *What 10 heavyweight multinational companies are saying about Brazil*. <http://exame.abril.com.br/english/brazil-now/what-10-heavyweight-multinational-companies-are-saying-about-brazil.shtml>